



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (PPMK) TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN BUKIT DURI,
KECAMATAN TEBET, JAKARTA SELATAN**

SKRIPSI

**HARIYANA
0806463492**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN (PPMK) TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN BUKIT DURI,
KECAMATAN TEBET, JAKARTA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi di bidang Ilmu Administrasi Negara**

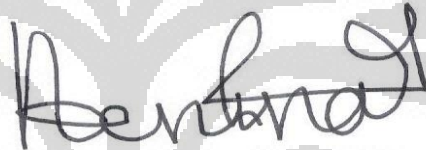
**HARIYANA
0806463492**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Hariyana
NPM : 0806463492
Tanda Tangan :



Tanggal : 28 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Hariyana

NPM : 0806463492

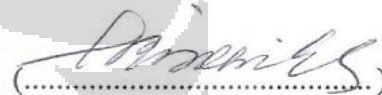
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
(PPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bukit
Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

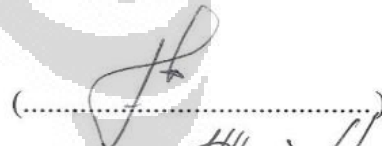
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

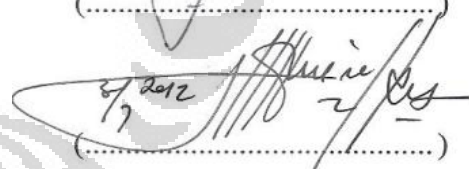
Pembimbing : Dra. Sri Susilih, M.Si



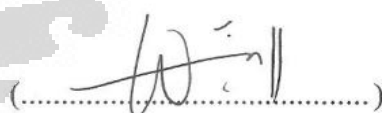
Penguji : Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si



Ketua Sidang : Dra. Rainingsih Hardjo, M.A.



Sekretaris Sidang : Murwendah, S.IA



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul “Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan” ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penyelesaian penulisan skripsi ini tidaklah mungkin terjadi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah peneliti untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

- 1) Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan FISIP UI;
- 2) Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
- 3) Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksun, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Paralel Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
- 4) Drs. Achmad Lutfi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Pembimbing Akademik;
- 5) Dra. Sri Susilih, M.Si, selaku dosen pembimbing dan pembimbing akademis peneliti yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan masa kuliah dan penyusunan skripsi ini secara tepat waktu;
- 6) Dosen-dosen Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP UI, atas materi perkuliahan yang telah diberikan mendukung penyusunan skripsi ini;

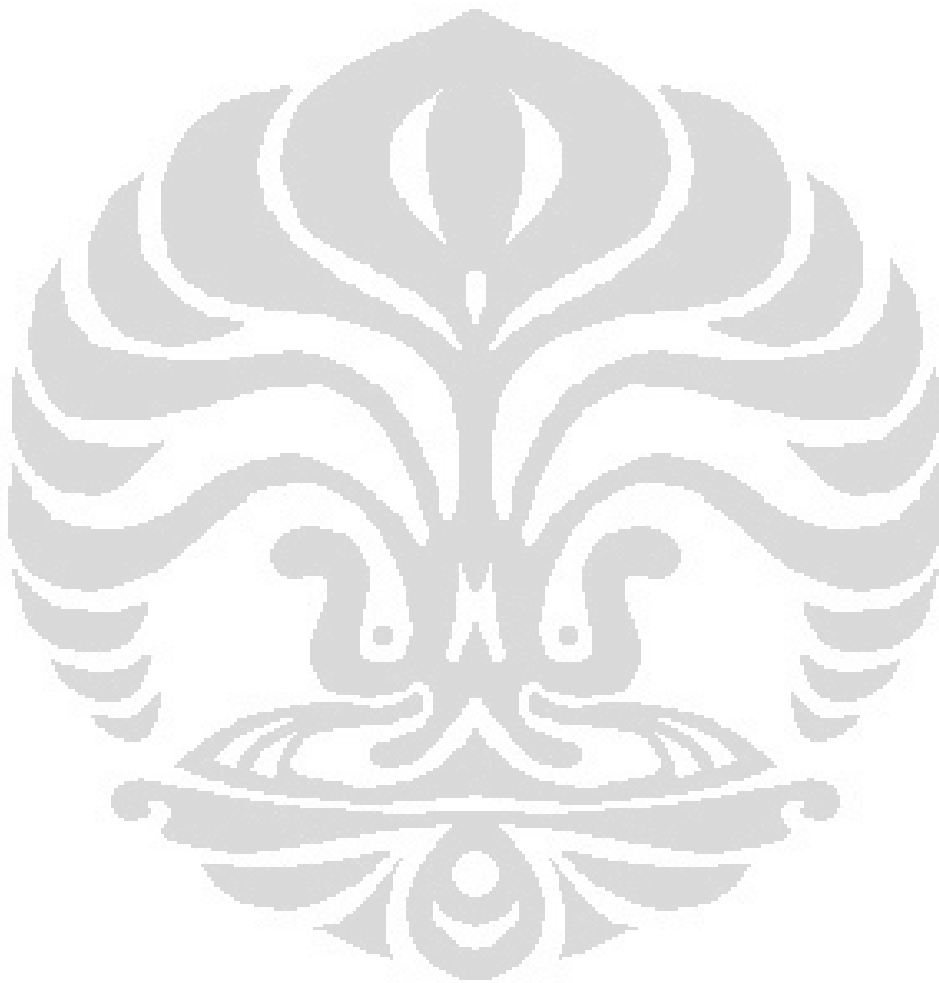
- 7) Bapak Harsono dan Bapak Joe selaku perwakilan dari Lembaga Masyarakat Kelurahan Bukit Duri yang telah membantu menjembatani peneliti dengan responden;
- 8) Anggota Dewan Kelurahan Bukit Duri dan anggota Lembaga Masyarakat Kelurahan Bukit Duri lainnya yang telah memberikan peneliti informasi yang cukup lengkap mengenai pelaksanaan PPMK di kelurahan tersebut;
- 9) Masyarakat Kelurahan Bukit Duri yang telah bersedia membantu proses pengambilan data untuk penelitian ini;
- 10) Kedua orang tua peneliti yang telah memberikan dukungan material dan moral, serta doa yang selalu menyertai;
- 11) Kakak-kakak peneliti, yaitu Herfino, Lisa Kurnia, Rivki, Putri Murni Dewi, dan Dedy Hardi beserta keempat keponakan peneliti, yaitu Zandra, Daffa, Zafina, dan Ganesha atas dukungan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini;
- 12) Teman-teman peneliti dari Departemen Ilmu Administrasi Negara 2008, khususnya Candra Murti Utami, Intan B. Leoni, Melissa Laik, Tami Januarti, Shalita Anindya, Sri Mulyani, Ganjar Satrio, dan Arfiandri Prihartanto; serta teman-teman peneliti dari Departemen Ilmu Administrasi 2008, khususnya Amalia Kusbintari, Afianka Maunaza, Anggita Febria, Lucas Filberto, dan Thomas Wahyu; yang selalu menemani dan membantu peneliti dalam menjalani masa perkuliahan;
- 13) Rekan-rekan peneliti dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Fisip UI 2011, yaitu Debie Puspasari, Anita Fitria, Nerissa Eka Agustyanti, Juwita Laras, Rosita Astri Kirana, dan Faishal Rizky yang bersedia mencurahkan waktunya, baik dalam penyusunan skripsi maupun kegiatan lainnya;
- 14) Dan seluruh pihak yang telah berkontribusi atas penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, peneliti menyadari keterbatasan dan kekurangan peneliti dalam penulisan skripsi ini dan juga memohon maaf atas kesalahan yang mungkin ditemukan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai

pihak dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan itu sendiri.

Depok, 7 Juni 2012

Peneliti



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hariyana
NPM : 0806463492
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

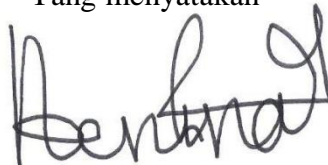
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 18 Juni 2012
Yang menyatakan



(Hariyana)

ABSTRAK

Nama : Hariyana
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

PPMK merupakan suatu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan masyarakat yang berada di tingkat paling bawah, yaitu masyarakat kelurahan sebagai sarannya. Salah satu kelurahan yang menjadi pelaksana PPMK adalah Kelurahan Bukit Duri. Program PPMK di Kelurahan Bukit Duri telah berjalan sejak tahun 2003. Namun, meski pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bukit Duri sudah mendapatkan predikat sangat baik, tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih cukup tinggi. Oleh karenanya, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimanakah dampak PPMK di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan data dan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan pemikiran dari Leo Agustino mengenai 4 dimensi dari dampak, yaitu pengaruh suatu program terhadap kelompok sasaran, pengaruh suatu program terhadap kelompok nonsasaran, keadaan program di masa kini, serta pengaruh tidak langsung suatu program terhadap kelompok sasaran. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap masing-masing dimensi tersebut.

Kata kunci:

Dampak Program, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), Kelurahan Bukit Duri

ABSTRACT

Name : Hariyana
Study Program : Public Administration
Title : The Impact of Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) for Society's Wealth In Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

PPMK is a program that held by Jakarta Provincial Government which aims to improve the well-being, with people who are at the lowest level, masyarakat kelurahan, as a target. One of the region that implement PPMK is Bukit Duri. PPMK in Bukit Duri has been running since 2003. However, despite the fact that the implementation of Bukit Duri's PPMK got a very good title, the poverty rate in the area is still quite high. Therefore, this paper will discuss how are the impact PPMK in Bukit Duri, Tebet, South Jakarta. This study uses a quantitative methods in collecting data and a quantitative approach to analyze the data. In the analysis, researchers used the ideas of Leo Agustino about 4 dimensions of impact, which are the impact of a program to target groups, the effect of a program to an nontarget group, in the present state of the program, as well as the indirect effect of a program to target groups. In the end, most of respondents gave positive responses to each dimensions.

Key words:

The Impact of Program, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), Kelurahan Bukit Duri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Signifikansi Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka.....	13
2.2 Kerangka Pemikiran	
2.2.1 Kebijakan Publik.....	23
2.2.2 Pemberdayaan	38
2.3 Hipotesis Penelitian.....	43
2.4 Model Penelitian	43
2.5 Operasionalisasi Konsep	44
BAB 3 METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	51
3.2 Jenis Penelitian	
3.2.1 Berdasarkan Tujuan Penelitian	52
3.2.2 Berdasarkan Manfaat Penelitian	52
3.2.3 Berdasarkan Dimensi Waktu	52
3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data	53
3.3 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel.....	53
3.4 Teknik Analisis Data.....	55
3.5 Lokasi Penelitian.....	56
3.6 Batasan Penelitian.....	56

BAB 4 GAMBARAN UMUM PPMK DAN KELURAHAN BUKIT DURI

4.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)	
4.1.1	Sejarah Perkembangan PPMK	58
4.1.2	Tujuan PPMK.....	62
4.1.3	Sasaran PPMK.....	63
4.1.4	Ruang Lingkup PPMK.....	64
4.1.5	Organisasi Pelaksana PPMK.....	75
4.1.6	Alur Kegiatan PPMK.....	84
4.2	Gambaran Umum Kelurahan Bukit Duri	
4.2.1	Kondisi Geografis.....	86
4.2.2	Kondisi Demografis.....	87
4.2.3	Kondisi Ekonomi, Fasilitas Fisik, dan Sosial Budaya	90

BAB 5 ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAT DI KELURAHAN BUKIT DURI, KECAMATAN TEBET, JAKARTA SELATAN

5.1	Karakteristik Responden	
5.1.1	Jenis Kelamin	97
5.1.2	Usia.....	99
5.1.3	Pendidikan.....	100
5.1.4	Pekerjaan.....	103
5.1.5	Pendapatan	104
5.2	Analisis Variabel Penelitian	
5.2.1	Dimensi Pengaruh PPMK terhadap Kelompok Sasaran.....	107
5.2.2	Dimensi Pengaruh PPMK terhadapKelompok di Luar Kelompok Sasaran	126
5.2.3	Dimensi Keadaan yang Diharapkan diMasa Kini.....	145
5.2.4	Dimensi Pengaruh Tidak LangsungPPMK terhadap Kelompok Sasaran.....	173

BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

6.1	Simpulan.....	191
6.2	Saran.....	192

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

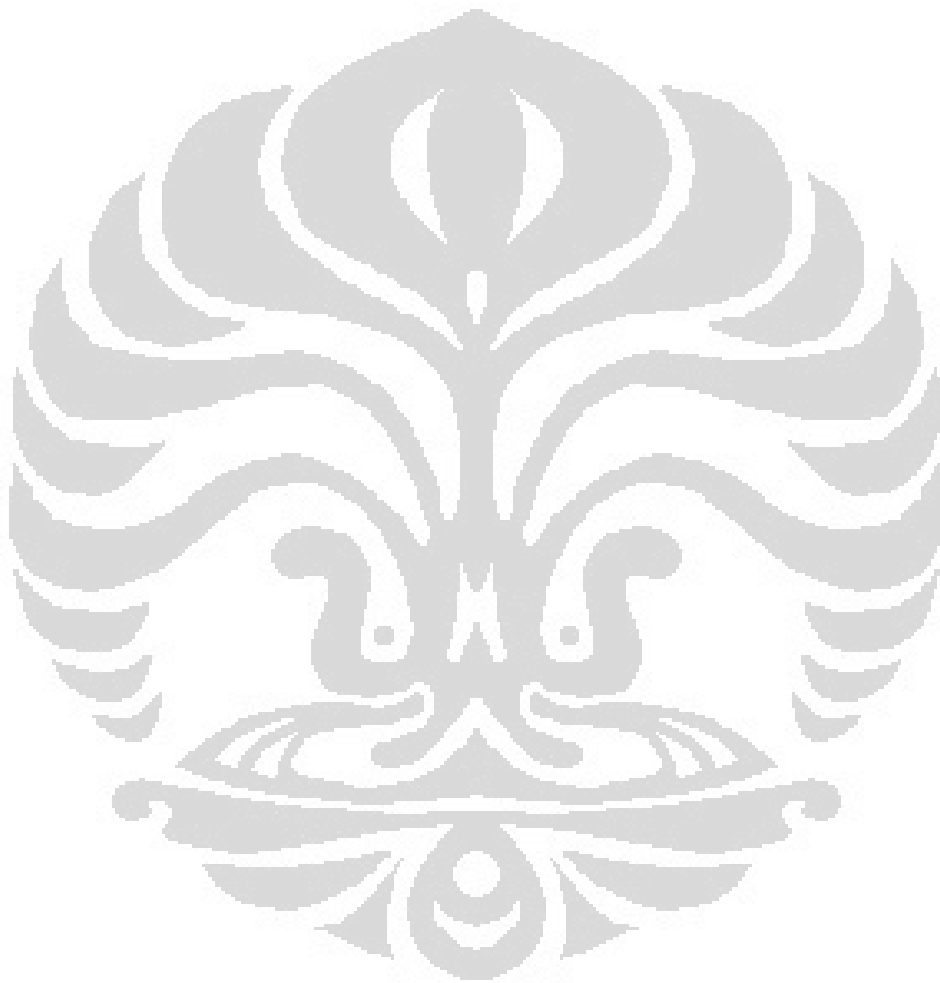
Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia berdasarkan Desa Kota Tahun 2007 – 2009	5
Tabel 1.2	Kelurahan yang Mendapatkan Peringkat A (Sangat Bagus) dalam Evaluasi PPMK Berdasarkan Pelaksanaan Tribina)	8
Tabel 2.1	Tinjauan Pustaka	18
Tabel 2.2	Operasionalisasi Konsep	45
Tabel 4.1	Rincian Kegiatan Bina Ekonomi PPMK Kelurahan Bukit Duri Tahun 2002-2006.....	66
Tabel 4.2	Rekapitulasi Kegiatan Bina Sosial PPMK Kelurahan Bukit Duri Tahun 2007-2011.....	70
Tabel 4.3	Rekapitulasi Kegiatan Bina Fisik Lingkungan PPMK Kelurahan Bukit Duri Tahun 2007-2011	73
Tabel 4.4	Persebaran Penduduk Kelurahan Bukit Duri Berdasarkan Wilayah RW	88
Tabel 4.5	Komposisi Penduduk Kelurahan Bukit Duri Berdasarkan Agama	89
Tabel 4.6	Komposisi Penduduk Kelurahan Bukit Duri Berdasarkan Mata Pencaharian	91
Tabel 4.7	Sarana Prasarana Perekonomian di Kelurahan Bukit Duri	92
Tabel 4.8	Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Bukit Duri.....	94
Tabel 4.9	Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Bukit Duri.....	94
Tabel 4.10	Fasilitas Olahraga di Kelurahan Bukit Duri.....	95
Tabel 4.11	Kelompok Kesenian di Kelurahan Bukit Duri	95
Tabel 5.1	Pembagian Kelas Analisis Deskriptif Mean	124
Tabel 5.2	Pembagian Kelas Analisis Deskriptif Mean	144
Tabel 5.3	Alokasi Dana Hibah Bina Fisik Lingkungan PPMK Kelurahan Bukit Duri untuk Perbaikan Jalan.....	162
Tabel 5.4	Pembagian Kelas Analisis Deskriptif Mean	172
Tabel 5.5	Pembagian Kelas Analisis Deskriptif Mean	189

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Persentase Kemiskinan Indonesia Tahun 2000 - 2008.....	1
Gambar 1.2	Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2004 – 2010	7
Gambar 2.1	Proses Penyusunan Kebijakan Publik menurut Winarno	25
Gambar 2.2	Model Penelitian	43
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Program PPMK.....	82
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Dewan Kelurahan Bukit Duri Periode Tahun 2006-2011	83
Gambar 4.3	Struktur Organisasi LMK Bukit Duri Periode Tahun 2011-2014	84
Gambar 4.4	Skema Pengeolaan PPMK.....	85
Gambar 5.1	Jenis Kelamin Responden Pemanfaat	98
Gambar 5.2	Jenis Kelamin Responden Nonpemanfaat	98
Gambar 5.3	Usia Responden Pemanfaat	99
Gambar 5.4	Usia Responden Nonpemanfaat.....	100
Gambar 5.5	Tingkat Pendidikan Terakhir Responden Pemanfaat.....	102
Gambar 5.6	Tingkat Pendidikan Terakhir Responden Nonpemanfaat	102
Gambar 5.7	Pekerjaan Responden Pemanfaat	103
Gambar 5.8	Pekerjaan Responden Nonpemanfaat.....	104
Gambar 5.9	Tingkat Pendapatan per Bulan Responden Pemanfaat.....	105
Gambar 5.10	Tingkat Pendapatan per Bulan Responden Nonpemanfaat	105
Gambar 5.11	Perbaikan Pendapatan	108
Gambar 5.12	Perbaikan Kemampuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan .	113
Gambar 5.13	Perbaikan Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Kesehatan.....	114
Gambar 5.14	Perbaikan Kemampuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan	115
Gambar 5.14	Perbaikan Mata Pencarian.....	116
Gambar 5.15	Usaha <i>Suplier</i> ATK Bapak Abdullah	117
Gambar 5.16	Usaha Warung Kelontong Bapak Abdullah	118
Gambar 5.17	Perbaikan Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Berlindung (Rumah).....	119
Gambar 5.18	Perbaikan Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih	120
Gambar 5.19	Perbaikan Rasa Aman terhadap Tindakan Kejahatan	122
Gambar 5.20	Perbaikan Kemampuan (hak) Untuk Berpartisipasi Dalam Kegiatan Politik	123
Gambar 5.21	Dimensi Pengaruh terhadap Kelompok Sasaran.....	125
Gambar 5.22	Kemudahan dalam Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Dengan Adanya Pembukaan Usaha Mikro di Lingkungan Sekitar	128
Gambar 5.23	Kemudahan Untuk Memanfaatkan Tenaga Terampil di Lingkungan Sekitar	130
Gambar 5.24	Perbaikan Rasa Aman terhadap Tindak Kejahatan di Lingkungan Sekitar	132
Gambar 5.25	Perbaikan Kemampuan (hak) Untuk Berpartisipasi di Lingkungan Sekitar	135

Gambar 5.26	Peningkatan Komunikasi Antarwarga.....	136
Gambar 5.27	Kemudahan Dalam Mengakses Fasilitas Olahraga.....	137
Gambar 5.28	Kemudahan Dalam Mengakses Fasilitas Kesenian	139
Gambar 5.29	Kemudahan Dalam Melakukan Mobilisasi dengan Adanya Perbaikan Sarana Perhubungan	140
Gambar 5.30	Peningkatan Rasa Nyaman terhadap Kondisi Lingkungan Sekitar.....	143
Gambar 5.31	Pengaruh PPMK terhadap Kelompok di Luar Kelompok Sasaran.....	145
Gambar 5.32	Adanya Penyediaan Dana Bergulir untuk Modal Usaha dan Modal Kerja	146
Gambar 5.33	Adanya Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan.....	150
Gambar 5.34	Adanya Pelaksanaan Forum Musyawarah.....	152
Gambar 5.35	Adanya Pelatihan Keterampilan kepada Para Pengangguran atau Pencari Kerja	153
Gambar 5.36	Hasil Pelatihan Kerajinan Pembuatan Bunga Berbahandasar Plastik yang Diadakan oleh Kegiatan Bina Sosial PPMK Kelurahan Bukit Duri	155
Gambar 5.37	Adanya Pembinaan dan Penyuluhan Narkoba.....	156
Gambar 5.38	Adanya Pemberian Bantuan kepada Masyarakat yang Terkena Musibah atau Bencana.....	157
Gambar 5.39	Adanya Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	160
Gambar 5.40	Adanya Perbaikan Sarana Perhubungan.....	162
Gambar 5.41	Adanya Perbaikan Fasilitas Sanitasi	164
Gambar 5.42	Sarana Pompa Air yang Diadakan oleh Dana Bina Fisik Lingkungan PPMK.....	165
Gambar 5.43	Adanya Perbaikan Sarana Kebersihan	167
Gambar 5.44	Adanya Perbaikan Sarana Pendukung Posyandu.....	168
Gambar 5.45	Adanya Perbaikan Fasilitas Olahraga	170
Gambar 5.46	Adanya Perbaikan Sarana Kesenian.....	171
Gambar 5.47	Dimensi Keadaan PPMK di Masa Kini.....	173
Gambar 5.48	Terbentuknya Kemandirian Masyarakat Dalam Kegiatan Ekonominya	175
Gambar 5.49	Terbentuknya Kemandirian Masyarakat Untuk Memperbaiki Lingkungannya	176
Gambar 5.50	Terbentuknya Kepedulian dengan Sesama Warga di Kalangan Masyarakat.....	178
Gambar 5.51	Terbentuknya Kesetiakawanan Sosial di Kalangan Masyarakat.....	179
Gambar 5.52	Terbentuknya Perilaku Gotong Royong di Kalangan Masyarakat.....	181
Gambar 5.53	Terbentuknya Pemahaman pada Masyarakat Mengenai Pentingnya Akses terhadap Kredit Mikro dalam Upaya Memperbaiki Nasib.....	184
Gambar 5.54	Terbentuknya Pemahaman pada Masyarakat Mengenai Pentingnya Keterlibatan (Partisipasi) dalam Proses Perencanaan Pembangunan	186

Gambar 5.55	Terbentuknya Pemahaman pada Masyarakat Mengenai Pentingnya Keterlibatan Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	188
Gambar 5.56	Pengaruh Tidak Langsung PPMK terhadap Kelompok Sasaran.....	190

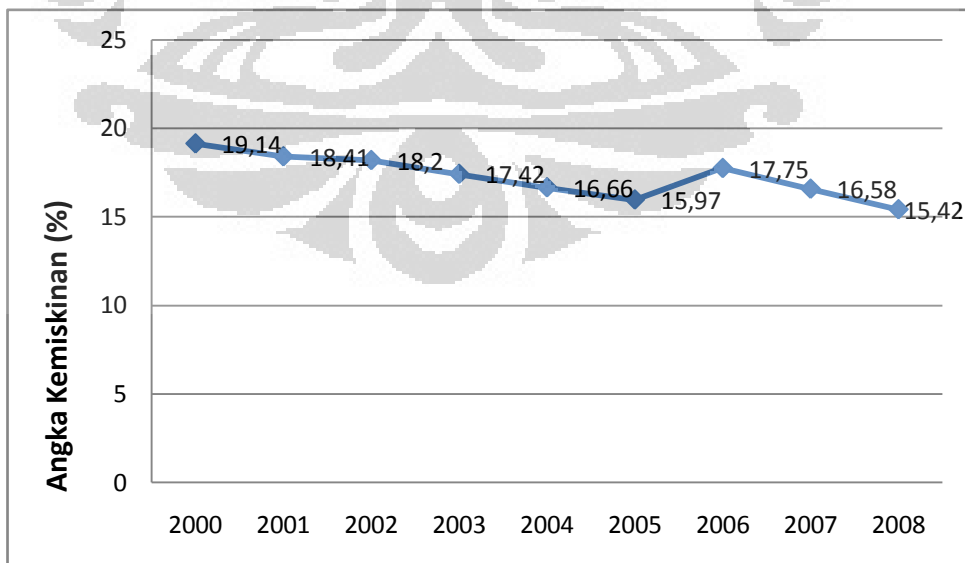


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Adanya keadaan ketidakmampuan tersebut pada akhirnya kerap kali menimbulkan masalah, seperti penyakit dan kebodohan, yang kemudian mengantarkan pada kondisi-kondisi yang lebih buruk lainnya, yaitu pengangguran maupun kriminalitas. Oleh karenanya, kemiskinan dianggap sebagai salah satu penyebab utama dari penderitaan-penderitaan yang dialami oleh suatu bangsa sehingga tidak mengherankan jika kemiskinan selalu menjadi sorotan di setiap negara.

Indonesia tidak pernah luput dari masalah kemiskinan. Sejak zaman Indonesia masih menjadi daerah jajahan hingga pada akhirnya Indonesia berdiri sebagai suatu negara yang merdeka, Indonesia masih saja mengalami masalah kemiskinan. Jumlah penduduk Indonesia, sejak tahun 2000 hingga tahun 2008, sekitar 15-20 persennya masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional, yaitu hidup dibawah penghasilan \$1,5 berdasarkan kurs *Purchasing Power Parity* (PPP) per hari.



Gambar 1.1 Persentase Kemiskinan Indonesia Tahun 2000 – 2008

Sumber : <http://www.setneg.go.id>

Jika dilihat pada Grafik 1.1, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2006 terus mengalami perbaikan. Jika pada tahun 2006, sebanyak 17,75 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan, pada tahun 2007, penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan berkurang menjadi 16,58 persen. Pada tahun 2008, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan juga kembali menurun menjadi 15,42 persen. Akan tetapi, walaupun angka kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2006 terus membaik, masalah kemiskinan masih mengancam sebagian besar masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh World Bank pada tahun 2006, sebanyak 42 persen penduduk Indonesia hanya berpenghasilan antara AS\$1 sampai AS\$2 perharinya (World Bank, 2006, ix), atau sebanyak 24,25 persen penduduk Indonesia masih hidup di sekitar garis kemiskinan. Masih rendahnya tingkat pendapatan mayoritas penduduk Indonesia menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia masih sangat rentan untuk jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Hal tersebut diperparah dengan harga komoditas beras, yang merupakan makanan pokok mayoritas penduduk Indonesia, yang rentan mengalami kenaikan akibat kondisi cuaca yang tidak menentu serta kondisi bencana yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, kondisi harga minyak dunia yang terus mengalami ketidakstabilan pada akhirnya juga akan memberikan dampak kenaikan harga pada barang-barang kebutuhan pokok lainnya.

Pada bulan Maret 2011, jumlah penduduk miskin di Indonesia telah mengalami penurunan. Jika antara tahun 2000 hingga tahun 2008 sekitar 15-20 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional, pada tahun 2011 ini jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 30,02 juta orang atau 12,49 persen dari total penduduk Indonesia. Dari angka kemiskinan tersebut, masalah kemiskinan di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dari jumlah total penduduk miskin di tahun 2011, sebanyak 16,73 juta penduduk miskin (55,7%) berada di Pulau Jawa (<http://finance.detik.com>).

Masalah kemiskinan pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyimpangan akan hak-hak dasar sebagai warga negara Indonesia. Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, mengamanatkan “keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu, pada dasar konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 27 ayat 2 juga mengamanatkan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan dasar negara dan dasar konstitusi negara tersebut, sudah sepatutnya seluruh warga Indonesia, dari Sabang hingga Marauke, mendapatkan hak-hak dasar mereka, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak pernah henti-hentinya dilakukan. Upaya penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia dilakukan sejak tahun 1960-an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat yang tertuang dalam Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun (Panasbede). Upaya penanggulan kemiskinan oleh pemerintah Indonesia pun dilanjutkan pada tahun 1970-an melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Program Repelita di Indonesia dilakukan secara berkala setiap lima tahunnya dan dimulai dari tahun 1969 yang dikenal dengan Repelita 1 dan terus berlangsung hingga Repelita VI (Siagian, 2008:4).

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks pada dasarnya membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun, selama tiga dekade lebih, upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia tampaknya lebih berorientasi pada pemberian material dan sepihak (disediakan oleh pemerintah, masyarakat hanya menjalankan saja), seperti bantuan penyediaan kebutuhan dasar, yaitu pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi, dan sebagainya. Akibatnya, penyediaan penanggulangan kemiskinan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Peran masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga tidak terlihat. Pemberian bantuan tersebut juga tidak diberikan secara menyeluruh ke berbagai daerah, namun hanya dititikberatkan pada daerah Indonesia bagian barat dan hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu saja.

Akibatnya, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tidak membuat keadaan kemiskinan membaik dan justru sebaliknya. Krisis ekonomi yang dialami pada tahun 1997 pada akhirnya mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat, dari 11,34 persen pada tahun 1996, menjadi 23,4 persen pada tahun 1997. Hal tersebut merupakan suatu cerminan kesalahan pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan (Siagian, 2008:4-5).

Belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada, maka diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Indonesia. Oleh karenanya pemerintah melakukan suatu perubahan dalam penanggulangan kemiskinan dengan memberikan program yang lebih menitikberatkan pada upaya memandirikan masyarakat dibandingkan dengan penanggulangan kemiskinan berupa bantuan yang bersifat material. Bentuk penanggulangan kemiskinan tersebut kemudian lebih dikenal dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

PPK merupakan suatu program yang dijalankan pemerintah Indonesia dengan pendekatan pemberdayaan yang dicanangkan sejak tahun 1998. PPK merupakan suatu bentuk penanggulangan kemiskinan yang berskala nasional dan bersifat demokratis, di mana upaya penanggulangan tersebut melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan. Tujuan utama dari PPK adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan desa atau antardesa, serta menyediakan sarana dan prasarana, serta kerta kegiatan sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PPK menyediakan dana bantuan secara langsung bagi masyarakat (BLM) ke setiap kecamatan di mana untuk mengalokasikan sumber dana tersebut, masyarakat kecamatan penerima BLM diharuskan untuk merencanakan dan melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif sehingga pembangunan yang dilakukan di kecamatan tersebut dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Program Pengembangan Kecamatan tersebut telah memberikan hasil yang cukup memuaskan di mana hingga tahun 2006, PPK telah menjangkau lebih dari 50.000 desa di perdesaan dan perkotaan sekaligus memberikan manfaat

kepada lebih dari 11 juta keluarga melalui pencapaian yang signifikan. Evaluasi dampak PPK pada tahun 2008 juga menunjukkan jumlah rumah tangga yang keluar dari garis kemiskinan di tingkat kecamatan 9,2 persen lebih tinggi di daerah PPK dibandingkan dengan daerah yang tidak menjalankan PPK. Program Pengembangan Kecamatan ini pun turut menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1,5 persen lebih banyak dibandingkan daerah yang tidak menjalankan PPK (World Bank, 2010).

PPK merupakan suatu program penganggulangan kemiskinan yang lebih dititikberatkan pada penanggulangan penduduk miskin yang hidup di pedesaan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh fakta di mana mayoritas penduduk miskin di Indonesia berada di kawasan pedesaan. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.1, jumlah penduduk miskin yang hidup di pedesaan pada tahun 2007 ialah 23,61 juta orang, atau sebesar 63,52 persen dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2007. Pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin yang hidup di pedesaan ialah 22,19 juta orang, atau 63,47 persen dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2008. Pada tahun 2009 pun, jumlah penduduk miskin yang hidup di pedesaan ialah 63,38 persen dari jumlah penduduk miskin saat itu, atau sekitar 20,62 juta orang.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia berdasarkan Desa Kota Tahun 2007 – 2009 (dalam juta orang)

	2007			2008			2009		
	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total
Jumlah Penduduk Miskin	13,56	23,61	37,17	12,77	22,19	34,96	11,91	20,62	32,53

Sumber : diolah dari Badan Pusat Statistik

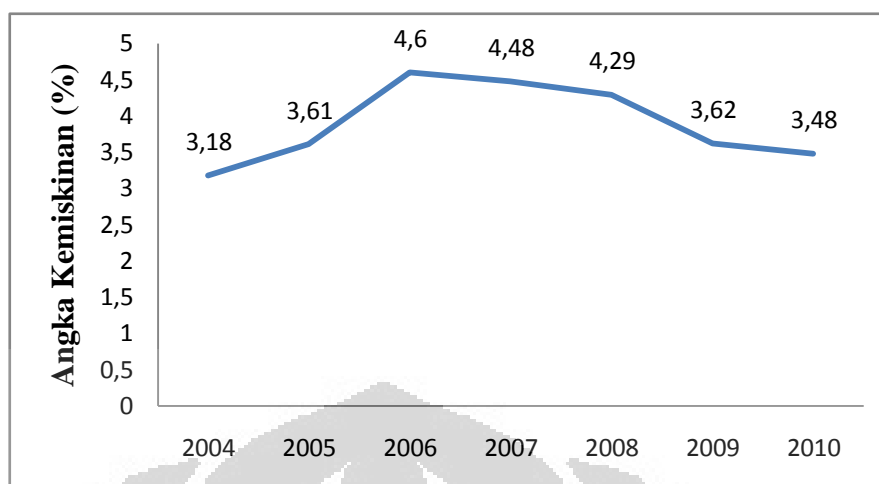
Walaupun jumlah penduduk miskin di Indonesia mayoritas hidup di daerah pedesaan, menurut Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI Hartono Laras, hal tersebut bukan berarti penanganan kemiskinan di daerah perkotaan akan menjadi lebih mudah dibandingkan dengan pedesaan. Hal ini dikarenakan,

menurut Hartono, masalah kemiskinan di perkotaan juga kerap diiringi oleh permasalahan sosial lainnya yang diakibatkan oleh masalah ekonomi dan sosial penduduk miskin perkotaan, seperti adanya kawasan-kawasan kumuh yang tidak layak dihuni di perkotaan serta penyimpangan perilaku yang biasa terjadi pada masyarakat miskin kota. Sedangkan di pedesaan, kasus kemiskinan yang terjadi lebih bersifat homogen sehingga memudahkan penanganannya. (Triyudha, 2011)

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang berlokasi di utara Pulau Jawa. DKI Jakarta merupakan kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, dihuni oleh hampir 9,6 juta orang, atau 4 persen dari total penduduk negara ini, 237.600.000 orang (Iskarianty, 2010). Dengan kepadatan penduduk DKI Jakarta, masalah kemiskinan yang dihadapinya pun menjadi semakin rumit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, per tahun 2011 jumlah penduduk miskin Jakarta mencapai 295.000 orang atau 11,45 persen dari jumlah penduduk Jakarta (Pardosi, 2011).

Masalah kemiskinan dan pengangguran yang dihadapi DKI Jakarta harus segera diatasi. Jika tidak, menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, hal tersebut dapat berimbas pada kerawanan sosial (<http://www.jurnas.com>). Melihat keberhasilan dalam pelaksanaan PPK, pemerintah DKI Jakarta pun turut melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat, yang dikenal dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

PPMK merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlaku khusus di DKI Jakarta dan telah berjalan sejak tahun 2001 sebagai respon terhadap krisis ekonomi di tahun 1998. Tujuan utama dari PPMK ini ialah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat agar warga Jakarta menjadi mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah. Dalam pelaksanaanya, PPMK didasari oleh tiga pilar utama yang disebut Tri Bina yang terdiri dari Bina Ekonomi, Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial.



Gambar1.2 Persentase Penduduk Miskin DKI Jakarta Tahun 2004 – 2010

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pelaksanaan PPMK telah berjalan 10 tahun lamanya. Dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun tidak sedikit. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI Jakarta, pada 2001-2008 Pemprov DKI sudah menggelontorkan dana PPMK sebesar Rp 1,89 triliun (Alexey, 2009). Namun, walaupun PPMK telah berjalan cukup lama dan dana yang dikeluarkan sudah begitu banyak, nampaknya plemik kemiskinan di DKI jakarta tidak terlalu berubah. Jika dilihat pada Gambar 1.2, jumlah penduduk di DKI Jakarta, sejak tahun 2004 hingga tahun 2010, sekitar 3-5 persennya masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Hal tersebut tentunya patut dipertanyakan. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang didesain oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menanggulangi masalah kemiskinan di DKI Jakarta pada kenyataannya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap masalah kemiskinan di DKI Jakarta.

Salah satu kelurahan di DKI Jakarta yang menerapkan PPMK ialah Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ini telah dilaksanakan di Kelurahan Bukit Duri sejak tahun 2002 dan merupakan salah satu kelurahan yang menjadi *Pilot Project* dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan bersama 24 kelurahan lainnya.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerja sama dengan UKM Center Fakultas Ekonomi (FEUI) Universitas Indonesia pada tahun 2006, Kelurahan Bukit Duri merupakan salah satu dari 15 Kelurahan yang mendapatkan predikat A (sangat bagus) dalam pelaksanaan Program PPMK. Namun, jika dibandingkan dengan kelurahan penerima predikat A lainnya, Kelurahan Bukit Duri merupakan kelurahan yang masih mengalami masalah kemiskinan yang cukup parah.

Tabel 1.2 Kelurahan yang Mendapatkan Peringkat A (Sangat Bagus) Dalam Evaluasi PPMK Berdasarkan Pelaksanaan Tribina

Kelurahan	Kecamatan	Kotamadya
Karet Kuningan	Setia Budi	Jakarta Selatan
Sumur Batu	Kemayoran	Jakarta Pusat
Tegal Parang	Mampang Prapatan	Jakarta Selatan
Pesanggrahan	Pesanggrahan	Jakarta Selatan
Gandaria Utara	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
Pondok Labu	Cilandak	Jakarta Selatan
Kuningan Timur	Setia Budi	Jakarta Selatan
Bukit Duri	Tebet	Jakarta Selatan
Ragunan	Pasar Minggu	Jakarta Selatan
Gandaria Selatan	Cilandak	Jakarta Selatan
Johar Baru	Johar Baru	Jakarta Pusat
Kebayoran Lama Selatan	Kebayoran Lama	Jakarta Selatan
Lagoa	Koja	Jakarta Utara
Pejaten Timur	Pasar Minggu	Jakarta Selatan
Pancoran	Pancoran	Jakarta Selatan

Sumber : UKM Center dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Menurut Herviantoro (2009), tidak kurang dari 814 bangunan semipermanen yang berbahan dasar kayu, seng, dan kardus berdiri di Kelurahan Bukit Duri dan berpusat di daerah bantaran sungai Ciliwung. Di antara bangunan semipermanen tersebut, tidak sedikit rumah yang harus dihuni oleh banyak keluarga dalam satu atap. Selain itu, mayoritas bangunan semipermanen masih belum memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK)

sehingga banyak masyarakat yang langsung menggunakan bantaran sungai Ciliwung sebagai sarana pengganti MCK mereka.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung, Kelurahan Bukit Duri juga merupakan kelurahan yang kerap kali mengalami masalah banjir setiap tahunnya. Hal tersebut diperparah dengan masih banyaknya pemukiman-pemukiman yang dibangun di bantaran sungai Ciliwung. Pada tahun 2009, jumlah warga Kelurahan Bukit Duri yang menjadi korban banjir mencapai 171 kepala keluarga (KK) atau 604 jiwa (2009, <http://arsip.gatra.com/>) dan angka tersebut harus meningkat pada tahun 2010 menjadi 195 KK atau 1.003 jiwa (2009, <http://www.beritajakarta.com/>). Masalah banjir ini pun pada akhirnya menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat kelurahan setempat dan memperparah masalah kemiskinan di dalamnya.

1.2 Pokok Permasalahan

DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia dan merupakan cerminan utama dari negara ini. Namun, sebagai ibukota negara, DKI Jakarta masih tidak bisa luput dari masalah kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ialah melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Akan tetapi, sejak digulirkannya PPMK pada tahun 2001, kemiskinan di DKI Jakarta tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan.

Salah satu daerah yang menerapkan PPMK ialah Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kelurahan tersebut telah melaksanakan PPMK sejak tahun 2001 dan mendapatkan peringkat A (sangat bagus) berdasarkan Evaluasi Kinerja PPMK yang dilaksanakan oleh UKM Center FEUI dan Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2006. Akan tetapi, walaupun program tersebut telah berjalan dengan baik selama 10 tahun lamanya, dampak dari pelaksanaan program di kelurahan tersebut terhadap masalah kesejahteraan warganya belum terlihat karena masih banyaknya warga setempat yang hidup di dalam kemiskinan. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengangkat permasalahan mengenai **bagaimana dampak dari**

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Bukit Duri terhadap kesejahteraan warganya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang diberikan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), khususnya dampak dari PPMK terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori mengenai evaluasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengkaji dan menganalisis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

2. Signifikansi Praktis

Bagi pemerintah DKI Jakarta, khususnya bagi aparat kelurahan di kelurahan setempat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ini. Bagi masyarakat DKI Jakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan mengenai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan” ini, penulis menyusunnya ke dalam 6 Bab dengan susunan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi masalah yang dari tema yang penulis angkat, rumusan permasalahan dari penulisan skripsi ini, tujuan penulisan serta signifikansi penulisan dari skripsi ini.

BAB 2 : KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam Bab 2 ini penulis memberikan tinjauan pustaka sebagai acuan dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema pada penulisan skripsi ini. Penulis juga menjabarkan teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini. Teori-teori antara lain kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik, dan pemberdayaan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis memberikan gambaran mengenai mengenai metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan penelitian, jenis penelitian yang digunakan, populasi dan sampel, teknik analisis data, lokasi penelitian, hingga batasan penelitian akan dibahas secara rinci dalam bab ini.

BAB 4 : GAMBARAN UMUM PPMK DAN KELURAHAN BUKIT DURI

Pada bab ini, penulis memaparkan gambaran singkat mengenai Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu,

penulis juga memaparkan gambaran umum dari daerah yang dijadikan obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini.

BAB 5 : ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAT DI KELURAHAN BUKIT DURI, KECAMATAN TEBET, JAKARTA SELATAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan hal-hal yang menjadi permasalahan yang penulis angkat dan analisis terkait permasalahan yang penulis bahas berdasarkan teori yang penulis gunakan.

BAB 6: SIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab 6, penulis memberikan simpulan dari penulisan skripsi ini dan memberikan saran dan usulan untuk perbaikan terkait dengan Program PPMK di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

BAB 2 KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang berjudul, “Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak PPMK yang dilakukan di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Pada dasarnya, tema penelitian ini bukanlah suatu tema penelitian yang baru. Oleh karenanya, sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, dirasa diperlukan tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang akan dilakukan. Penelitian ini mengambil tiga hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema penelitian ini.

Tinjauan pustaka pertama dari penelitian ini adalah tinjauan pustaka terhadap penelitian yang dibuat oleh Purnomo dalam rangka menyelesaikan studi Magisternya (tesis). Penelitian yang dilakukan Purnomo tersebut pun berjudul “**Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan di Propinsi DKI Jakarta**” yang dilakukan pada tahun 2003.

Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa PPMK merupakan suatu bentuk perencanaan pembangunan yang disediakan pemerintah yang bersifat *bottom up*, yaitu di mana masyarakat diberikan kesempatan yang luas dalam upaya peningkatan kesejahteraan di kelurahannya, mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Akan tetapi, PPMK pun tidak terlepas dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya sehingga program tersebut pun menjadi kurang optimal. Oleh karenanya penelitian ini ingin menganalisis permasalahan-permasalahan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan PPMK. Tujuan dari penelitian ini pun ialah untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan komunitas-komunitas masyarakat RW kurang tergerak untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan melalui PPMK.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif komunitas spatial. Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan menggunakan studi kepustakaan serta melakukan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara langsung dengan para pejabat pelaksana PPMK, dan para *stakeholder* termasuk Dekkel, LSM, LSIK, forum warga, dan Komat. Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan analisis SWOT, mengukur tingkat efisiensi partisipasi masyarakat, dan alat ukur untuk mengukur efektivitas dari partisipasi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut antara lain adalah peranan sektor publik dalam fungsi sosial dan ekonomi, konsep dan definisi kebijakan publik, konsep *public goods* dan *public utility*, konsep kemiskinan dan ketidakberdayaan, konsep pembangunan sosial, konsep pemberdayaan masyarakat, konsep metode analisis SWOT, dan konsep efisiensi dan efektivitas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan beberapa simpulan. Simpulan tersebut adalah :

1. Waktu pelaksanaan program PPMK tahun anggaran 2001 hanya 6 bulan. Karena terhitung proyek baru, maka waktu 6 bulan tersebut praktis harus dikurangi oleh kegiatan sosialisasi program sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Sehingga, pada kenyataannya, waktu pelaksanaan program tersebut pada tahun 2001 adalah kurang dari 6 bulan.
2. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan sosialisasi sebesar 2Milyar membuat banyak masyarakat berbondong-bondong untuk mengajukan proposal peminjaman. Akan tetapi, pada kenyataannya, pemberian BLM tersebut melalui beberapa tahapan. Dan hal tersebut pun pada akhirnya menimbulkan gap antara usulan dengan kapasitas BLM
3. Prosedur dan seleksi untuk pengucuran dana BLM sangatlah ketat. Akan tetapi, Dewan Kelurahan (Dekel) tidak dapat memberikan kepastian berapa besar realisasi turunnya dana tersebut sehingga banyak komunitas pemanfaat (Komat) yang tidak puas
4. Perencanaan yang sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan usulan dan bidang yang ditangani kadang kala harus diubah karena kondisi

lapangan yang tidak memungkinkan. Contohnya adalah pada saat terjadinya bencana banjir di penghujung tahun 2001 atau ketika pencairan dana pada saat bulan puasa maupun menjelang lebaran. Dengan adanya kondisi tersebut, tidak jarang Dekel pun mengalami kesulitan dalam merealisasikan penyerapan dana PPMK yang sudah turun

5. Koordinasi kelembagaan pelaksanaan PPMK dengan kelembagaan komunitas RW masih menjadi kendala dalam memberdayakan masyarakat

Tinjauan pustaka yang kedua diambil dari tesis yang dilakukan oleh James Erik Siagian pada tahun 2007 yang berjudul “**Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui penyediaan sarana sosial dasar, ekonomi, dan lapangan kerja terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini pun dilaksanakan di 2 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, yaitu Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu dimana keduanya merupakan lokasi pelaksanaan PPK di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh James Erik Siagian, konsep utama yang digunakannya ialah konsep mengenai kemiskinan. Konsep kemiskinan tersebut, kemudian dibedah lebih lanjut mengenai definisi kemiskinan itu sendiri, pendekatan kemiskinan, yaitu pendekatan subyektif dan obyektif, pengentasan kemiskinan, dimensi kemiskinan di Indonesia dan usulan kerangka kebijakan, sejarah upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, serta sasaran dan fokus penanggulangan kemiskinan. Selain konsep kemiskinan, penelitian ini juga menggunakan konsep utama lainnya, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Dari konsep PPK tersebut, kemudian dibahas lebih lanjut mengenai tahapan PPK, pendanaan PPK, serta indikator kinerja PPK.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini berangkat dari asumsi dan teori yang sudah

ada. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan penyebaran kuisioner, dimana teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan *systematic random sampling*, serta melakukan wawancara dengan kepala desa, Lembaga Musyawarah Desa (LMD), PKK, Kantor Kecamatan, dan Kantor Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Metode analisis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model *maximum likelihood*, yang pada intinya mencari sekumpulan parameter β yang dapat memaksimumkan fungsi *likelihood*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh James Erik Siagiaan, dapat disimpulkan bahwa :

1. penyediaan sarana sosial dasar melalui PPK berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan;
2. Penyediaan sarana ekonomi melalui PPK berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan; dan
3. Penyediaan lapangan kerja melalui PPK berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan.

Tinjauan pustaka yang ketiga diambil dari skripsi yang dilakukan oleh seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yaitu Erwin Rizqi Maulana. Penulisan skripsi tersebut dilakukan pada tahun 2008 dan berjudul “**Dampak Kredit Mikro terhadap Kemiskinan : Studi Kasus LPP UMKM Kabupaten Tangerang**”.

Penelitian yang dilakukan tersebut berangkat dari keberhasilan yang dimiliki oleh LPP UMKM Kabupaten Tangerang. LPP UMKM Kabupaten Tangerang yang diprakarsai oleh pemerintah daerah Kota Tangerang tersebut erus dilakukan secara *kontinue* dan memberikan hasil kinerja yang memuaskan. Akan tetapi, keberhasilan dari LPP UMKM Tangerang, menurut penulis, masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan keberhasilan LPP tersebut dalam hal peningkatan pendapatan anggotanya serta menjauhkan anggota-anggotanya dari kemiskinan. Oleh karenanya penelitian ini mencoba untuk menganalisis kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga sebelum dan setelah menjadi anggota LPP UMKM Kabupaten

Tangerang, menganalisis dampak kredit mikro terhadap kemiskinan dengan melihat hubungan korelasi antara kredit LPP UMKM Kabupaten Tangerang dengan tingkat kemiskinan anggotanya, serta menganalisis dampak kredit mikro terhadap kemiskinan dengan melihat hubungan regresi (sebab akibat) antara kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tangerang dengan tingkat kemiskinan anggotanya.

Pendekatan dalam penelitian ini sama dengan pendekatan penelitian yang dijadikan tinjauan pustaka sebelumnya, yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan survey yang dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada anggota LPP UMKM Kabupaten Tangerang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang sudah ada sebelumnya, yaitu data Uji Kelayakan yang merupakan suatu survey yang dilakukan oleh LPP UMKM Kabupaten Tangerang untuk menyaring calon anggota.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metodologi dalam melakukan analisis data. Metodologi pertama ialah dengan menggunakan statistik deskriptif dengan analisis *mean* (rata-rata) dan standar deviasi. Analisis *mean* dan standar deviasi digunakan untuk melakukan analisa komparatif keadaan anggota LPP UMKM Kabupaten Tangerang sebelum dan sesudah menjadi anggota. Metodologi kedua yang digunakan ialah metode regresi dengan *binary probability models* yang digunakan untuk menganalisis pemberian kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tangerang dengan tingkat kemiskinan anggotanya.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan korelasi antara program kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tangerang dengan tingkat kemiskinan anggotanya. Selain itu, adanya hubungan regresi (sebab akibat) antara program kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tangerang dengan tingkat kemiskinannya yang ditunjukkan dengan analisa model bahwa lamanya keanggotaan dalam LPP UMKM berdampak signifikan negatif terhadap kemiskinan. Tidak hanya itu, LPP UMKM pun berhasil mengajarkan anggotanya untuk menggunakan uang pinjaman untuk usaha mandiri yang produktif.

Berikut tinjauan pustaka yang telah dilakukan dan telah dirangkum pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga	Penelitian yang akan Dilakukan
Nama Peneliti	Purnomo	James Erik Siagian	Erwin Rizqi Maulana	Hariyana
Tahun	2003	2007	2008	2011
Judul	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan di Propinsi DKI Jakarta	Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengembangan Kecamatan terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang	Dampak Kredit Mikro terhadap Kemiskinan : Studi Kasus LPP UMKM Kabupaten Tangerang	Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
Tujuan	Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan komunitas-komunitas masyarakat RW kurang tergerak untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan melalui PPMK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui penyediaan sarana sosial dasar terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang 2. Untuk mengetahui dampak Program Pengembangan Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menganalisis kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga sebelum dan setelah menjadi anggota LPP UMKM Kabupaten Tangerang 2. Untuk menganalisis dampak kredit mikro terhadap kemiskinan dengan melihat hubungan korelasi 	Untuk mengetahui dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga	Penelitian yang akan Dilakukan
		(PPK) melalui penyediaan sarana ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang 3. Untuk mengetahui dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) melalui penyediaan lapangan kerja terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang	antara kredit LPP UMKM Kabupaten Tanggerang dengan tingkat kemiskinan anggotanya 3. Untuk menganalisis dampak kredit mikro terhadap kemiskinan dengan melihat hubungan regresi (sebab akibat) antara kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tanggerang dengan tingkat kemiskinan anggotanya.	
Pendekatan Penelitian	Partisipatif komunitas spatial	Kuantitatif	Kuantitatif	Kuantitatif
Teknik Pengumpulan Data	Observasi, wawancara, studi pustaka	Kuisisioner, wawancara	Survei dengan menggunakan kuisisioner, <i>existing statistic</i>	<i>Field research</i> (penelitian survey dan wawancara) dan studi kepustakaan
Simpulan	1. Realisasi waktu pelaksanaan program PPMK tahun anggaran 2001 kurang dari 6 bulan 2. Bantuan Langsung	1. Penyediaan sarana sosial dasar melalui PPK berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan; 2. Penyediaan	1. Adanya hubungan korelasi antara program kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tanggerang dengan	

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga	Penelitian yang akan Dilakukan
	<p>Masyarakat (BLM) dengan sosialisasi sebesar 2Milyar membuat banyak masyarakat berbondong-bondong untuk mengajukan proposal peminjaman. Akan tetapi, pada kenyataannya, pemberian BLM tersebut melalui beberapa tahapan. Dan hal tersebut pun pada akhirnya menimbulkan gap antara usulan dengan kapasitas BLM</p> <p>3. Prosedur dan seleksi untuk pengucuran dana BLM sangatlah ketat. Akan tetapi, Dewan Kelurahan (Dekel) tidak dapat memberikan kepastian berapa besar realisasi turunnya dana tersebut sehingga banyak</p>	<p>sarana ekonomi melalui PPK berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan; dan</p> <p>3. Penyediaan lapangan kerja melalui PPK berdampak positif terhadap pengentasan kemiskinan.</p>	<p>tingkat kemiskinan anggotanya;</p> <p>2. Adanya hubungan regresi (sebab akibat) antara program kredit mikro LPP UMKM Kabupaten Tanggerang dengan tingkat kemiskinannya; dan</p> <p>3. LPP UMKM berhasil mengajarkan anggotanya untuk menggunakan uang pinjaman untuk usaha mandiri yang produktif.</p>	

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga	Penelitian yang akan Dilakukan
	<p>komunitas pemanfaat (Komat) yang tidak puas</p> <p>4. Perencanaan yang sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan usulan dan bidang yang ditangani kadang kala harus diubah karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan. Contohnya adalah pada saat terjadinya bencana banjir di penghujung tahun 2001 atau ketika pencairan dana pada saat bulan puasa maupun menjelang lebaran. Dengan adanya kondisi tersebut, tidak jarang Dekel pun mengalami kesulitan dalam merealisasikan penyerapan dana PPMK yang sudah turun</p>			

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian Ketiga	Penelitian yang akan Dilakukan
	5. Koordinasi kelembagaan pelaksanaan PPMK dengan kelembagaan komunitas RW masih menjadi kendala dalam memberdayakan masyarakat			

Sumber : diolah oleh peneliti

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Kebijakan Publik

2.2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Istilah ‘kebijakan’, atau ‘*policy*’, merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Jones dalam Winarno (2002:16), istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah tersebut sering kali dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), *standard*, proposal, dan *grand design*. Friedrich pun memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (Winarno, 2002:18). Oleh karenanya, kebijakan dapat

diartikan sebagai suatu hasil dari tindakan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan maupun sasaran tertentu.

Istilah kata “publik” setelah kata kebijakan mengacu pada masyarakat secara luas. Namun, bukan berarti kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh masyarakat secara luas. Kebijakan publik lebih merujuk kepada keputusan yang diambil oleh pemerintah yang berdiri sebagai wakil rakyat, khususnya di negara-negara yang menganut sistem demokratis.

Dalam literatur mengenai kebijakan publik, terdapat beberapa pakar yang telah memberikan definisi mengenai istilah kebijakan publik itu sendiri. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (Winarno, 2002:17). Dalam hal ini, maka Dye menganggap bahwa keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu akan memberikan dampak yang sama besarnya dengan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Anderson dalam Winarno (2002:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Dalam hal ini, maka, kebijakan publik pun diharapkan dapat memberikan dampak terhadap persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi masyarakat.

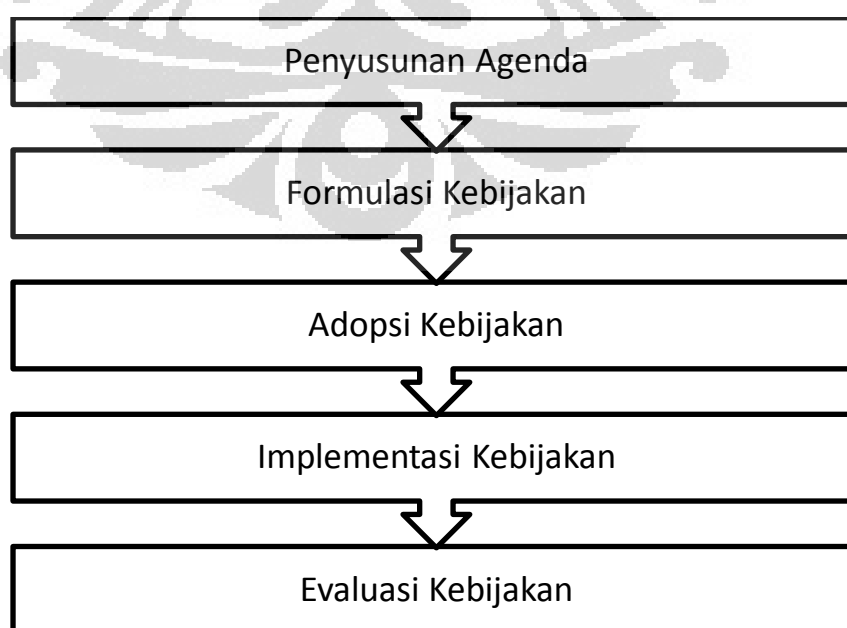
Menurut Hogwood dan Gunn dalam Sumodiningrat (2007), kebijakan publik sedikitnya mencakup beberapa hal, yaitu :

1. bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai;
2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih;
3. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah;
4. Program, yaitu seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan; dan

5. Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan politis untuk mengimplementasikan program dalam meraih tujuan demi kepentingan masyarakat (Putra dalam Fermana, 2009:38). Dalam membuat keputusan pada kebijakan publik, hal tersebut tentu saja harus mengakomodasikan tuntutan masyarakat yang tuntutan tersebut didelegasikan kepada seseorang atau kelompok dalam model demokrasi perwakilan. Akan tetapi, cita-cita sosial dan tuntutan seorang individu dalam masyarakat tidak jarang mengalami perbedaan pemahaman. Hal ini sering kali mengakibatkan tabrakan kepentingan oleh pada delegasi yang dipilih untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh cara pandang individu terhadap preferensi individual, etika, kebebasan individu, hak individual, dan distribusi keadilan (Fermana, 2009:38-40).

Dalam membuat suatu kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan-tahapan atau proses-proses penyusunannya. Winarno membagi proses penyusunan kebijakan publik tersebut ke dalam 5 tahapan. Kelima tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Proses Penyusunan Kebijakan Publik

Sumber : Winarno, 2002

Dalam proses penyusunan agenda, masalah-masalah yang sedang dialami oleh masyarakat pun saling berkompetisi untuk dipilih dan diangkat para pejabat terpilih untuk masuk ke dalam agenda kebijakan. Bagi masalah yang masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas lebih lanjut di dalam tahap formulasi kebijakan. Pembahasan masalah-masalah pada tahap formulasi kebijakan ini pun pada akhirnya menghasilkan beberapa alternatif penyelesaian. Beberapa alternatif penyelesaian tersebut pun kemudian harus bersaing lagi untuk dipilih oleh mayoritas pejabat terpilih hingga pada akhirnya hanya satu alternatif penyelesaian yang terpilih dalam tahap adopsi kebijakan.

Setelah mendapatkan keputusan program kebijakan apa yang akan diambil, maka program kebijakan tersebut pun diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah yang berwenang pada tahap implementasi kebijakan. Pada akhirnya, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai dalam tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap evaluasi kebijakan, suatu kebijakan akan dinilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah yang ada di masyarakat dan apakah kebijakan tersebut mencapai dampak yang diinginkan.

2.2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu bagian dalam proses penyusunan kebijakan publik. Banyak pakar kebijakan publik yang telah memberikan definisi mengenai evaluasi kebijakan. Salah satu pakar kebijakan publik tersebut ialah Dye. Dye mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan pemeriksaan yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Secara sederhana, Dye mengartikan evaluasi kebijakan sebagai suatu

penilaian mengenai konsekuensi dari kebijakan yang telah dibuat (1981:332).

Dunn melihat bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Dalam arti yang spesifik, Dunn pun memberikan definisi evaluasi sebagai suatu produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 1994:608). Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan tersebut, Dunn pun berpendapat bahwa terdapat tipe-tipe kriteria yang berbeda yang dapat digunakan. Kriteria tersebut antara lain adalah (Dunn, 1994:429-438) :

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memecahkan masalah yang diinginkan
4. Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan keadilan atau kewajaran distribusi biaya dan manfaat terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat
5. Responsivitas (*responsiveness*) berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu
6. Ketepatan (*appropriateness*) berhubungan dengan seberapa tepat suatu tujuan dari program atau kebijakan terhadap masyarakat

Samodra Wibawa dalam Dwidjowijoto mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi. Fungsi *pertama* adalah eskplanasi. Evaluasi dapat memotret realitas pelaksanaan program dan dapat membuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan

aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Fungsi *kedua* adalah kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai atau tidak dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Fungsi *ketiga* adalah audit. Melalui evaluasi juga dapat diketahui apakah *output* kebijakan sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru terjadi kebocoran atau penyimpangan. Fungsi *terakhir* adalah akunting. Dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat dilihat akibat sosial-ekonomi dari suatu kebijakan (2006:156-157).

Evaluasi kebijakan publik juga memiliki beberapa tujuan dalam pelaksanaannya. Tujuan dari pelaksanaan kebijakan publik adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Dengan adanya evaluasi, dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan;
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran (*output*) dari suatu kebijakan;
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif;
5. Untuk mengetahui apabila adanya penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mendeteksi serta mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari suatu evaluasi kebijakan adalah untuk

memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik (Nawawi, 2009:168).

Sebagian besar dari masyarakat memahami evaluasi kebijakan publik sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Namun, evaluasi kebijakan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat fungsional, yang berarti evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, namun dapat dilakukan dalam seluruh proses kebijakan, baik dari segi substansi, implementasi, dan dampak. Konsep dalam konsep “evaluasi” itu sendiri terikat dengan konsep “kinerja” sehingga evaluasi kebijakan sering diartikan sebagai “kegiatan pasca” (Nugroho, 2009 : 545). Evaluasi kebijakan pun pada akhirnya dapat dilakukan pasca tiap-tiap proses kebijakan. Oleh karenanya, Bingham dan Felbinger dalam Lester dan Stewart membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan di mana kajian evaluasi dalam proses kebijakan dilaksanakan. Jenis-jenis evaluasi tersebut adalah (Lester dan Stewart, 2000:120-121) :

1. Tipe *pertama* ialah evaluasi proses. Dalam evaluasi proses, kegiatan evaluasi difokuskan pada bagaimana suatu program atau suatu kebijakan disampaikan kepada masyarakat, atau dengan kata lain bagaimana suatu program atau kebijakan diimplementasikan. Dalam tipe evaluasi ini, evaluasi yang dilakukan lebih berfokus pada penilaian dari kegiatan program dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
2. Tipe *kedua* adalah evaluasi dampak. Jenis evaluasi ini memfokuskan pada hasil akhir dari suatu program, seperti evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah tujuan-tujuan dari suatu program telah terpenuhi, atau apakah suatu program memberikan hasil yang diinginkan terhadap populasi target dari suatu program. Selain itu, evaluasi dampak juga digunakan untuk melihat dan mengukur keefektivitasan suatu program.

3. Tipe *ketiga* dari bentuk evaluasi ialah evaluasi kebijakan. Pada evaluasi kebijakan, evaluasi yang dilakukan lebih menitikberatkan pada pengevaluasian dampak dari suatu kebijakan atau suatu program terhadap masalah-masalah yang beredar di masyarakat.
4. Tipe *terakhir* adalah metaevaluasi. Bentuk evaluasi ini merupakan suatu bentuk evaluasi yang bertujuan untuk melakukan penelitian dari suatu kebijakan dengan mencari kesamaan antara hasil, tindakan, dan tren dalam literatur kebijakan

Kebijakan publik diterbitkan untuk mendapatkan dampak-dampak dan pengaruh-pengaruh yang diharapkan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Akan tetapi, kadang kala suatu kebijakan tidak menghasilkan dampak dan pengaruh yang diinginkan. Anderson dalam Winarno mengungkapkan setidaknya ada delapan faktor yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tidak memperoleh dampak yang diinginkan. Kedelapan faktor tersebut adalah (2002:245-247) :

1. Sumber-sumber yang tidak memadai. Kadang kala suatu program dan suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik akibat ketidaktersediaannya sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang program dan kebijakan tersebut. Pada akibatnya, tidak jarang suatu program dan suatu kebijakan, khususnya di negara berkembang, harus diberhentikan akibat ketidaktersediaan sumber daya tersebut.
2. Cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Tidak jarang dapat ditemukan suatu kebijakan yang telah diterbitkan justru diimplementasikan dengan lamban oleh pihak-pihak yang berwenang.
3. Banyaknya masalah-masalah publik yang dihadapi, sementara kebijakan yang ditujukan hanya kepada satu atau beberapa penanggulangan masalah. Kebijakan tersebut pada akhirnya tidak

akan menyelesaikan masalah-masalah publik secara maksimal karena kebijakan tersebut hanya menyelesaikan sebagian dimensi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan kinerja kebijakan pun akan terganggu akibat masalah-masalah publik yang belum teratasi.

4. Cara menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan-kebijakan publik yang justru meniadakan dampak kebijakan yang diinginkan.
5. Tujuan-tujuan kebijakan yang tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain. Suatu kebijakan seringkali memiliki tujuan yang saling bertentangan dan cenderung tidak konsisten dengan kebijakan lainnya. Pada akhirnya, hal tersebut akan mengurangi hasil akhir kebijakan satu sama lainnya.
6. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah tersebut.
7. Banyak masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan dengan kebijakan.
8. Masalah yang akan dipecahkan oleh suatu tindakan kebijakan. Kadang kala suatu masalah justru telah berkembang dan mengalami perubahan sementara tindakan kebijakan baru saja mulai diterapkan. Akhirnya, masalah - masalah yang baru bisa saja timbul dan justru mengalihkan perhatian dan tindakan kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah terdahulu.

Eksistensi kedelapan faktor tersebut memberikan justifikasi dalam kajian kebijakan publik bahwa suatu kebijakan dapat memberikan dampak dan hasil akhir yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karenanya, dalam melihat bagaimana suatu kebijakan sesuai atau tidaknya dengan tujuan awal, maka dikenallah istilah evaluasi dampak, yang menurut Bingham dan Felbinger, merupakan suatu kajian evaluasi terhadap hasil akhir suatu

kebijakan. Namun, dalam melihat hasil akhir suatu kebijakan, perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan antara istilah keluaran kebijakan (*output*) dan dampak kebijakan (*outcome/impact*). *Output* kebijakan adalah sesuatu, yang biasanya berupa benda, yang diberikan oleh pemerintah. Contoh dari *output* kebijakan ialah konstruksi jalan, program pembayaran, kesejahteraan pada masyarakat, atau bantuan operasional sekolah. Namun, menurut Dye, dampak kebijakan tidak dapat disamakan dengan *output* kebijakan. Hal ini perlu dicermati karena yang seringkali terlihat dalam evaluasi kebijakan publik adalah hanya mengukur aktivitas pemerintah semata, atau dengan kata lain mengukur *output* kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran *output* kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah (Dye, 1981:333).

Pada dampak kebijakan publik, terdapat dua istilah terkait dengan hal tersebut, yaitu *outcome* dan *impact*. Keduanya sama-sama memfokuskan atau mencoba untuk menentukan pengaruh dari kebijakan dalam kondisi kehidupan yang sesungguhnya, dimana *outcome* digunakan untuk menentukan pengaruh kebijakan dalam jangka pendek dan *impacts* digunakan untuk menentukan pengaruh kebijakan dalam jangka panjang. Namun, pada akhirnya banyak literatur yang menyamakan penggunaan istilah *outcomes* dan *impacts* (Hovland, 2007).

Menurut Parsons, penilaian pada fase dampak kebijakan pada dasarnya ditujukan untuk memberikan informasi evaluatif yang bersifat sumatif, yakni berusaha mengukur bagaimana suatu kebijakan atau program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya. Rossi dan Freeman berpendapat bahwa penilaian atas dampak adalah suatu penilaian untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak pada masalah yang ditanganinya. Tujuan dasar dari penilaian dampak pun

adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi, yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atas kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi (Parsons, 2001:604).

Anderson mengemukakan bahwa dampak dari suatu kebijakan memiliki beberapa dimensi. Dimensi tersebut antara lain adalah (Anderson, 1984:136-138):

1. Dampak kebijakan terhadap masalah publik yang dialami oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dalam dimensi ini, Anderson berpendapat bahwa :

“Those whom the policy is intended effect of the policy of the policy must be defined..... the intended effect of the policy must then be determined”.

Untuk dimensi ini, Anderson mengemukakan bahwa efek yang diharapkan dari suatu kebijakan harus ditentukan. Selain itu, masyarakat yang menjadi sasaran untuk mendapatkan efek dari kebijakan juga harus didefinisikan. Lebih lanjutnya, Anderson juga berpendapat bahwa :

“...it must be noted that a policy may have either intended or unintended consequences, or even both”.

Suatu kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, atau bahkan keduanya.

2. Suatu kebijakan bisa saja memberikan efek terhadap situasi atau kelompok yang bukan merupakan sasaran dari kebijakan tersebut. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Anderson, yaitu :

“Policies may have effects on the situations or groups other than those at which they are directed”.

3. Anderson berpendapat bahwa :

“Policies may have impacts on the future as well as current conditions”.

Suatu kebijakan kadang kala didesain untuk memberikan efek dalam jangka pendek, namun kadang kala suatu kebijakan juga didesain untuk memberikan efek dalam jangka panjang. Oleh karenanya, suatu kebijakan mungkin memiliki dampak pada saat ini maupun dampak di masa depan.

4. Biaya langsung dari suatu kebijakan merupakan elemen lain dari dimensi dampak. Anderson mengemukakan bahwa :

“It is usually fairly easy to calculate the direct dollar cost of a particular policy or program when it is stated as the actual number of dollars spent on a program, its share of total government expenditures, or the percentage of the gross national product devoted to it. other direct costs of policies may be more difficult to discover or calculate”.

Biaya langsung dari suatu kebijakan atau suatu program akan mudah dihitung ketika jumlah pengeluaran dari suatu kebijakan atau suatu program dinyatakan secara aktual. Akan tetapi, kadang kala biaya langsung dari suatu kebijakan atau suatu program tertentu lebih sulit untuk ditemukan atau dihitung.

5. Suatu kebijakan pada dasarnya memiliki biaya tidak langsung atau efek tidak langsung yang dialami oleh masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Oleh karenanya, biaya tidak langsung dan efek tidak langsung tersebut menjadi dimensi kelima dari dampak kebijakan. Namun, lebih lanjutnya lagi Anderson berpendapat bahwa :

“Such costs often have not been considered in making policy evaluations, at least partly because they defy quantification”.

Biaya tidak langsung tersebut biasanya tidak dipertimbangkan dalam mengevaluasi suatu kebijakan, kecuali jika adanya penentangan terhadap kuantifikasi tersebut.

6. Dimensi terakhir dari dampak kebijakan, menurut Anderson adalah :

“...measure the indirect benefits of public policies for the community”,

yaitu manfaat tidak langsung dari kebijakan publik bagi masyarakat.

Selain Anderson, tokoh lain yang mengemukakan dimensi dampak dari suatu kebijakan ialah Agustino. Agustino mengemukakan bahwa adanya 4 dimensi dari dampak kebijakan yang harus diperhitungkan. Dimensi dari dampak kebijakan tersebut antara lain (Agustino, 2008:191-193):

1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat. Oleh karenanya, dalam dimensi ini, individu-individu atau kelompok-kelompok yang diharapkan untuk dipengaruhi oleh kebijakan harus dibatasi terlebih dahulu. Selain itu, dampak yang diharapkan dari adanya kebijakan juga harus ditentukan. Akan tetapi, suatu kebijakan kadang kala memiliki akibat yang diharapkan maupun akibat yang tidak diharapkan. Suatu kebijakan kadangkala dapat berakibat sesuai dengan apa yang diinginkan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan suatu kebijakan justru mengakibatkan keadaan-keadaan yang tidak diinginkan dan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pengaruh kebijakan terhadap situasi dan kelompok lain di luar sasaran dan tujuan kebijakan. Dampak kebijakan yang keluar dari sasaran dan tujuan kebijakan ini lebih dikenal dengan istilah eksternalitas, atau dampak yang melimpah.
3. Pengaruh kebijakan di masa kini dan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, dimensi kebijakan ini diharapkan dapat menentukan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan berdasarkan dimensi waktu, yakni di masa sekarang atau di masa yang akan datang.
4. Pengaruh kebijakan secara tidak langsung bagi masyarakat. Dampak dan pengaruh yang tidak langsung tersebut pun dapat berupa keuntungan maupun kerugian bagi masyarakat yang kadang kala tidak disadari oleh masyarakat.

Untuk melakukan metode penilaian terhadap dampak suatu kebijakan, menurut Parsons, hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (2001:604) :

1. Membandingkan problem/situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi
2. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau suatu kelompok dengan membandingkannya dengan apa yang terjadi di area atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi
3. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi
4. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu
5. Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program
6. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan

7. Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi.

Penilaian akibat kebijakan-kebijakan di negara-negara berkembang terhadap kehidupan ekonomi dan masyarakatnya masih sangat sulit untuk dilaksanakan. Masalah evaluasi di negara-negara berkembang jauh lebih besar dari pada di negara maju, terutama disebabkan oleh langkanya pengetahuan yang dapat diandalkan. Selain itu, informasi yang seringkali tidak memadai juga menghambat penentuan akibat dari tindakan pemerintah terhadap kehidupan nyata. Kurangnya fasilitas-fasilitas di negara berkembang pun turut memperparah sulitnya pelaksanaan evaluasi. Kekurangan fasilitas tersebut pada akhirnya menghambat pengumpulan-pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi akibat dari tindakan-tindakan pemerintah (Rothchild dan Curry dalam Wahab, 1990:153).

Dye juga memaparkan sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam studi evaluasi kebijakan. Permasalahan *pertama* adalah mengenai penentuan apa tujuan yang akan dicapai oleh program. Pemerintah seringkali menghendaki tujuan yang bertentangan untuk memuaskan berbagai kelompok sekaligus. Ketika tidak ada kesepakatan mengenai tujuan program dan kebijakan, maka studi evaluasi kebijakan akan diperhadapkan pada konflik kepentingan yang besar. Permasalahan *kedua* adalah sejumlah program dan kebijakan lebih memiliki nilai simbolis. Program dan kebijakan tersebut tidak secara aktual merubah kondisi kelompok target, melainkan semata-mata menjadikan kelompok tersebut merasa bahwa pemerintah “memperhatikan”. Permasalahan *ketiga* adalah agen pemerintah memiliki kepentingan tetap yang kuat dalam mencoba apakah program membawa dampak positif. Pemerintah seringkali melakukan percobaan untuk mengevaluasi dampak program yang dibuat bagaikan mencoba membatasi atau merusak programnya atau mempertanyakan kompetensi pemerintah. Permasalahan *keempat* adalah agen pemerintah biasanya memiliki investasi besar, seperti organisasi, finansial, fisik, dan

psikologikal pada program dan kebijakan yang sedang dikerjakan. Permasalahan *kelima* adalah sejumlah studi empiris mengenai dampak kebijakan yang dikerjakan oleh agen pemerintah mencakup sejumlah gangguan terhadap kegiatan program yang sedang berjalan. Permasalahan *terakhir* adalah fakta bahwa evaluasi program memerlukan pembiayaan, fasilitas, waktu, dan pegawai yang mana agen pemerintah tidak ingin berkorban dari program yang sudah berjalan. Studi dampak kebijakan, seperti halnya sejumlah penelitian, membutuhkan uang untuk membiayai. Studi itu tidak dapat dilakukan dengan baik, hanya bagaikan kegiatan ekstrakurikuler atau paruh waktu. Penyiapan sumber daya untuk studi tersebut berarti pengorbanan sumber daya program yang tidak ingin dilakukan oleh pemerintah (Dye, 1981:333).

2.2.2 Pemberdayaan

Istilah Pemberdayaan merupakan terjemahan dari salah satu kata dalam bahasa Inggris, yaitu "*Empowerment*" yang secara harfiah diartikan "pemberkuasaan", yang juga sama dengan arti memberikan atau meningkatkan kekuasaan (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantage*). Namun pada perkembangannya dari berbagai referensi yang ada, kata *empowerment* pun pada umumnya diterjemahkan ke dalam istilah "pemberdayaan" (Wardiana, 2011).

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan. Konsep pemberdayaan (*empowerment*), menurut Friedmann muncul karena adanya dua primise mayor, yaitu "kegagalan" dan "harapan". Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan, sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, peran antara generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai (Friedmann, 1992 :

124). Dengan dasar pandangan demikian, maka pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi (Sumodiningrat, 2007:27)).

Senada dengan Friedman, Conyers (1982:211) juga mengemukakan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat menjadi penting dalam suatu pembangunan, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek lainnya akan gagal;
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk protek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut;
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Pemberdayaan sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan, layaknya pendekatan pembangunan lainnya, juga bertujuan untuk mencapai keadaan yang lebih baik, yang salah satunya ialah untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Kartasasmita (1999) berpendapat bahwa memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Indonesia yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Soetrisno (1995:139) berpendapat bahwa konsep pemberdayaan (*empowerment*) merupakan suatu pendekatan pembangunan yang ingin

mengubah kondisi kemiskinan yang ada dengan cara memberi kesempatan pada kelompok orang miskin untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri. Priyono dan Pranaka (1996:97) memberikan pengertian pemberdayaan sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan yang memiliki makna pengembangan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan disegala bidang dan sektor kehidupan.

Chambers menganalisis bahwa penyebab kemiskinan sebagai kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dari ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*), dan keterasingan (*isolation*). Ketidakberdayaan yang terjadi membatasi akses terhadap sumber daya negara, mengurangi keadilan hukum yang mengakibatkan penyelewengan, menyebabkan hilangnya kekuatan tawar-menawar pada masyarakat, yang membuat rakyat semakin rapuh dalam berhadapan dengan kekuasaan lain. Akhirnya dikatakan bahwa situasi ketidakberdayaan itu dapat diatasi dengan “*enabling and empowering the poor*”, yang merupakan upaya penting karena kemiskinan bukan merupakan kondisi alamiah semata-melainkan suatu proses pengingkaran pemberdayaan secara sosial, ekonomi dan politis (1983:13-114).

Berdasarkan keempat definisi yang dikemukakan oleh keempat tokoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk mengeluarkan masyarakat dari masalah kemiskinan. Namun, berbicara mengenai kemiskinan, secara umum kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal beserta hak-hak dasarnya. Akan tetapi, dalam mendefinisikan kebutuhan hidup minimal dan hak-hak dasar tersebut, terdapat beberapa perbedaan pendefinisian. Dalam mendefinisikan kebutuhan hidup minimal, BPS menggunakan pendekatan pengeluaran minimal untuk

mengonsumsi kebutuhan kalori minimal per hari (2100 kkal/kapita/hari) dan mengonsumsi kebutuhan dasar non makanan lainnya, yaitu Rp 300.000 per kapita per bulan. Lain halnya dengan BPS, World Bank menggunakan pendekatan pendapatan penduduk minimal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup seseorang, yaitu \$1 dan \$2 per kapita per hari berdasarkan kurs yang telah disetarakan dengan daya beli penduduk di suatu daerah atau dengan istilah *purchasing power parity* – PPP – (Purna dan Prima, 2009).

Jika BPS dan World Bank mendefinisikan kebutuhan hidup minimal dan hak-hak dasar seseorang ke dalam pengeluaran atau pendapatan minimal, Konferensi ILO pada tahun 1976 menjabarkan hak-hak dasar seseorang antara lain adalah: (1) Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi pribadi (pangan, sandang, papan dan sebagainya); (2) Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan); (3) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka; (4) Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia; dan (5) Penciptaan lapangan kerja, baik sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar. Bappenas mendefinisikan hak-hak dasar tersebut sebagai kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Sedangkan PBB mendefinisikan hak-hak dasar seseorang sebagai makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan informasi (Friedman, 1992:28).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang menginginkan adanya kemandirian dan kekuatan dalam aspek sosial dan ekonomi di dalam masyarakat dalam rangka mengeluarkan

masyarakat dari jurang kemiskinan. Dengan adanya kemandirian dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, masyarakat diharapkan dapat secara mandiri berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal berserta hak-hak dasar mereka.

Dalam upaya pemberdayaan, Kartasmita berpendapat bahwa dalam memberdayakan masyarakat, terdapat tiga hal yang harus dilakukan. Ketiga hal tersebut ialah :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*). Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap manusia memiliki potensi masing-masing yang dapat dikembangkan. Oleh karenanya, pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Tindakan ini merupakan suatu tindakan lanjutan setelah adanya penciptaan iklim dan suasana untuk berkembang. Strategi ini dilakukan dengan adanya penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang dapat dilakukan adalah pembangunan sarana dan prasarana dasar, seperti sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, listrik, dan jalan guna meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
3. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, diharuskan adanya upaya pencegahan yang lemah menjadi bertambah lemah karena kurang berdaya menghadapi yang kuat. Oleh karenanya, dalam konsep pemberdayaan, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya. Dalam

hal ini, adanya pengaturan perundangan yang jelas dan tegas dapat melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan. (1996:159-160)

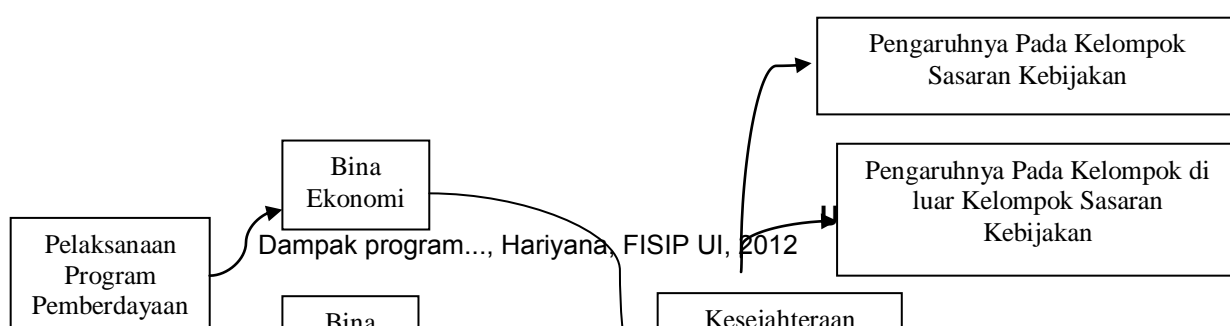
Pada akhirnya, dalam suatu upaya pemberdayaan, partisipasi juga merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam rangka mendorong dan meningkatkan masyarakat untuk memperoleh daya (kekuatan). Tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan masyarakat (*target group*), pemberdayaan akan menjadi sia-sia karena pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan *central theme* atau jiwa dari partisipasi, dan begitu pula sebaliknya.

2.3 Hipotesis Penelitian

Program PPMK di Kelurahan Bukit Duri telah berjalan sejak tahun 2003. Pelaksanaan PPMK di kelurahan tersebut pun telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kelurahan Bukit Duri yang mendapatkan nilai A, atau sangat baik. Akan tetapi, walaupun program tersebut telah berjalan hampir sepuluh tahun lamanya, kelurahan Bukit Duri masih mengalami masalah kemiskinan yang cukup memprihatinkan. Tidak sedikit bangunan semipermanen yang berdiri di bantaran sungai Ciliwung yang ada di kelurahan tersebut. Selain itu, Kelurahan Bukit Duri juga masih menjadi kelurahan yang terkenal sebagai kelurahan yang mengalami musibah banjir setiap tahunnya. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, peneliti membuat hipotesis PPMK tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, atau dengan kata lain **dampak yang diberikan oleh PPMK adalah negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di kelurahan Bukit Duri Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.**

2.4 Model Penelitian

Jika digambarkan dalam suatu model, maka kerangka analisis penelitian ini dapat disusun kedalam skema analisis sebagai berikut :



Bertujuan untuk

Gambar 2.2 Model Analisis

Sumber : diolah oleh peneliti

Berdasarkan model analisis dari penelitian mengenai analisis dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, maka dapat dilihat bahwa PPMK merupakan suatu kebijakan yang dilaksanakan melalui Bina Ekonomi, Bina Sosial, dan Bina Fisik Lingkungan. Dari pelaksanaan ketiga pilar tersebut, diharapkan pelaksanaannya dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, dampak program tersebut terhadap kesejahteraan rakyat akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

2.5 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan paparan kerangka teori yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak yang diberikan oleh Program Pemberdayaan Masyarakat (PPMK) di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang dispesifikkan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut. Oleh karenanya, dalam penelitian ini, dampak dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan akan menjadi subyek dari penelitian ini.

Untuk menganalisis dampak program tersebut, maka pengertian mengenai dampak program harus diketahui terlebih dahulu. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan definisi yang dikeluarkan oleh Agustino untuk menjadi acuan dalam penelitian ini. Agustino mendefinisikan dampak

kebijakan sebagai suatu pengaruh kebijakan dalam kondisi yang sesungguhnya di mana kata “pengaruh” tersebut, merupakan suatu akibat yang bisa bersifat positif maupun negatif.

Dalam meneliti dampak program lebih lanjut, Agustino memaparkan empat dimensi dalam mengkaji dampak dari suatu program. Keempat dimensi tersebut ialah pengaruh terhadap kelompok sasaran kebijakan, pengaruh terhadap kelompok di luar kelompok sasaran kebijakan, pengaruh di masa kini, dan pengaruh tidak langsung terhadap kelompok sasaran kebijakan. Secara skematis peneliti akan memaparkan indikator-indikator dari konsep dampak program ke dalam tabel operasionalisasi konsep sebagai berikut :

Tabel 2.2 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Variabel	Kategori	Skala	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator
Dampak Program	Dampak Program	<ul style="list-style-type: none"> • Negatif • Positif 	Likert (Ordinal)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh program terhadap kelompok sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan pendapatan • Perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan • Perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan • Perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan • Perbaikan mata pencaharian • Perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan untuk berlingdung

Konsep	Variabel	Kategori	Skala	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator
						(rumah) <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih • Perbaikan rasa aman terhadap tindak kejahatan dan kekerasan • Perbaikan kemampuan (hak) untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh program terhadap kelompok di luar kelompok sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Bina Ekonomi terhadap kelompok di luar kelompok sasaran • Pengaruh Bina Sosial terhadap kelompok di luar kelompok sasaran • Pengaruh 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya pembukaan usaha mikro di lingkungan sekitar • Kemudahan untuk memanfaatkan tenaga terampil di lingkungan sekitar • Perbaikan rasa aman terhadap tindak kejahatan di lingkungan sekitar • Perbaikan

Konsep	Variabel	Kategori	Skala	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator
					Bina Fisik Lingkungan terhadap kelompok di luar kelompok sasaran	<p>kemampuan (hak) untuk berpartisipasi di lingkungan sekitar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan komunikasi antarwarga • Kemudahan dalam mengakses fasilitas olahraga • Kemudahan dalam mengakses fasilitas kesenian • Kemudahan dalam melakukan mobilisasi dengan adanya perbaikan sarana perhubungan • Peningkatan rasa nyaman terhadap kondisi lingkungan sekitar
				<ul style="list-style-type: none"> • Keadaan program di masa kini 	<ul style="list-style-type: none"> • Keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Ekonomi • Keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penyediaan dana bergulir untuk modal usaha dan modal kerja • Adanya pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan forum

Konsep	Variabel	Kategori	Skala	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator
					<p>Sosial</p> <p>• Keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Fisik Lingkungan</p>	<p>musyawarah dalam rangka pemberdayaan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelatihan keterampilan kepada para pengangguran /pencari kerja • Adanya pembinaan dan penyuluhan Narkoba pada tingkat kelurahan • Adanya pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah • Adanya perbaikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana • Adanya perbaikan sarana perhubungan • Adanya perbaikan fasilitas sanitasi • Adanya perbaikan sarana kebersihan • Adanya perbaikan sarana pendukung posyandu • Adanya

Konsep	Variabel	Kategori	Skala	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator
						<p>perbaikan fasilitas olah raga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya perbaikan peralatan kebudayaan dan kesenian
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh tidak langsung program terhadap kelompok sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh terhadap perilaku masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya kemandirian masyarakat dalam kegiatan ekonominya • Terbentuknya kemandirian masyarakat untuk memperbaiki lingkungannya • Terbentuknya kepedulian dengan sesama warga di kalangan masyarakat • Terbentuknya kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat • Terbentuknya perilaku gotong royong di kalangan masyarakat
					<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh terhadap pemahaman masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan mengenai pentingnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya akses terhadap kredit mikro dalam upaya memperbaiki nasib mereka

Konsep	Variabel	Kategori	Skala	Dimensi	Indikator	Sub-Indikator
					keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan	sendiri • Terbentuknya pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan/partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan • Terbentuknya pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan/partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Sumber : diolah oleh peneliti

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian lebih berbicara mengenai bagaimana cara peneliti untuk melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas sosial, yang kesemuanya didasari pada asumsi dasar dari ilmu sosial (Prasetyo dan Jannah, 2007). Pendekatan penelitian kuantitatif disusun untuk membangun atau memperoleh ilmu pengetahuan yang berbasis pada objektivitas dan kontrol yang beroperasi dengan aturan-aturan ketat, termasuk mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, aksioma, dan prediksi. Peneliti pun harus mendefinisikan variabel penelitian, mengembangkan instrumen, mengumpulkan data, melakukan analisis atas temuan, melakukan generalisasi dengan cara pengukuran yang sangat hati-hati dan objektif (Umar, 2008). Tujuan dari pendekatan ini pun ialah mencoba untuk menjelaskan suatu gejala, menemukan suatu hukum yang dapat diterima masyarakat secara universal, menunjukkan hubungan antarvariabel, menguji relevansi teori, dan mendapatkan suatu generalisasi yang memiliki kemampuan prediktif (Lienn, 1990:1-4). Penelitian kuantitatif melihat bahwa kebenaran adalah sesuatu yang dinamis sehingga penelitian dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk memproduksi ilmu-ilmu lunak yang esensinya sebagai suatu metode pemahaman atau suatu kenunikan dari dinamika lingkungan (Umar, 2008).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini pun dilakukan dengan berbasiskan pada objektivitas dan beroperasi dengan kebenaran yang ada, di mana kebenaran-kebenaran tersebut berasal dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar yang kemudian penulis rangkum dan paparkan pada bab sebelumnya. Teori-teori tersebut pun akan menjadi dasar dalam meneliti sekaligus sebagai kontrol dalam melakukan penelitian ini.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan tujuan, dimensi waktu, manfaat dan teknik pengumpulan data.

3.2.1 Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan

Jika dilihat berdasarkan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (Prasetyo dan Jannah, 2007). Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu menggambarkan bagaimana dampak yang diberikan oleh PPMK terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

3.2.2 Jenis Penelitian Berdasarkan Dimensi Waktu

Berdasarkan dimensi waktu, maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian *cross sectional*, yaitu penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu dan hanya mengambil satu bagian dari fenomena sosial pada satu waktu tersebut (Prasetyo dan Jannah, 2007). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *cross sectional* karena tidak akan ada penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan dengan penelitian ini.

3.2.3 Jenis Penelitian Berdasarkan Manfaat

Jika dilihat dari manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni karena berorientasi pada ilmu pengetahuan dan akademis (Prasetyo dan Jannah, 2007). Penelitian dilakukan untuk kepuasan akademis dan tidak memiliki implikasi langsung untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, penelitian ini juga tidak terikat dengan tuntutan pihak manapun sebagai pemberi sponsor.

3.2.4 Jenis Penelitian Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian survei. Sesuai dengan penertian dari penelitian survei, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala atas permasalahan yang timbul di masyarakat (Umar, 2004)

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian survei, maka instrumen dalam penelitian ini adalah kuisisioner. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut (Umar, 2004). Dalam melakukan penyebaran kuisisioner tersebut, penelitian ini akan menggunakan teknik *face-to-face interview* agar dapat segera melakukan *probing* ketika responden tidak memahami pertanyaan-pertanyaan dari kuisisioner. Hasil dari kuisisioner yang telah dilakukan tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini.

Selain penyebaran kuisisioner sebagai data primer dari penelitian ini, penelitian ini juga akan menggunakan data yang bersifat sekunder yang berfungsi untuk menunjang dan memperdalam data primer pada penelitian ini.. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini didapatkan melalui dua cara. *Pertama*, ialah dengan menggunakan data yang didapatkan dari instansi yang terkait dengan penelitian ini, seperti Dewan Kelurahan setempat, Kantor Kelurahan setempat, Koperasi Jasa Keuangan setempat, serta data-data yang bersumber dari instansi lain yang terkait dengan penelitian ini. *Kedua*, melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku, penelitian lain, dan juga artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun dan Effendi, 1987:152). Sugiyono

mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005: 90). Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.

Unit analisis merupakan satuan yang akan diteliti, dapat berupa individu, kelompok, organisasi, kata-kata, simbol, masyarakat, dan/atau negara, sedangkan unit observasi adalah satuan darimana data diperoleh, dapat berupa individu, kelompok, pasangan, dokumen dan lain sebagainya. Berdasarkan definisi tersebut, maka unit analisis dan unit observasi yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini adalah:

- Unit Analisis : masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan
- Unit Observasi : masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan yang sudah pernah memanfaatkan program dan yang belum pernah memanfaatkan program

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2005: 91). Dalam suatu penelitian, keterbatasan waktu maupun keterbatasan biaya sering kali membuat peneliti melakukan penarikan sampel, tidak terkecuali penelitian ini. Adapun metode penarikan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode *non-probability* sampling yang mengandalkan penilaian pribadi peneliti daripada kesempatan untuk memilih elemen sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan ialah dengan menggunakan teknik *snowball*, dimana sampel dipilih berdasarkan rujukan dari responden lainnya. Masyarakat yang kira-kira memiliki profil yang sesuai dengan subyek penelitian diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian, masyarakat

yang sudah diidentifikasi tersebut diminta untuk memberitahu masyarakat lainnya yang kira-kira cocok dengan subyek penelitian (Black, 2010:226).

Profil masyarakat yang sesuai dengan subyek penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki profil sesuai dengan sasaran PPMK berdasarkan Pergub No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut. Untuk responden yang menjadi sasaran kebijakan, maka responden tersebut harus memenuhi kriteria telah memanfaatkan program PPMK ini dan minimal memenuhi salah satu kriteria di bawah ini :

1. Masyarakat yang berpenghasilan rendah;
2. Masyarakat memiliki usaha mikro;
3. Masyarakat yang kurang terampil;
4. Masyarakat yang terkena musibah bencana;
5. Masyarakat yang menjadi anggota dari suatu lembaga masyarakat yang kurang berdaya.

Untuk responden yang di luar sasaran kebijakan, maka responden tersebut minimal harus memenuhi salah satu kriteria di bawah ini :

1. Masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas;
2. Masyarakat yang tidak memiliki usaha mikro;
3. Masyarakat yang sudah terampil;
4. Masyarakat yang tidak terkena musibah bencana;
5. Masyarakat yang tidak menjadi anggota dari suatu lembaga masyarakat yang kurang berdaya.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses lanjutan setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul. Data-data yang sudah dikumpulkan tersebut masih bersifat mentah sehingga butuh proses lanjutan berupa pengolahan data yang kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya.

Salah satu metode untuk menganalisis data ialah dengan menggunakan teknik analisis univariat. Analisis univariat merupakan analisis yang

dilakukan terhadap suatu variabel yang bertujuan untuk mengetahui gambaran data yang telah dikumpulkan (Umar, 2004:114). Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis univariat dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Services Solution*) sebagai alat analisis. Seluruh indikator penelitian dikalkulasikan ke dalam SPSS untuk menentukan apakah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan berdampak positif atau negatif berdasarkan pembagian *range* nilai hasil penelitian. *Range* nilai tersebut dihitung berdasarkan jumlah pertanyaan dan jawaban responden. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut dikeluarkan dalam bentuk tabel dan grafik untuk digunakan dalam menganalisis, dengan juga memperhatikan fakta-fakta di lapangan.

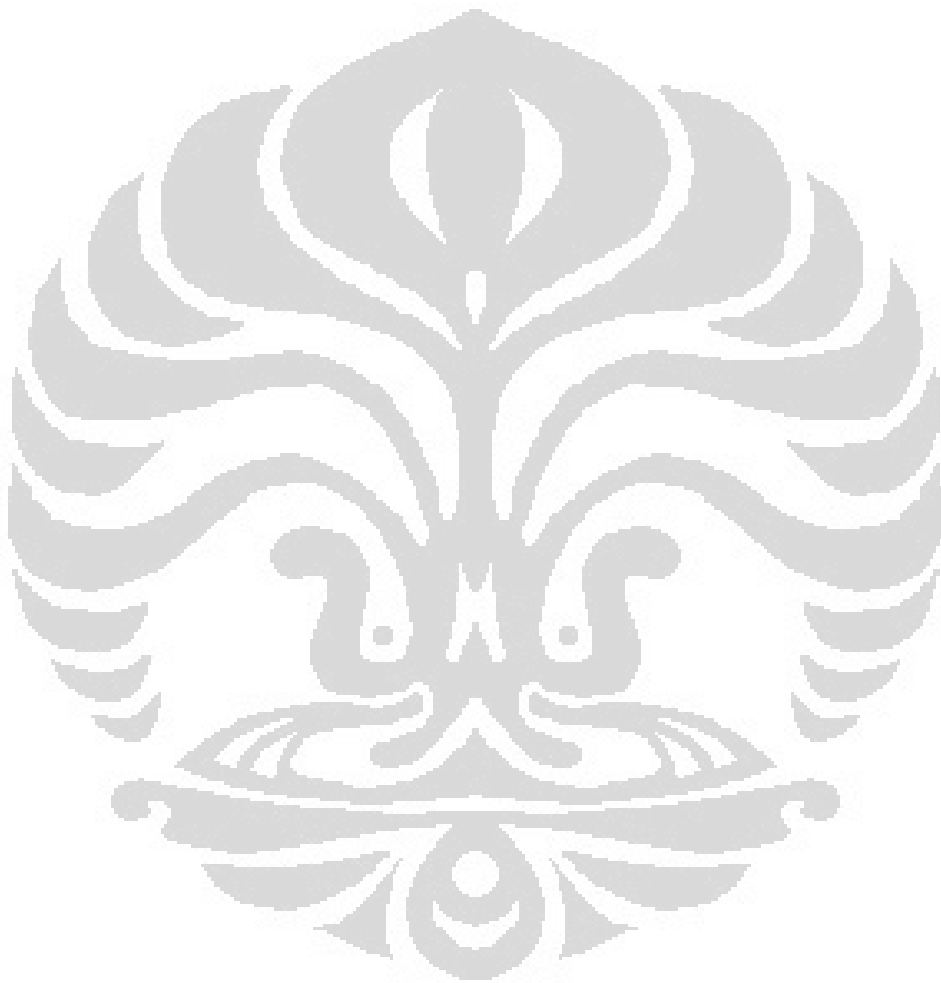
3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Alasan pengambilan kelurahan ini sebagai lokasi penelitian adalah karena kelurahan ini telah melaksanakan PPMK sejak tahun 2001 dan merupakan salah satu dari 24 kelurahan di DKI Jakarta lainnya yang menjadi kelurahan percontohan dalam program ini. Selain itu, berdasarkan evaluasi kinerja PPMK yang diadakan pada tahun 2006, Kelurahan Bukit Duri mendapatkan peringkat A (sangat bagus) bersama 14 kelurahan lainnya. Akan tetapi, dibandingkan dengan kelurahan yang mendapatkan peringkat A lainnya, kelurahan Bukit Duri merupakan kelurahan yang masih mengalami masalah kemiskinan yang cukup parah.

3.6 Batasan Penelitian

Salah satu tujuan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan Tribina yang meliputi Bina Ekonomi, Bina Fisik Lingkungan, dan Bina Sosial. Oleh karenanya, penelitian ini dibatasi dengan

hanya melihat dampak Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Duri terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.



BAB 4

GAMBARAN UMUM PPMK DAN KELURAHAN BUKIT DURI

4.1 Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)

4.1.1 Sejarah Perkembangan PPMK

Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 telah menggoreskan sejarah baru bagi masalah kemiskinan di Indonesia. Jakarta, sebagai kota pusat perekonomian di Indonesia adalah kota yang paling mengalami keterpurukan atas krisis tersebut. Puluhan, bahkan ratusan usaha milik masyarakat, mulai dari yang berskala kecil hingga berskala besar, harus gulung tikar. Pasar modal pada saat itu pun mencatat lebih dari 70 persen perusahaan pada saat itu mengalami kebangkrutan. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja (PHK) marak terjadi pada saat krisis berlangsung dan membuat banyak warga Jakarta harus kehilangan tempat tinggalnya. Walikota Jakarta Selatan pada waktu itu pun terpaksa menyediakan sejumlah tenda sementara di Taman Puring bagi warga yang terkena PHK (Tim Mirah Saketih, 2010).

Dengan semakin parahnya masalah kemiskinan di Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak tinggal diam. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, Perda No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta yang berbasis pada masyarakat, serta Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan, maka program pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan suatu program pemberdayaan masyarakat yang diintensifkan pada tingkatan masyarakat paling bawah, yaitu masyarakat kelurahan, yang dikenal dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

Pada bulan Mei 2001, PPMK mulai dijalankan oleh Pemprov DKI di bawah naungan Badan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI Jakarta. Pada awal pelaksanaannya, PPMK merupakan suatu program yang hanya memberikan dana pinjaman bergulir kepada sektor-sektor ekonomi mikro di tiap-tiap kelurahan. Anggaran yang dikeluarkan oleh Bapeda untuk program PMK tahun 2001 adalah Rp 50 Milyar untuk 5 Kotamadya, dengan masing-masing Kotamadya mendapatkan anggaran dana sebesar Rp 10 Milyar.

Kelurahan yang menjalankan program PMK di tahun 2001 terdiri dari 25 kelurahan di DKI Jakarta yang dijadikan sebagai kelurahan *pilot project* (percontohan). Keduapuluh lima kelurahan *pilot project* tersebut terdiri dari 5 kelurahan di lima kotamadya dan diutamakan pada kelurahan-kelurahan dikategorikan miskin dan kumuh berat. Kelurahan-kelurahan tersebut antara lain adalah Kelurahan Kelapa Dua Wetan dan Makassar di Jakarta Timur, Kedoya Utara dan Cengkareng Barat di Jakarta Barat, Bukit Duri dan Srengseng Sawah di Jakarta Selatan, Penjaringan dan Semper Barat di Jakarta Utara, serta Kebon Kosong dan Serdang di Jakarta Pusat.

Musibah banjir yang melanda DKI Jakarta pada tahun 2002 semakin memperparah kondisi DKI Jakarta yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi pada tahun 1998. Musibah banjir yang menimpa 167 kelurahan saat itu mengakibatkan banyaknya sarana dan prasarana lingkungan yang rusak, banyaknya wabah penyakit yang berkembang dengan cepat (seperti diare dan demam berdarah), serta kegiatan perekonomian yang kembali terganggu, khususnya kegiatan perekonomian masyarakat yang berskala kecil hingga menengah yang harus berhenti karena tempat usahanya habis terbawa banjir.

Melihat kondisi DKI Jakarta yang semakin parah, Pemprov DKI pun berinisiatif untuk mempercepat pelaksanaan PPMK guna memulihkan kondisi masyarakat akibat banjir secara cepat sekaligus

memperluas prospek bagi masyarakat untuk dapat hidup dan berkembang di masa depan. Oleh karenanya, Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Sutiyoso, mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 42 Tahun 2002 tentang PPMK Pasca Banjir yang merupakan program yang ditujukan untuk memfasilitasi dan mendorong perwujudan misi pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan, khususnya warga yang terkena dampak banjir, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan PPMK Pascabanjir dilakukan di seluruh kelurahan di DKI Jakarta dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat melalui dewan kelurahan. Bantuan langsung kepada masyarakat tersebut dititikberatkan untuk kegiatan pemberdayaan bidang ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi korban banjir. Dalam kegiatan PPMK Pascabanjir ini, Pemprov DKI Jakarta pun menganggarkan dana sebesar Rp 66,75 miliar yang disebar ke seluruh 267 kelurahan wilayah DKI.

Melihat antusiasme yang diberikan oleh masyarakat DKI Jakarta terhadap kegiatan PPMK Pascabanjir, pada tahun 2003 Pemprov DKI Jakarta kembali melanjutkan Program PPMK ini. Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Sutiyoso, mengeluarkan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1561/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003-2007 yang kemudian diubah melalui Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1747/2003 yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan PPMK sejak tahun 2003 hingga tahun 2007.

Program PMK di DKI Jakarta pada awalnya hanya direncanakan untuk jangka waktu dari tahun 2001 hingga tahun 2006. Dengan berakhirnya masa pelaksanaan PPMK tersebut, Pemerintah DKI Jakarta, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat DKI Jakarta,

berinisiatif untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPMK dengan bekerja sama dengan UKM Center FEUI. Berdasarkan evaluasi tersebut, Program PMK ternyata banyak memberikan manfaat bagi masyarakat DKI Jakarta. Mayoritas responden evaluasi (92,55 persen) menyatakan pendapatannya meningkat setelah memanfaatkan dana PPMK. Selain itu, semakin besar dana pinjaman yang diberikan, semakin meningkat pula pendapatan mereka. Bahkan ada pemanfaat yang mengajukan pinjaman Rp 5juta dan mengalami peningkatan pendapatan hampir 100 persen (BPM DKI Jakarta dan UKM Center FEUI, 2006). Namun, dibalik keberhasilan-keberhasilan yang dihasilkan, Program PMK yang telah dijalankan juga ternyata masih mengalami beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut terutama paling dirasakan di Bina Ekonomi, di mana masih banyaknya dana Bina Ekonomi yang bermasalah, atau dengan kata lain, tidak kembali. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI Jakarta, dana Bina Ekonomi dari tahun 2002 – 2007 yang bermasalah mencapai Rp 35.578.423.003. Banyaknya dana yang bermasalah tersebut dilatarbelakangi oleh posisi Dekel yang bukan merupakan Badan Hukum yang mengakibatkan lemahnya posisi Dekel dalam menarik kembali dana Bina Ekonomi yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, dengan melihat keberhasilan-keberhasilan yang ada, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk melanjutkan Program PMK melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2007-2012 dan dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun, kelemahan-kelemahan dari Program PMK yang terlihat dari hasil evaluasi yang telah dilakukan juga turut menjadi perhatian Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya, sejak tahun 2008, khusus dana Bina Ekonomi, pengelolaannya dilakukan oleh

Koperasi Jasa Keuangan yang merupakan suatu Badan Hukum guna mengurangi kemungkinan bermasalahnya dana Bina Ekonomi.

Program Pemberdayaan Masyarakat ini merupakan suatu program yang memanfaatkan institusi kemasyarakatan di kelurahan-kelurahan yang berbasis masyarakat RW, di mana keputusan di level RW pada program ini dinilai paling tepat, karena pada dasarnya interaksi antarwarga di tingkat RW yang masih cukup kuat. Dalam mekanismenya, PPMK dititikberatkan pada pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan sistem ini diharapkan peran masyarakat akan lebih besar dalam menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat itu sendiri. PPMK ini sekaligus dimaksudkan untuk menghimpun kebutuhan masyarakat setempat dengan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan semua komponen masyarakat yang ada, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong keterlibatan anggota masyarakat.

4.1.2 Tujuan PPMK

Tujuan dari pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara umum, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan melalui pendekatan Tribina yang meliputi Bina Fisik Lingkungan, Bina Sosial, dan Bina Ekonomi. Sedangkan secara khusus, tujuan dari pelaksanaan PPMK adalah :

1. Bina Fisik Lingkungan :
 - Terwujudnya sarana dan prasarana lingkungan berskala mikro yang memadai

- Terwujudnya kemandirian dan kepedulian masyarakat untuk memperbaiki dan menata lingkungannya
 - Terwujudnya swadaya dan gotong royong masyarakat dalam penataan dan perbaikan lingkungan
2. Bina Sosial :
- Meningkatnya kemampuan daya saing anggota masyarakat
 - Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam menghimpun dan mengembangkan kemampuan masyarakat
 - Meningkatnya kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial, dan kerjasama antarunsur masyarakat
3. Bina Ekonomi :
- Meningkatnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah
 - Tumbuh dan berkembangnya usaha mikro
 - Terbangun dan berkembangnya potensi ekonomi masyarakat

4.1.3 Sasaran PPMK

Secara umum, sasaran PPMK berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah masyarakat RW, masyarakat Kelurahan, dan lingkungannya. Sedangkan secara khusus, sasaran pelaksanaan PPMK adalah :

1. Bina Fisik Lingkungan :
- Prasarana dan sarana mikro yang tidak layak atau rusak
 - Prasarana dan sarana yang belum ada dan sangat dibutuhkan masyarakat
2. Bina Sosial :
- Anggota masyarakat yang kurang terampil
 - Lembaga masyarakat yang kurang berdaya
 - Anggota masyarakat yang terkena musibah bencana

3. Bina Ekonomi :

- Anggota masyarakat yang berpenghasilan rendah
- Usaha mikro

4.1.4 Ruang Lingkup PPMK

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, PPMK merupakan suatu program pemberdayaan yang memanfaatkan institusi kemasyarakatan di kelurahan-kelurahan yang berbasis masyarakat RW. Dalam pelaksanaannya, PPMK dijalankan melalui tiga pilar, atau yang lebih dikenal dengan Tribina, yaitu suatu pendekatan sistem bantuan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam 3 bina, yaitu Bina Ekonomi, Bina Sosial, dan Bina Fisik Lingkungan.

Bina Ekonomi merupakan suatu pendekatan melalui dana pinjaman bergulir tanpa agunan untuk modal usaha dan modal kerja bagi warga masyarakat kelurahan, khususnya untuk usaha kecil dan mikro, yang disalurkan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat. Sumber dana Bina Ekonomi (dana pinjaman bergulir) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan bagian dari dana PPMK. Pada awal pelaksanaannya, di tingkat kelurahan, dana Bina Ekonomi dikelola oleh Dewan Kelurahan setempat. Namun, karena lemahnya posisi Dewan Kelurahan di mata hukum, sejak tahun 2008 pengelolaan dana Bina Ekonomi diserahkan kepada Lembaga Kredit Mikro yang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan.

Dalam pengelolaannya, dana Bina Ekonomi dijalankan berdasarkan 4 asas. Empat asas tersebut adalah :

1. Manfaat bersama

yang berarti pengelolaan dana Bina Ekonomi PPMK harus dapat memberikan manfaat secara berimbang (proporsional) kepada semua masyarakat kelurahan;

2. Kejujuran

yang berarti pengelolaan dana Bina Ekonomi PPMK harus terbuka (transparan);

3. Kemitraan

yang berarti pengelolaan dana Bina Ekonomi PPMK harus dapat menciptakan kerjasama seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mengelola dana Bina Ekonomi PPMK sehingga dapat menciptakan hasil yang optimal;

4. Kesetaraan perempuan

yang berarti perempuan mempunyai hak yang sama dengan pria dalam pengelolaan dana Bina Ekonomi PPMK.

Dana Bina Ekonomi PPMK disalurkan kepada masyarakat secara bergulir sebagai pinjaman modal kerja usaha produktif dengan besaran pinjaman maksimal adalah Rp 5.000.000. Pengguliran dana Bina Ekonomi kepada para pihak pemanfaat tersebut diberikan maksimal tiga kali periode kepada individu maupun kelompok yang sama. Namun, jika pihak pemanfaat masih memiliki tunggakan lebih dari 30% dari pinjaman, maka pihak pemanfaat tersebut tidak diperkenankan untuk meminjam kembali.

Pada dasarnya, pelaksanaan kegiatan Bina Ekonomi sudah dilakukan sejak Tahun 2001. Namun, di Kelurahan Bukit Duri, pelaksanaan kegiatan Bina Ekonomi baru berjalan secara efektif sejak tahun 2002 hingga tahun 2007. Setelah tahun 2007, kegiatan Bina Ekonomi dialihkan ke dalam Koperasi Jasa Keuangan Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Harsono, mantan Dewan Kelurahan Kelurahan Bukit Duri,

“sebenarnya program ini sudah berjalan sejak tahun 2001 tapi baru berjalan efektif di kelurahan ini tahun 2002 sampai 2007 untuk bina ekonominya.....kan sejak tahun 2007 bina ekonomi diurus oleh KJK (Koperasi Jasa Keuangan), jadi bukan Dekel (Dewan Kelurahan) lagi yang ngurus(hasil wawancara dengan Bapak Harsono, 22 November 2011)”

Hingga tahun 2007, dana Bina Ekonomi telah dimanfaatkan oleh 2.257 warga di Kelurahan Bukit Duri yang tersebar di 12 RW. Dana tersebut banyak dimanfaatkan untuk usaha-usaha mikro masyarakat, antara lain untuk usaha warung kelontong, warung makan, usaha perdagangan sembako, usaha sablon, usaha jahit, usaha jasa reparasi elektronik, dan lain sebagainya (Dewan Kelurahan Bukit Duri, 2007). Jumlah dana Bina Ekonomi yang dikucurkan oleh Pemerintah untuk kegiatan Bina Ekonomi di Kelurahan Bukit Duri pun mencapai Rp 1.600.050.000;. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Rincian Kegiatan Bina Ekonomi PPMK Kelurahan Bukit Duri Tahun 2002-2006

Tahun	Jumlah Dana Bantuan Awal (dalam Rupiah)	Pemanfaat		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2002	246.250.000	368	253	621
2003	294.500.000	367	270	637
2004	372.300.000	281	270	551
2005	523.000.000	197	154	351
2006	164.000.000	51	46	97

Sumber : diolah dari Laporan Bulanan PPMK Tahun 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 s/d Bulan Juni 2007

Bina Sosial merupakan suatu pendekatan yang memberikan bantuan yang dialokasikan untuk kegiatan sosial dan penguatan kelembagaan yang diusulkan oleh masyarakat dan sudah dibahas dan disepakati oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan (Musrenbangkel), tetapi tidak atau belum termasuk di dalam program atau rencana kegiatan aparat Kelurahan, Kecamatan, atau dinas teknis/sector. Dari pendekatan Bina Sosial ini, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, dimungkinkan adanya kegiatan seperti penguatan kelembagaan dan forum masyarakat, pembinaan dan penyuluhan narkoba di tingkat RW dan kelurahan, serta

pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan adanya pemberian pelatihan-pelatihan keterampilan bagi warga yang belum memperoleh pekerjaan atau mereka yang menginginkan peningkatan ketrampilan.

Berbeda dengan dana Bina Ekonomi yang berbentuk dana pinjaman bergulir, dana Bina Sosial merupakan dana hibah yang ditujukan untuk mengupayakan dan mensinerjikan potensi yang ada di masyarakat. Dana Bina Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah selayaknya didistribusikan secara adil. Namun, hal tersebut bukan berarti alokasi dana Bina Sosial harus dibagi secara merata, akan tetapi dana Bina Sosial tersebut sudah sepatutnya digunakan menurut kebutuhan dan persoalannya. Oleh karenanya, agar pengalokasian dana Bina Sosial dapat didistribusikan secara tepat sasaran, maka, terdapat beberapa ketentuan dan kriteria untuk bantuan dana Bina Sosial berdasarkan Peraturan Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Provinsi DKI Jakarta. Kriteria tersebut antara lain adalah :

1. kegiatan atau jenis bantuan yang diusulkan termasuk di dalam ruang lingkup yang dijelaskan pada bagian terdahulu;
2. Kegiatan atau jenis bantuan yang diusulkan harus ditetapkan berdasarkan musyawarah warga;
3. Penetapan kelayakan usulan didasarkan pada skala prioritas dan tingkat kebutuhan, serta kelayakan dan kelaziman harga/nilai dalam usulan;
4. Kegiatan atau jenis bantuan yang diusulkan belum dan/atau tidak termasuk di dalam program/kegiatan penguatan Kelurahan, penguatan Kecamatan dan/atau dinas teknis sektoral;
5. Kegiatan atau jenis bantuan yang diusulkan hanya untuk warga yang berdomisili di RW atau Kelurahan yang dibuktikan dengan idenditas dan/atau keterangan RT/RW/Lurah setempat;

6. Kegiatan atau jenis bantuan yang diusulkan tidak berpotensi menimbulkan perpecahan konflik antarwarga.

Kegiatan Bina Sosial di Kelurahan Bukit Duri telah berjalan sejak tahun 2002 hingga sekarang. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam kegiatan Bina Sosial diharapkan adanya forum masyarakat yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama mengenai jenis kegiatan penguatan di masyarakat yang dibutuhkan. Pada pelaksanaan kegiatan Bina Sosial di Kelurahan Bukit Duri, pelaksanaan forum masyarakat tersebut berjalan dengan adanya pelaksanaan forum musyawarah yang dihadiri petinggi-petinggi RT, RW dan Dewan Kelurahan setempat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Harsono, mantan Dewan Kelurahan Bukit Duri,

“biasanya kalo dana PPMK mau turun, kita mengadakan rapat tentang apa saja yang dibutuhkan di lingkungannya. Biasanya, yang datang itu ya ketua-ketua RT, Ketua RW setempat, dan Dewan Kelurahan setempat(hasil wawancara dengan Bapak Harsono, 22 November 2011)”.

Jenis-jenis kegiatan penguatan di kalangan masyarakat yang dihasilkan pada forum musyawarah masyarakat dapat berupa pelatihan-pelatihan keterampilan untuk masyarakat pengangguran, pelatihan bagi lembaga-lembaga masyarakat, pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah, maupun penyuluhan Narkoba. Di Kelurahan Bukit Duri, jenis kegiatan penguatan di kalangan masyarakat yang dilakukan dengan dana Bina Sosial adalah pemberian bantuan dana sebesar Rp 1.000.000; kepada 21 Posyandu di lingkungan Kelurahan Bukit Duri, pemberian bantuan dana sebesar Rp 1.000.000; untuk 10 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di lingkungan Kelurahan Bukit Duri, pemberian dana bantuan pelatihan kepada Ibu-Ibu PKK, pemberian bantuan kepada masyarakat Lansia (Lanjut Usia) di lingkungan kelurahan, serta

pembuatan SIM. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Tin Bambang, salah satu anggota LMK Kelurahan Bukit Duri

“jadi, dari kegiatan dana Bina Sosial itu kita memberikan bantuan kepada Posyandu, PAUD, Lansia, pelatihan keterampilan kepada Ibu-Ibu PKK, dan Pemberian SIM. Kalau untuk Posyandu, PAUD, Lansia, kita memberikan dana bantuan kepada mereka berupa dana. Untuk Posyandu dan PAUD itu biasanya masing-masing dikasih Rp 1.000.000. Untuk Lansia, biasanya kita kasih langsung ke kader-kader Lansia di masing-masing RW. Pelatihan keterampilan kepada Ibu-Ibu PKK juga sama, kita kasih mereka dana sekian supaya mereka bisa mengadakan pelatihan keterampilan. Kalau kemarin itu sudah berjalan pelatihan pembuatan apa tuh, mmmm, jepitan untuk kerudung dan pembuatan pempek. Dari masing-masing RW diminta 5 perwakilan untuk mengikuti pelatihan keterampilan di PKK Kelurahan. Nah, kalau yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat ya paling pembuatan SIM aja, soalnya langsung dikasih ke masyarakat. Kita kasih jatah per RW itu 8 SIM, 5 untuk SIM C dan 3 untuk SIM A (hasil wawancara dengan Ibu Titin Bambang, 5 Maret 2012)”.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pemberian kursus mengemudi di Kelurahan Bukit Duri didelegasikan dari pihak Dewan Kelurahan kepada masing-masing Ketua RW setempat. Kemudian, pihak RW setempat memberikannya kepada masyarakat kurang mampu di wilayahnya dengan sistem undian (kocok). Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Ganjar Sugani, Warga RW 12 Kelurahan Bukit Duri sebagai berikut,

“disini sih memang ada pemberian SIM dari dana Bina Sosial. Tahun lalu kalau ga salah dikasih jatah pembuatan SIM untuk 10 orang per RW. Kalo tahun ini itu 8 orang. Tapi, karena jatahnya terbatas, kita kocok aja. Soalnya kan setiap RW itu minimal terdiri dari 10 RT, kalo kita jatah satu RT satu ga kebagian semua, ga adil dong? (hasil wawancara dengan Bapak Ganjar Sugani, 5 Maret 2012)”.

Untuk lebih lengkapnya mengenai kegiatan Bina Sosial di Kelurahan Bukit Duri, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2

**Tabel 4.2 Rekapitulasi Kegiatan Bina Sosial PPMK
Kelurahan Bukit Duri Tahun 2007-2011**

	Bentuk Kegiatan	Besar Anggaran
2007	Pemberian bantuan untuk korban banjir di RW 10,11,12 sebanyak 2.245 warga	Rp 394.550.000;
2008	<ul style="list-style-type: none"> • Kursus Komputer • Pelatihan Stir Mobil dan Pembuatan SIM A dan C • Pelatihan Marawis • Penambahan Gizi Posyandu Balita • Penguatan SDM Jumlah	Rp 37.110.000; Rp 46.270.000; Rp 9.670.000; Rp 25.200.000; Rp 25.750.000; Rp 144.000.000;
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Tata Boga Ibu-Ibu PKK • Pelatihan Stir Mobil dan Pembuatan SIM A dan C • Pelatihan SDM Jumlah	Rp 15.000.000; Rp 74.120.000; Rp 41.380.000; Rp 130.500.000
2010	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Stir Mobil dan Pembuatan SIM A dan C • Pelatihan Keterampilan Ibu-Ibu PKK • Peningkatan Gizi Balita • Pengadaan Alat Peraga PAUD • Bantuan Posyandu Lansia • Pelatihan Teknisi HP Jumlah	Rp 73.750.000; Rp 24.000.000; Rp 21.000.000; Rp 12.000.000; Rp 7.000.000; Rp 22.000.000; Rp 159.750.000;
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Stir Mobil dan Pembuatan SIM A dan C • Pelatihan Keterampilan Ibu-Ibu PKK 	Rp 82.122.500; Rp 22.000.000; Rp 21.000.000;

	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Gizi Balita • Bantuan PAUD • Bantuan Posyandu Lansia • Pengadaan Lumbung Pangan 	Rp 12.000.000; Rp 6.000.000; Rp 15.000.000; Rp 158.122.500
	Jumlah	

Sumber : diolah dari Laporan Kegiatan Bina Sosial PPMK Kelurahan Bukit Duri Tahun 2007-2011

Bina Fisik Lingkungan adalah suatu pendekatan yang memberikan bantuan yang dialokasikan untuk kegiatan fisik lingkungan yang diusulkan masyarakat dan sudah dibahas dan disepakati oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan (Musrenbangkel), tetapi tidak atau belum termasuk di dalam program atau rencana kegiatan aparat Kelurahan, Kecamatan, atau dinas teknis/sector. Dari pendekatan ini, warga yang membutuhkan perbaikan sarana atau pembuatan infrastruktur mikro akan bertemu dan mendiskusikan kebutuhan bersama mereka yang kemudian mengambil keputusan bersama demi kepentingan bersama juga, seperti perbaikan gang atau penyediaan tempat sampah.

Layaknya dana Bina Sosial, dana Bina Fisik Lingkungan pun merupakan dana berupa hibah yang mengupayakan dan mensinerjikan potensi yang ada di masyarakat. Kriteria kegiatan yang dapat didanai oleh dana Bina Fisik Lingkungan PPMK berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan DKI Jakarta adalah :

1. penyediaan prasarana perlengkapan penanggulangan bencana (perahu karet, alat pemadam kebakaran);
2. Penyediaan prasarana perhubungan (jalan setapak, jembatan kecil);
3. Penyediaan sarana sanitasi (MCK umum, sumber air bersih, saluran pembuangan air limbah dan sejenisnya);

4. Penyediaan fasilitas sarana kebersihan (tempat pembuangan sampah sementara, tong sampah, gerobak sampah, pengelolaan sampah berbasis komunitas);
5. Penyediaan fasilitas umum (balai warga, kantor RW);
6. Penyediaan fasilitas pendukung kegiatan Posyandu;
7. Penyediaan fasilitas olahraga;
8. Penyediaan peralatan dan pelatihan kesenian;
9. Penyediaan fasilitas lingkungan (lubang biopori dan sumur resapan air).

Layaknya Bina Sosial, kegiatan Bina Fisik Lingkungan juga harus didahului oleh forum musyawarah masyarakat yang dihadiri oleh Ketua-Ketua RT, RW dan Dekel setempat. Dari forum musyawarah tersebut diharapkan masyarakat dapat mengemukakan kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing sehingga kebutuhan mereka dapat terakomodasi. Bentuk kegiatan pembangunan di lingkungan yang lazim ditemukan di Kelurahan Bukit Duri antara lain adalah pembersihan saluran air, pembuatan biopori, pemagaran sungai, pemberian pot-pot bunga (penghijauan) di sekitar jalan, maupun pemberian fasilitas tenis meja bagi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Harsono, Mantan Dekel Bukit Duri, sebagai berikut,

“kalau dari bina fisik nya, contohnya ya ini, untuk pengadaan tenis meja, pembersihan saluran air, pembuatan biopori untuk resapan air hujan, perbaikan jalan setapak, pemagaran sungai, pembuatan taman. Tapi yang paling sering sih dari tahun ke tahun ya pembuatan jalan setapak. Banyak jalan-jalan di kelurahan ini yang berlubang, dan kalau nunggu dari pemerintah ya lama lagi, makanya biasanya perbaikan jalan-jalan di sini mayoritas pakai dana PPMK(hasil wawancara dengan Bapak Harsono, 22 November 2011)”

Untuk lebih lengkapnya mengenai kegiatan Bina Fisik Lingkungan di Kelurahan Bukit Duri, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Rekapitulasi Kegiatan Bina Fisik Lingkungan PPMK Kelurahan Bukit Duri Tahun 2007-2011

	Bentuk Kegiatan	Besar Anggaran
2007	Pemberian bantuan untuk korban banjir di RW 10,11,12 sebanyak 2.245 warga	Rp 394.550.000;
2008	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Lubang Biopori • Pembuatan Daerah Resapan Air • Perbaikan Jalan Setapak • Renovasi Pos RW dan Pos Kelurahan • Penghijauan • Perbaikan Ruang Serba Guna • Perbaikan Gerobak Sampah 2 Unit <p>Jumlah</p>	Rp 43.100.000; Rp 4.900.000; Rp 44.400.000; Rp 32.600.000; Rp 10.000.000; Rp 8.000.000; Rp 1.000.000; Rp 144.000.000;
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Pengerukan Saluran Air • Perbaikan Jalan Setapak dan Pagar Pengaman • Pengadaan Alat Komunikasi • Pembuatan Atap Ruang Serba Guna • Pembuatan Bak Sampah • Perbaikan Pos RW dan Pos Keamanan • Renovasi MCK Umum • Pembelian Alat Olahraga <p>Jumlah</p>	Rp 36.000.000; Rp 18.000.000; Rp 9.000.000; Rp 9.000.000; Rp 9.000.000; Rp 9.000.000; Rp 23.000.000; Rp 4.000.000; Rp 22.500.000;

		Rp 130.500.000;
2010	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan dan Pengerukan Saluran Air • Perbaikan Jalan Setapak • Perbaikan Balai Serba Guna • Perbaikan Pos Keamanan • Pengadaan 12 Gerobak Sampah <p>Jumlah</p>	<p>Rp 45.000.000;</p> <p>Rp 65.000.000;</p> <p>Rp 11.000.000;</p> <p>Rp 11.000.000;</p> <p>Rp 27.750.000;</p> <p>Rp 159.750.000;</p>
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Pengerukan Lumpur dan Perbaikan Jalan Setapak • Perbaikan Sekretariat Pos RW • Perbaikan Ruang Serba Guna dan PAUD • Pembelian Inventaris LMK <p>Jumlah</p>	<p>Rp 98.000.000;</p> <p>Rp 36.750.000;</p> <p>Rp 12.250.000;</p> <p>Rp 11.122.500;</p> <p>Rp 158.122.500</p>

Sumber : diolah dari Laporan Kegiatan Bina Fisik Lingkungan PPMK Kelurahan Bukit Duri Tahun 2007-2011

4.1.5 Organisasi Pelaksana PPMK

Untuk mencapai tujuan-tujuan PPMK, baik secara umum maupun secara khusus yang meliputi Bina Ekonomi, Bina Sosial,

dan Bina Fisik Lingkungan secara maksimal, diperlukan keterlibatan berbagai unsur dan komponen dalam masyarakat secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaannya. Keterlibatan berbagai komponen tersebut, terjadi dari mulai tingkat Provinsi sampai tingkat Kelurahan dan RW, dengan aturan dan ketentuan sedemikian rupa, di mana setiap unsur dan komponen dapat menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.

Secara garis besar, komponen-komponen yang terlibat dalam pelaksanaan PPMK terbagi ke dalam 4 bagian. Bagian pertama adalah pengarah. Bagian kedua adalah pembina. Bagian ketiga adalah pelaksana. Sedangkan bagian terakhir adalah bagian pengawas atau Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).

Fungsi utama dari pengarah adalah untuk menetapkan kebijakan, memberikan acuan program dan kelembagaan, serta melakukan pengawasan. Fungsi dari pengarah ini pun diberikan pada tingkat Provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

Di tingkat Provinsi, lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengarah dari PPMK adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekertaris Daerah, Asisten Kesejahteraan Masyarakat, dan Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bapeda). Sedangkan di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengarah adalah Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi, Wakil Walikota/Wakil Bupati Kabupaten, Asisten Kesejahteraan Masyarakat Kota/Asisten Pelayanan Masyarakat Kabupaten Administrasi, dan Badan Pembangunan Kota (Bapeko)/Badan Pembangunan Kabupaten (Bapekab) Administrasi.

Lembaga-lembaga di tingkat Provinsi yang berfungsi sebagai pengarah memiliki tugas-tugas sebagai berikut.

1. Menetapkan kebijakan pokok PPMK, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur;
2. Menetapkan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis PPMK;

3. Menetapkan kelembagaan dan ketentuan pengorganisasian yang dirumuskan di dalam pedoman; dan
4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Sedangkan di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengarah memiliki tugas sebagai berikut.

1. Melakukan koordinasi, mulai dari masa persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan pelaksanaan PPMK di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
2. Menjalankan pelaksanaan PPMK di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
3. Memberikan masukan kepada pengarah di tingkat Provinsi;
4. Memberikan masukan kepada pembina di tingkat Provinsi;
5. Sedangkan Camat, sebagai kepala wilayah kecamatan, dalam hal PPMK berkewajiban membantu pelaksanaan tugas Walikota/Bupati Administrasi sebagai pengarah di wilayah kecamatan masing-masing.

Untuk bagian pembina, lembaga yang berfungsi membina dan sekaligus bertanggung jawab terhadap program PMK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat. Layaknya bagian pengarah, bagian pembina juga terdapat di BPM tingkat Provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

Untuk BPM di tingkat Provinsi, sebagai pembina PPMK, lembaga tersebut memiliki tugas pokok sebagai berikut.

1. Merumuskan dan menyusun kebijakan PPMK;
2. Menyusun pedoman /petunjuk teknis program;
3. Mengintegrasikan perencanaan program;
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan program;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan program;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi;
7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan PPMK;

8. Menyusun laporan pelaksanaan PPMK.

Sedangkan untuk BPM di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, lembaga tersebut, sebagai pembina PPMK, memiliki tugas pokok sebagai berikut.

1. Melaksanakan kebijakan program;
2. Melakukan monitoring pelaksanaan program;
3. Membantu pembina di tingkat Provinsi dalam hal sosialisasi dan pelatihan;
4. Membantu penyelesaian permasalahan pelaksanaan program;
5. Menyusun laporan program di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

Bagian pelaksana dari program PMK terdiri dari beberapa unsur, baik di tingkat Kelurahan maupun di tingkat warga. Unsur pelaksana tersebut adalah Lurah, Dewan Kelurahan (Dekel), Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan, Tim Seleksi Proposal, Unit Pelaksana Keuangan Masyarakat Kelurahan, Tim Pelaksana Kegiatan di Tingkat RW (TPK-RW), dan Unit Pengaduan Masyarakat. Berikut adalah tugas dari masing-masing unsur tersebut.

1. Lurah

Lurah, sebagai penanggung jawab wilayah Kelurahan, turut serta bertanggung jawab atas keberhasilan PPMK di wilayahnya. Lurah memiliki beban tugas sebagai berikut.

- Bersama Dekel melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat;
- Memfasilitasi pemilihan TPPK, Tim Seleksi, UPKMK, TPKRW, dan UPM;
- Bersama dengan Dekel mengusulkan calon anggota UPM;
- Menyetujui hasil pemilihan TPCK, Tim Seleksi, TPK-RW, dan UPM;
- Memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil pemilihan apabila dinilai tidak sesuai dengan ketentuan;

- Mengkoordinasikan pelaksanaan program di Tingkat Kelurahan;
- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan
- Bersama Dekel memfasilitasi musyawarah peretanggungjawaban pelaksanaan program oleh TPKK dan TPK-RW.

2. Dewan Kelurahan (Dekel)

Dewan Kelurahan bertanggungjawab secara operasional serta mengkoordinasikan dan mengawasi PPMK. Secara rinci, tugas pokok dan tanggung jawab Dekel adalah sebagai berikut.

- Bersama Lurah melaksanakan sosialisasi dan program PPMK langsung kepada masyarakat;
- Memilih anggota TPKK, Tim Seleksi, TPK-RW, dan UPM;
- Bersama Lurah membuka rekening dan menandatangani cek anggaran PPMK;
- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan
- Bersama Lurah memfasilitasi musyawarah pertanggungjawaban pelaksanaan PPMK oleh TPKK dan TPK-RW.

3. Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK)

TPKK dipilih dan ditetapkan Dekel dan Lurah berdasarkan usulan masyarakat. TPKK beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota, dan 2 orang anggota yang memidangi tugas Bina Sosial dan Bina Fisik Lingkungan. TPKK memiliki tugas pokok sebagai berikut.

- Menerima proposal TPK-RW dan menyerahkan ke Tim Seleksi untuk dinilai;
- Menerima hasil seleksi dari Tim Seleksi;
- Menerima dan mengembalikan proposal yang memerlukan perbaikan;

- Mengembalikan dan menolak proposal yang tidak memenuhi syarat;
- Menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) berdasarkan penilaian Tim Seleksi;
- Mengajukan DURK PPMK kepada Dekel;
- Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada TPK-RW;
- Meneliti dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan PPMK yang disampaikan TPK-RW;
- Melaksanakan administrasi keuangan PPMK khusus Bina Sosial dan Bina Fisik Lingkungan;
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, termasuk surat pertanggungjawaban kepada Dekel yang selanjutnya diteruskan Dekel kepada pemerintah;
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada rapat pleno masyarakat.

4. Tim Seleksi Proposal

Tim Seleksi dipilih dan ditetapkan Dekel bersama Lurah berdasarkan usulan masyarakat. Tim ini berjumlah sebanyak-banyaknya 7 orang, yaitu Ketua merangkap anggota, Sekertaris merangkap anggota, dan anggota. Tim ini memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut.

- Melakukan penelitian terhadap proposal yang diajukan masyarakat dan diterima TPKK dan UPKMK
- Melakukan tinjauan langsung dan verifikasi lapangan
- Mengelompokkan proposal sesuai hasil penelitian, dengan ketentuan (i) memenuhi syarat dan disetujui, (ii) memenuhi syarat tetapi perlu perbaikan, (iii) tidak memenuhi syarat dan ditolak
- Menyerahkan proposal yang telah dinilai TPKK
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada saat pleno pertanggungjawaban

5. Unit Pelaksana Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK)

Sebelum maupun setelah kebijakan tentang ketentuan Dana Bergulir yang baru ditetapkan, maka tugas UPKMK adalah membantu Dewan Kelurahan dalam mengadministrasikan dana PPMK dengan tugas sebagai berikut.

- Mencatat dan mengadministrasikan dana Bina Ekonomi yang bermasalah yang belum dialihkan ke UPT Dana Bergulir;
- Menyetorkan dana Bina Ekonomi ke Dewan Kelurahan untuk disetorkan ke UPT Dana Bergulir melalui Bank DKI;
- Membantu TPK-RW dalam melakukan penagihan dana Bina Ekonomi (dana bergulir) kepada pemanfaat yang menunggak;
- Mempertanggungjawabkan tagihan dana yang menunggak kepada Dewan Kelurahan dan Tim Satgas di Kelurahan setiap saat;
- Membuat laporan perkembangan dan permasalahan Bina Ekonomi kepada Dewan Kelurahan dan selanjutnya dilaporkan kepada BPM Kota/Kabupaten Administrasi dengan terlebih dahulu disetujui ketua Tim Satgas permasalahan dana bergulir.

6. Tim Pelaksana Kegiatan di Tingkat RW (TPK-RW)

TPK-RW dipilih dan ditetapkan Dekel dengan persetujuan Lurah atas usulan masyarakat. Tim beranggotakan 5 orang ini terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekertaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota, dan 2 orang yang membidangi tugas Bina Sosial dan Bina Fisik Lingkungan.

Tugas pokok TPK-RW adalah :

- Menerima usulan kegiatan masyarakat;
- Menyusun dan mengajukan poposal kegiatan;
- Memperbaiki proposal yang dikembalikan oleh TPKK;

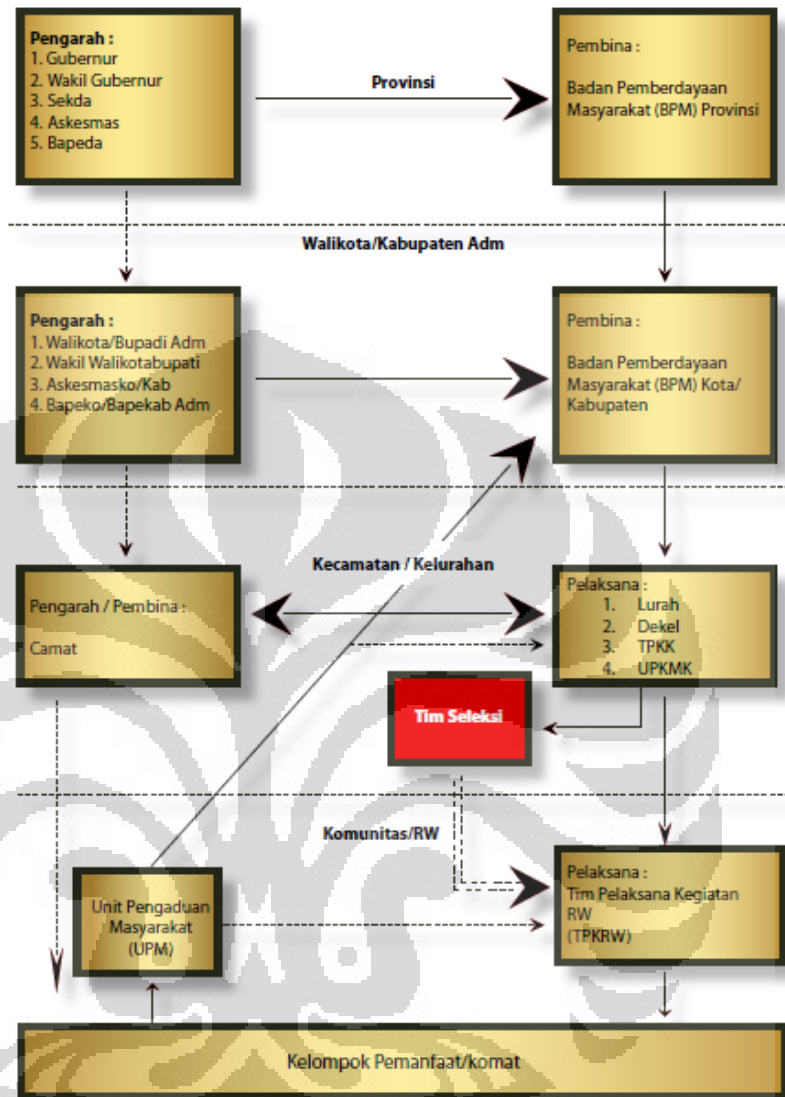
- Mengajukan pencairan anggaran PPMK kepada TPKK;
- Mempersiapkan administrasi keuangan anggaran pelaksanaan PPMK;
- Menyampaikan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada TPKK;
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas.

7. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

UPM dipilih dan ditetapkan Dekel dengan persetujuan Lurah atas usulan masyarakat. Tim ini berjumlah 3 orang, yaitu Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota. Tugas pokok UPM adalah sebagai berikut.

- Menerima laporan/pengaduan dari masyarakat mengenai pelaksanaan PPMK;
- Melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program di masyarakat dan Kelurahan;
- Menindaklanjuti laporan masyarakat dengan melakukan pengecekan dan peninjauan lapangan;
- Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dengan Dekel, Lurah, dan/atau BPM;
- Melaporkan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan ke BPM Kota/Kabupaten Administrasi;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada BPM Provinsi dan tembusan kepada BPM Kota/Kabupaten Administrasi;
- Melaporkan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat BPM ke pihak berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengorganisasian pelaksanaan PPMK seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat di gambarkan ke dalam bagan struktur organisasi. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Program PPMK

Sumber : Peraturan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2008

Pelaksana kegiatan PPMK di kelurahan Bukit Duri, sesuai Peraturan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20 Tahun 2008, dilaksanakan oleh Dewan Kelurahan. Dewan Kelurahan tersebut terdiri dari Ketua Dewan Kelurahan yang dibantu oleh Wakil Ketua Dewan Kelurahan. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kelurahan Bukit Duri membawahi Sekretaris I dan Sekretaris II, Bendahara I dan Bendahara II,

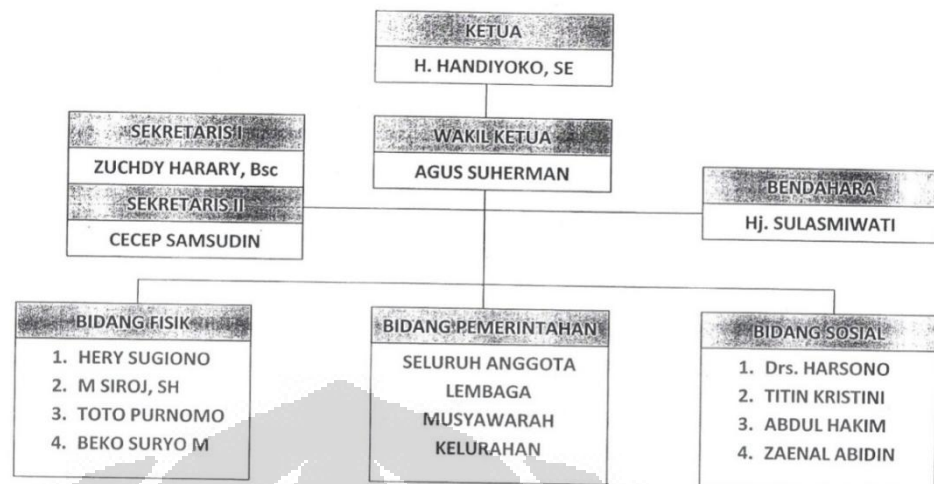
Bidang Ekonomi, Koperasi, dan Usaha, Bidang Fisik dan Pembangunan, Bidang Sosial dan Kemasyarakatan, dan Bidang Umum Pemerintahan.



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dewan Kelurahan Bukit Duri
Periode Tahun 2006-2011**

Sumber : Lampiran Keputusan Ketua Dewan Kelurahan Bukit Duri No. 01 Tahun 2009

Namun, untuk periode 2011-2014, kegiatan pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bukit Duri tidak lagi dilaksanakan oleh Dewan Kelurahan melainkan oleh Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan yang menginginkan adanya perubahan dari Dekel menjadi LMK. Berikut adalah struktur organisasi LMK Kelurahan Bukit Duri.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi LMK Bukit Duri Periode Tahun 2011-2014

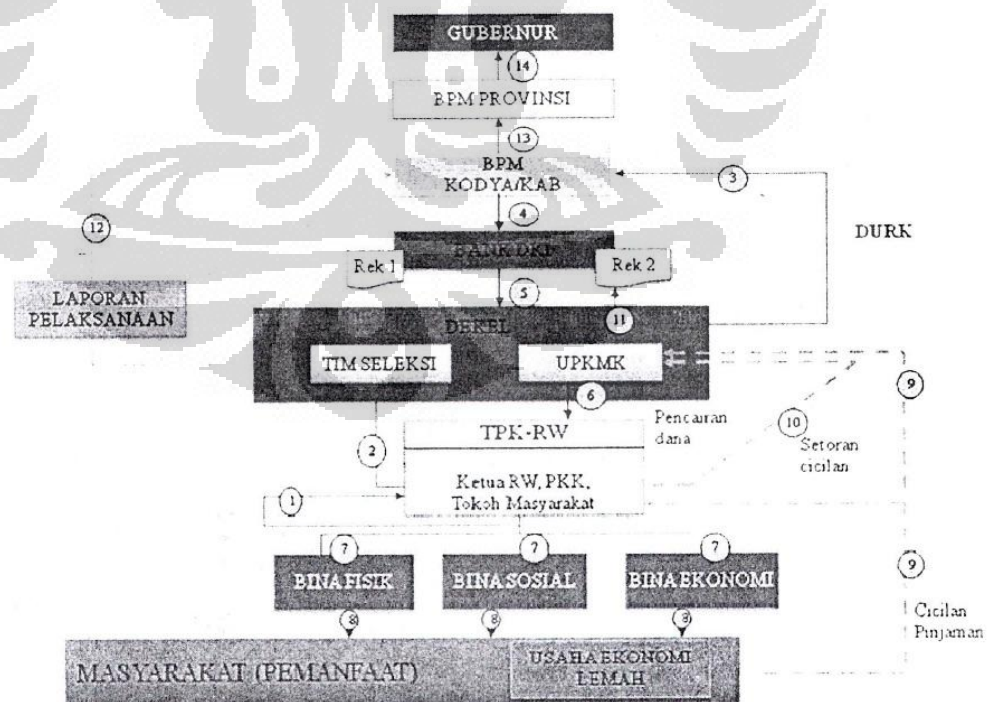
Sumber : Lampiran Keputusan Ketua Lembaga Masyarakat Kelurahan Bukit Duri No. 01 Tahun 2011

4.1.6 Alur Kegiatan PPMK

Penyaluran dana PPMK meliputi 14 jenis kegiatan. Alur keempatbelas jenis kegiatan PPMK tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.4. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing alur kegiatan PPMK.

1. Masyarakat mengusulkan ke TPK-RW kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dalam Bina Fisik Lingkungan, Bina Sosial, dan Bina Ekonomi.
2. Usulan masyarakat diberikan dari TPK-RW ke tim seleksi Dekel untuk menentukan program yang dimasukkan ke dalam daftar rincian kegiatan yang akan disetujui Dekel.
3. Penyerahan usulan Dekel ke BPM Kotamadya atau Kabupaten.
4. BPM memberikan penyaluran dana melalui Bank DKI.
5. Bank DKI memberikan dana PPMK ke Dekel melalui rekening I Bank DKI
6. Dekel memberikan dana ke UPKMK.
7. UPKMK memberikan dana ke TPKRW.

8. TPKRW menyalurkan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk Bina Fisik Lingkungan, Bina Sosial, dan Bina Ekonomi.
9. Dana PPMK akhirnya dapat digunakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan Bina Fisik Lingkungan, Bina Sosial, dan Bina Ekonomi.
10. Masyarakat memberikan setoran cicilan pinjaman Bina Ekonomi kepada Ketua TPK-RW.
11. Setoran cicilan pinjaman masyarakat kemudian diserahkan TPK-RW kepada UPKMK, kemudian dimasukkan ke dalam rekening II Bank DKI.
12. Dekel kemudian memberikan laporan pelaksanaan PPMK tertulis kepada BPM Kotamadya atau Kabupaten.
13. Laporan pelaksanaan PPMK Dekel kemudian diserahkan dari BPM Kotamadya atau Kabupaten kepada BPM Provinsi.
14. Laporan pelaksanaan PPMK dari berbagai BPM diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta.



Gambar 4.4 Skema Pengelolaan PPMK

Sumber : Laporan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) DKI Jakarta Tahun 2001-2005 Oleh UKM Center FEUI

4.2 Gambaran Umum Kelurahan Bukit Duri

4.2.1 Kondisi Geografis

Kelurahan Bukit Duri merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan yang terletak di bagian utara dan timur Kecamatan Tebet. Kelurahan Bukit Duri juga merupakan wilayah pemukiman yang padat dengan luas wilayah 107,01 Ha yang terbagi ke dalam 12 lingkungan RW dan 152 lingkungan RT. Batas-batas wilayah Kelurahan Bukit Duri berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1251 Tahun 1996 dan Nomor 1746 Tahun 1987 adalah sebagai berikut :

Utara	: Kelurahan Manggarai dan Kali Ciliwung
Selatan	: Kelurahan Kebon Baru dan Kelurahan Tebet Timur
Barat	: Kelurahan Manggarai Selatan
Timur	: Kelurahan Kampung Melayu dan Kali Ciliwung

Kelurahan Bukit Duri terletak di wilayah yang strategis dan memiliki akses yang mudah terjangkau. Kelurahan ini terletak dekat dengan beberapa jalan raya utama, yakni Jalan Raya Kasablanka dan Jalan Raya Jatinegara. Selain itu, Kelurahan Bukit Duri juga dekat dengan beberapa prasarana transportasi vital lainnya, yaitu Terminal Kampung Melayu serta Stasiun Kereta Api Tebet. yang semakin memudahkan akses ke wilayah Kelurahan Bukit Duri.

Kelurahan Bukit Duri memiliki luas wilayah 107,10 Ha yang berdasarkan peruntukan tanahnya dibagi ke dalam perumahan, sekolah, fasilitas umum, sarana ibadah, serta berbagai bangunan perekonomian dan pemerintahan. Selain itu, Kelurahan Bukit Duri juga memiliki beberapa bangunan yang dianggap “vital” bagi Kelurahan Bukit Duri dan sekitarnya, yaitu Dipo KRL Jabodetabek, SMA 8 yang merupakan SMA Unggulan di Indonesia, Masjid Al – Makmur, Wisma Ciliwung, dan Perkantoran sepanjang Jl. KH. Abdullah Syafe’i (Kasablanka).

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kelurahan Bukit Duri terbagi ke dalam 2 wilayah, yaitu wilayah yang tergolong ke dalam daratan tinggi yang terletak di sepanjang jalan Bukit Duri Tanjakan dan wilayah yang tergolong ke dalam daratan rendah yang berada di wilayah RW 4, 10, 12, dan daerah sepanjang bantaran Kali Ciliwung. Pada musim penghujan, Kelurahan Bukit Duri yang memiliki curah hujan rata-rata 2.000 mm/tahun ini rawan terendam banjir akibat meluapnya Kali Ciliwung, khususnya ketika Kali Ciliwung di wilayah Kelurahan Bukit Duri harus menampung debit air kiriman dari wilayah Bogor.

4.2.2 Kondisi Demografis

Kecamatan Tebet merupakan salah satu kecamatan yang berada di dalam Kotamadya Jakarta Selatan. Dengan luas wilayah 9.53 KM², Kecamatan Tebet terdiri terdiri dari 7 Kelurahan, 81 RW, dan 950 RT (Redaksi, <http://www.idjakarta.com/>). Kelurahan tersebut antara lain adalah Kelurahan Tebet Timur, Kelurahan Tebet Barat, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Manggarai, Kelurahan Manggarai Selatan, Kelurahan Menteng Dalam, dan Kelurahan Bukit Duri.

Kelurahan Bukit Duri merupakan salah kelurahan di dalam Kecamatan Tebet yang padat penduduk. Hingga tahun 2011, jumlah penduduk Kelurahan Bukit Duri mencapai 36.348 jiwa, dengan rincian sebagai berikut.

Jumlah penduduk laki-laki	: 20.269 jiwa
Jumlah penduduk perempuan	: 16.079 jiwa
Jumlah kepala keluarga	: 8.290 KK
Jumlah kepala keluarga laki-laki	: 7.200 KK
Jumlah kepala keluarga perempuan	: 1090 KK
Jumlah penduduk Wajib KTP	: 24.412 jiwa

Kepadatan penduduk di Kelurahan Bukit Duri tidak bersifat merata di setiap RW-nya. RW yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kelurahan Bukit Duri merupakan RW 11 dengan jumlah penduduk sebanyak 4.115 jiwa. Sedangkan RW yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah RW 3 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.993 jiwa. Mengenai persebaran kepadatan penduduk di Kelurahan Bukit Duri di masing-masing RW, untuk lebih lengkapnya hal tersebut dapat dilihat di Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Persebaran Penduduk Kelurahan Bukit Duri Berdasarkan Wilayah RW

No.	RW	Jumlah RT	Jumlah Penduduk
1	01	12 RT	3.219 jiwa
2	02	10 RT	2.310 jiwa
3	03	9 RT	1.993 jiwa
4	04	9 RT	2.160 jiwa
5	05	17 RT	3.743 jiwa
6	06	16 RT	3.776 jiwa
7	07	12 RT	2.720 jiwa
8	08	13 RT	2.759 jiwa
9	09	12 RT	2.648 jiwa
10	10	15 RT	3.137 jiwa
11	11	12 RT	4.115 jiwa
12	12	15 RT	3.768 jiwa

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, November 2011

4.2.2.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan pemeluk agama, sebanyak 92 persen penduduk di Kelurahan Bukit Duri, yaitu sebanyak 33.439

orang, memeluk agama Islam. Sedangkan 3.1 persen penduduk di Kelurahan tersebut, atau sebanyak 1.120 orang memeluk agama Kristen, 2.8 persen penduduk di Kelurahan tersebut, atau sebanyak 1.031 orang, memeluk agama Katolik. Sisanya, sebanyak 1.7 persen penduduk, atau sebanyak 615 orang memeluk agama Budha dan sebanyak 0.4 penduduk di Kelurahan tersebut, atau sebanyak 143 orang, memeluk agama Hindu. Hal ini dapat dilihat di Gambar 4.5

Tabel 4.5 Komposisi Penduduk Kelurahan Bukit Duri Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1.	Islam	33.439
2.	Kristen	1.123
3.	Katolik	1.031
4.	Hindu	143
5.	Budha	615

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, November 2011

4.2.2.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, Kelurahan Bukit Duri mayoritas terdiri dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki. Sebanyak 55,76 persen, atau sebanyak 20.269 penduduk di Kelurahan Bukit Duri memiliki jenis kelamin laki-laki. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 44,24 persen, atau 16.079 penduduk di Kelurahan Bukit Duri memiliki jenis kelamin perempuan.

Sedangkan berdasarkan pengelompokan umur produktif dan tidak produktifnya, penduduk di Kelurahan

Bukit Duri yang masih berada pada kelompok usia muda, atau masih dalam rentang usia 0 – 14 tahun, adalah sebanyak 10.925 penduduk, atau sebesar 30,06 persen dari jumlah keseluruhan penduduk di sana. Jumlah penduduk di Kelurahan Bukit Duri yang masih berada pada kelompok usia produktif, atau berada dalam rentang usia 15 – 64 tahun adalah sebanyak 24.358 penduduk, atau sebesar 67,01 persen dari jumlah penduduk. Dan jumlah penduduk di Kelurahan Bukit Duri yang berada pada kelompok lanjut usia, atau berusia lebih dari 65 tahun, adalah sebanyak 1.065 orang, atau sebesar 2,93 persen dari jumlah keseluruhan penduduk di Kelurahan Bukit Duri.

4.2.3 Kondisi Ekonomi, Fasilitas Fisik, dan Sosial Budaya

4.2.3.1 Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat di Kelurahan Bukit Duri sangatlah beragam, mulai dari masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian miskin, hingga masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke atas. Mata Pencaharian masyarakat Kelurahan Bukit Duri pun juga beragam. Namun, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pedagang, yaitu sebanyak 13.606 orang, yang tersebar di beberapa pasar, seperti Pasar Mester, Pasar Bukit Duri, serta berbagai pedagang di daerah sekitar lingkungan perumahan Kelurahan Bukit Duri, seperti penjual nasi goreng, nasi uduk, ayam goreng, rumah makan, usaha jahit, salon kecantikan, dan lain sebagainya.. Sedangkan mayoritas kedua mata pencaharian masyarakat Kelurahan Bukit Duri adalah Karyawan Swasta sebanyak 3.949 orang. Sisanya, masyarakat Kelurahan Bukit Duri bermata pencaharian

sebagai Buruh, yaitu sebanyak 2.315 orang, Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1.915 orang, dan TNI/POLRI sebanyak 360 orang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Komposisi Penduduk Kelurahan Bukit Duri Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	1.915
2	TNI/POLRI	360
3	Swasta	3.949
4	Pedagang	13.606
5	Buruh	2.315

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, November 2011

Kelurahan Bukit Duri juga dilengkapi beberapa sarana perekonomian dalam rangka menunjang kegiatan perekonomian masyarakatnya. Mayoritas sarana perekonomian yang ada di Kelurahan Bukit Duri adalah usaha industri kecil dan menengah yang dikelola oleh penduduk Kelurahan Bukit Duri, seperti usaha jahit, usaha pelayanan dokumen (fotocopy), usaha industri air mineral isi ulang rumahan, dan lain sebagainya. Sarana perekonomian lainnya yang banyak ditemukan di kelurahan ini ialah restoran dan rumah makan tegal (Warteg), warung klontong, salon kecantikan, pasar tradisional, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Selain sarana prasarana perekonomian pada Tabel 4.7, Kelurahan Bukit Duri juga memiliki beberapa badan usaha (perusahaan) yang berbadan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum tersebut antara lain adalah PT (Perseroan Terbatas) yang berjumlah 8 PT dan berada di RW 5, 6, dan 9 dan CV (Comanditaire Venootschap) yang berjumlah 1 CV dan berada di RW 9.

Tabel 4.7 Sarana Prasarana Perekonomian di Kelurahan Bukit Duri

No	Nama Sarana Prasarana Perekonomian	Jumlah Sarana Prasarana Perekonomian
1	Industri Kecil dan Menengah	33
2	Restoran dan rumah makan tegal (Warteg)	32
3	Warung klontong/kaki lima	24
4	Wartel/warnet	22
5	Salon kecantikan	21
6	Pasar tradisional	20
7	Mini market dan toko sembako	18
8	Pool angkutan umum/ojek	17
9	Agen sembako/agen roti	14
10	Koperasi dan warung serba ada (waserda)	6
11	Agen minyak	5
12	Biro perjalanan	1

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, November 2011

4.2.3.2 Kondisi Fasilitas Fisik

Kelurahan Bukit Duri merupakan kelurahan yang memiliki kondisi fasilitas yang dapat dikatakan cukup memadai. Fasilitas tersebut dapat dilihat dari bidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

a. Fasilitas Peribadatan

Mayoritas penduduk Kelurahan Bukit Duri memeluk agama Islam, yang kemudian disusul oleh Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Namun, fasilitas peribadatan yang tersedia di Kelurahan Bukit Duri

hanya sebatas pada Mesjid sebanyak 9 buah, Musholah sebanyak 43 buah, dan Gereja sebanyak 2 buah. Selain itu, Kelurahan Bukit Duri juga telah memiliki 64 Majelis Taklim.

b. Fasilitas Pendidikan

Dari segi pendidikan, Kelurahan Bukit Duri telah memiliki fasilitas pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke tingkat perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (negeri), maupun yang diselenggarakan oleh swasta. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.8.

c. Fasilitas Kesehatan

Kelurahan Bukit Duri juga telah dilengkapi oleh sarana prasarana kesehatan yang memadai, dari mulai Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Dokter Praktek, Rumah Bersalin, hingga Klinik Kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.9.

d. Fasilitas Olahraga

Dari segi fasilitas olahraga, Kelurahan Bukit Duri juga telah memiliki fasilitas olahraga yang cukup memadai. Fasilitas olahraga yang ada antara lain adalah lapangan bulu tangkis, peralatan tenis meja dan lapangan bola volly tersebar di berbagai RW. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.8 Fasilitas Pendidikan di Kelurahan Bukit Duri

No	Tingkat	Jumlah Fasilitas Pendidikan berdasarkan Status Penyelenggaraannya	Jumlah Fasilitas Pendidikan

		Negeri	Swasta	
1	TK	-	12	12
2	SD	12	11	23
3	SMP	-	4	4
4	SMA	1	1	2
5	Akademi / Perguruan Tinggi	-	2	2
Jumlah		13	30	43

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, November 2011

Tabel 4.9 Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Bukit Duri

No	Nama Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1
2.	Posyandu	21
3.	Dokter Praktek	9
4.	Apotek	3
5.	Panti Pijit	2
6.	Praktek Bidan	4
7.	Klinik Kesehatan	3
8.	Rumah Bersalin	1
9.	Pos Kesehatan KB	1
10.	Toko Obat	1
Jumlah		46

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, November 2011

Tabel 4.10 Fasilitas Olahraga di Kelurahan Bukit Duri

No	Lokasi	Jumlah Fasilitas Olahraga		
		Bulu Tangkis	Tenis Meja	Bola Volly
1.	RW 01	-	-	-

2.	RW 02	-	-	-
3.	RW 03	-	1	-
4.	RW 04	-	1	-
5.	RW 05	1	-	-
6.	RW 06	1	-	-
7.	RW 07	1	-	-
8.	RW 08	-	-	-
9.	RW 09	1	1	1
10.	RW 10	-	-	-
11.	RW 11	1	-	-
12.	RW 12	1	-	1
Jumlah		6	3	2

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, November 2011

Tabel 4.11 Kelompok Kesenian di Kelurahan Bukit Duri

No.	Kelompok Kesenian	Jumlah	Keterangan
1.	Qasidah	1	RW 7
2.	Marawis	6	RW 1, 2, 4, 5, 6, 8
3.	Vocal Group	1	Karang Taruna
Jumlah		8	

Sumber : Laporan Bulanan Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, November 2011

4.2.3.3 Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Kelurahan Bukit Duri memiliki beberapa kelompok yang bergerak di bidang kesenian. Kelompok kesenian tersebut antara lain adalah Qasidah, Marawis, dan Vocal Group yang tersebar di berbagai RW. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.11 di halaman 95.

BAB 5

ANALISIS DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (PPMK) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN BUKIT DURI, KECAMATAN TEBET, JAKARTA SELATAN

5.1 Karakteristik Reponden

Penelitian yang berjudul “Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan” menggunakan 100 orang yang dijadikan sebagai responden. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu sejumlah 50 orang yang merupakan responden yang pernah mengikuti Program PPMK (responden pemanfaat), dan 50 orang lainnya yang merupakan responden yang belum pernah mengikuti Program PPMK (responden nonpemanfaat).

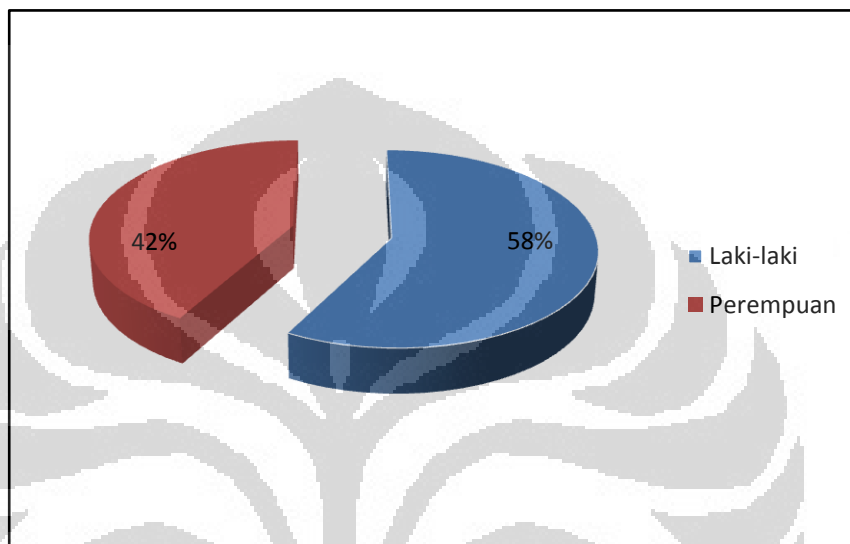
Sub-bab ini akan menjelaskan mengenai karakteristik dari responden dalam penelitian ini, baik responden pemanfaat maupun responden nonpemanfaat. Karakteristik tersebut terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, pekerjaan, serta pendapatan per bulan dari para responden. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

5.1.1 Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden pemanfaat yang ditemui adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sejumlah 58% atau sejumlah 29 responden. Sedangkan sisanya, yaitu sejumlah 42% atau sejumlah 21 responden berjenis kelamin perempuan. Dominasi jenis kelamin laki-laki pada responden pemanfaat yang ditemui memang dikarenakan komposisi penduduk di Kelurahan Bukit Duri yang mayoritasnya adalah laki-laki, yaitu sejumlah 55,76 persen, atau sejumlah 20.269 orang. Pengelompokan responden berdasarkan persentase jenis kelaminnya dapat dilihat pada Gambar 5.1.

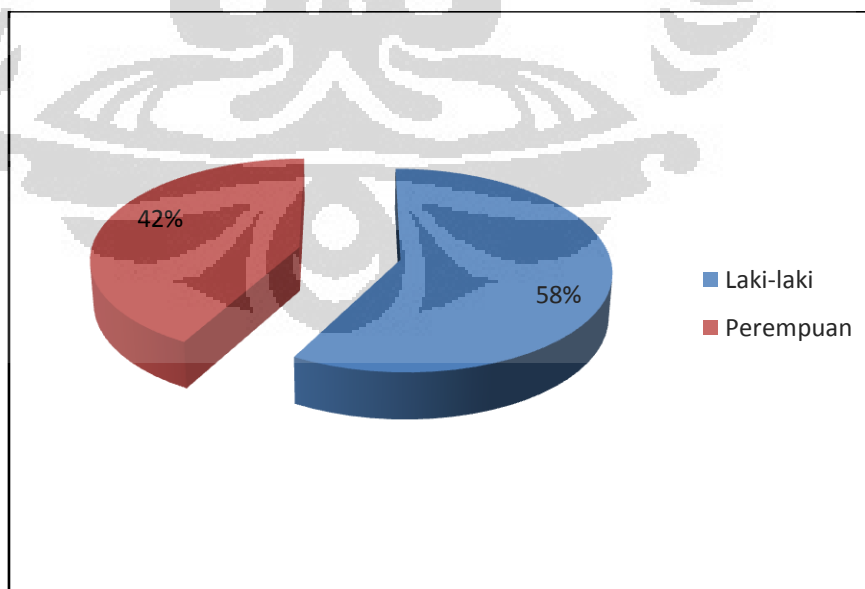
Layaknya responden pemanfaat, responden nonpemanfaat yang ditemui di lapangan juga didominasi oleh laki-laki. Sejumlah 58% dari

50 responden nonpemanfaat, atau sejumlah 29 responden nonpemanfaat berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan sisanya, yaitu sejumlah 42% dari 50 responden nonpemanfaat, atau sejumlah 21 orang berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 5.2.



Gambar 5.1 Jenis Kelamin Responden Pemanfaat
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

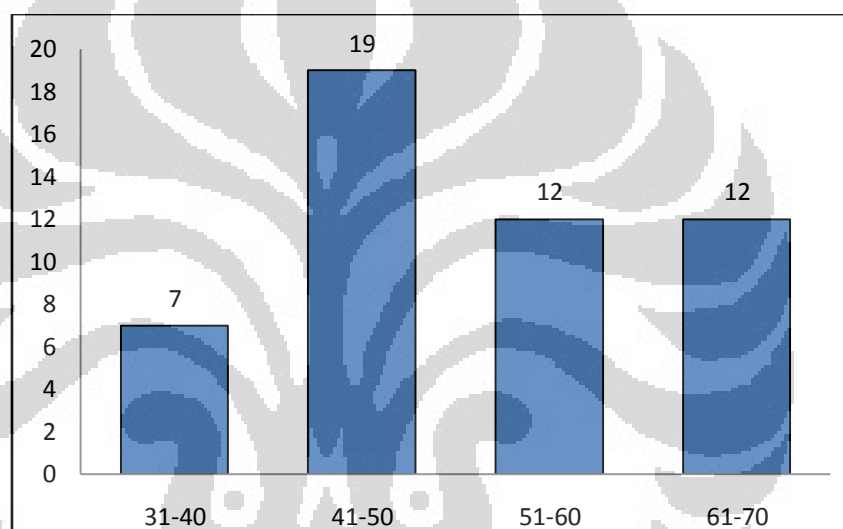


Gambar 5.2 Jenis Kelamin Responden Nonpemanfaat
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

5.1.2 Usia

Karakteristik responden selanjutnya adalah usia. Berdasarkan usia, untuk kategori responden pemanfaat, mayoritas responden berada pada rentang usia 41-50 tahun, yaitu sejumlah 19 responden. Mayoritas kedua responden pemanfaat berada pada rentang usia 51-60 tahun dan 61-70 tahun, yaitu masing-masing sejumlah 12 responden. Sedangkan sisanya, yaitu sejumlah 7 responden berada pada rentang usia 31-40 tahun. Pengelompokan responden yang pernah mengikuti PPMK berdasarkan rentang usia dapat dilihat pada Gambar 5.3.

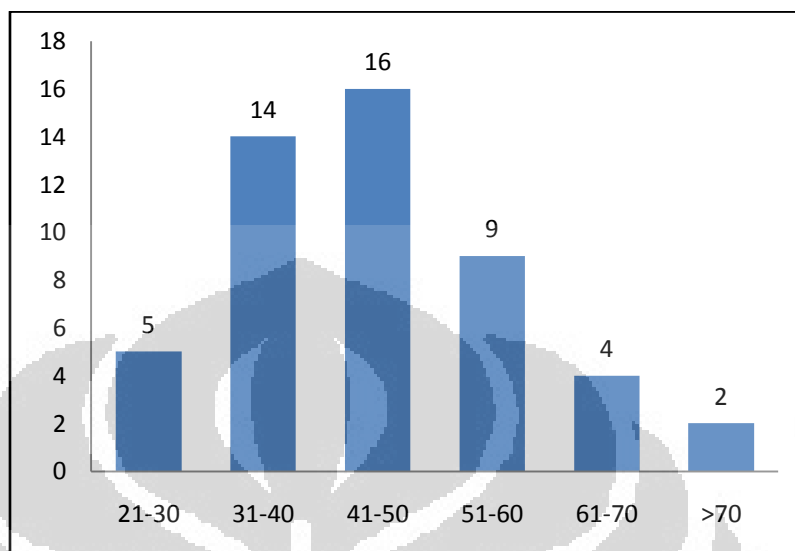


Gambar 5.3 Usia Responden Pemanfaat
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Pada kategori responden yang belum pernah mengikuti Program PPMK, mayoritas responden juga berada pada rentang usia 41-50 tahun. Pada rentang usia tersebut, terdapat 16 responden yang masuk ke dalam kategori responden nonpemanfaat. Mayoritas kedua dari responden nonpemanfaat berada pada rentang usia 31-40 tahun, yaitu sejumlah 14 responden. Mayoritas ketiga dari responden nonpemanfaat berada pada rentang usia 51-60 tahun, yaitu sejumlah 9 responden. Sedangkan sisanya, sejumlah 5 responden berada pada rentang usia 21-30 tahun, 4 responden berada pada rentang usia 61-70 tahun, dan 2 responden memiliki usia lebih dari 70 tahun. Pengelompokan responden

nonpemanfaat berdasarkan rentang usia dapat dilihat pada Gambar 5.4 di bawah ini.



Gambar 5.4 Usia Responden Nonpemanfaat (n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

5.1.3 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal penting dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari proses pendidikan seseorang merupakan modal penting dalam mencari pekerjaan guna menjaga keberlangsungan hidup seseorang. Pentingnya pendidikan bagi setiap orang pun membuat pendidikan menjadi hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi.

Pemerintah Indonesia, dalam memenuhi hak pendidikan warganya, mencanangkan Program Wajib Belajar 9 Tahun, yaitu pendidikan hingga tingkat SMP dan sederajat (Sekolah Menengah Pertama). Akan tetapi, pendidikan hingga tingkat SMP saja tidaklah cukup. Pada faktanya, fenomena pengangguran di Indonesia justru didominasi oleh masyarakat yang hanya memiliki tingkat pendidikan sebatas SMA dan sederajat (Hida, 2012, www.finance.detik.com).

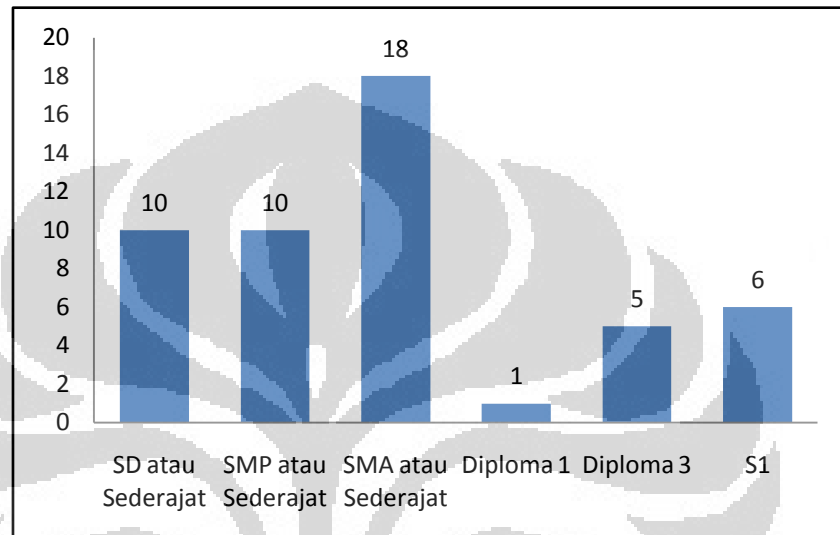
Fenomena pengangguran yang didominasi oleh lulusan SMA dan sederajat tersebut disebabkan oleh kalah bersaingnya lulusan SMA

dengan lulusan-lulusan Diploma maupun Sarjana yang dirasa memiliki keterampilan dan pengetahuan lebih dibandingkan dengan lulusan SMA. Akan tetapi, untuk menamatkan pendidikan tingkat Diploma ataupun Sarjana tidaklah mudah. Tidak semua orang beruntung dapat menamatkan pendidikan hingga tingkat Diploma maupun Sarjana. Oleh karenanya, sudah seharusnya pemerintah memberikan bantuan pemberdayaan kepada masyarakat kurang beruntung yang hanya dapat menamatkan pendidikan sampai SMA sehingga para lulusan SMA tersebut dapat bersaing juga dengan lulusan Diploma dan Sarjana.

PPMK merupakan suatu program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang begitu memiliki keterampilan. Sesuai dengan fenomena pengangguran di Indonesia yang didominasi oleh lulusan SMA, mayoritas responden yang mendapatkan program PPMK yang ditemui di lapangan adalah masyarakat yang hanya dapat mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA. Responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA sejumlah 18 responden dari 50 responden. Kemudian, tingkat pendidikan terakhir responden pemanfaat terbanyak kedua ada pada jenjang pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu 10 orang responden. Sisanya, sejumlah 6 responden yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi atau Sarjana (S1), 5 responden menyelesaikan pendidikannya hingga Diploma 3 (D3), dan 1 responden yang dapat mengenyam pendidikan hanya sampai Diploma 1 (D1). Pengelompokan responden pemanfaat berdasarkan jenjang pendidikan terakhirnya dapat dilihat pada Gambar 5.5.

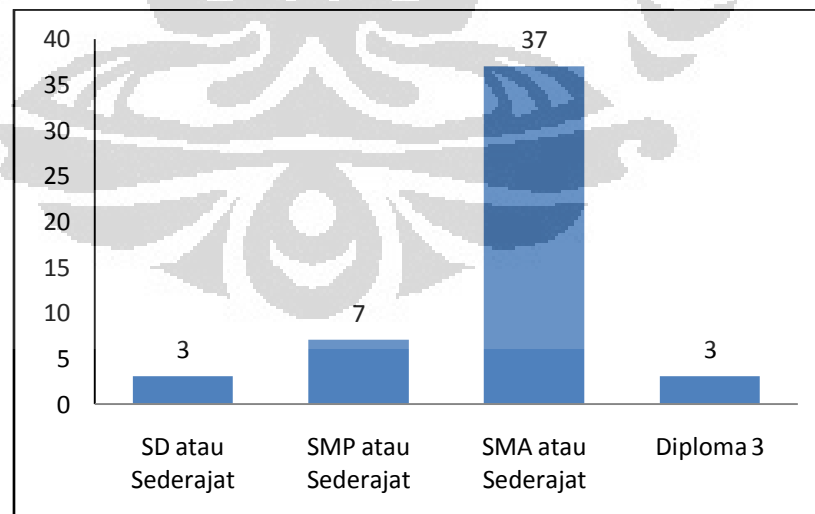
Untuk kategori responden yang belum pernah mengikuti program PPMK, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir setingkat SMA, yaitu sejumlah 37 responden dari total 50 responden. Kemudian, mayoritas kedua tingkat pendidikan terakhir responden nonpemanfaat ada pada jenjang pendidikan SMP, yaitu sejumlah 7 responden dari 50 responden. Sisanya, sejumlah 3

responden nonpemanfaat mengenyam pendidikan terakhir setingkat SD dan 3 responden nonpemanfaat lainnya yang mengenyam pendidikan hingga setingkat Diploma (D3). Pengelompokan responden nonpemanfaat berdasarkan jenjang pendidikan terakhir tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.6.



Gambar 5.5 Tingkat Pendidikan Terakhir Responden Pemanfaat (n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

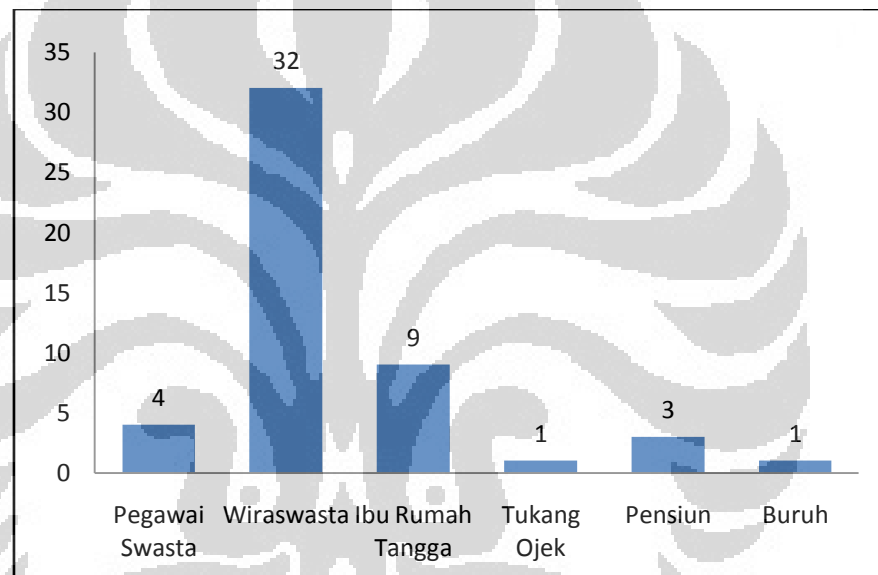


Gambar 5.6 Tingkat Pendidikan Terakhir Responden Nonpemanfaat (n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

5.1.4 Pekerjaan

Karakteristik responden selanjutnya adalah pekerjaan. Dapat dilihat dari grafik di bawah bahwa mayoritas pekerjaan para responden pemanfaat adalah wiraswasta, yakni sejumlah 32 orang. Mayoritas pekerjaan kedua para responden pemanfaat adalah ibu rumah tangga, yaitu sejumlah 9 responden. Selanjutnya, mayoritas ketiga pekerjaan para responden pemanfaat adalah pegawai swasta, yaitu sejumlah 4 orang; kemudian pensiunan sejumlah 3 orang; buruh sejumlah 1 orang; dan tukang ojek sejumlah 1 orang.

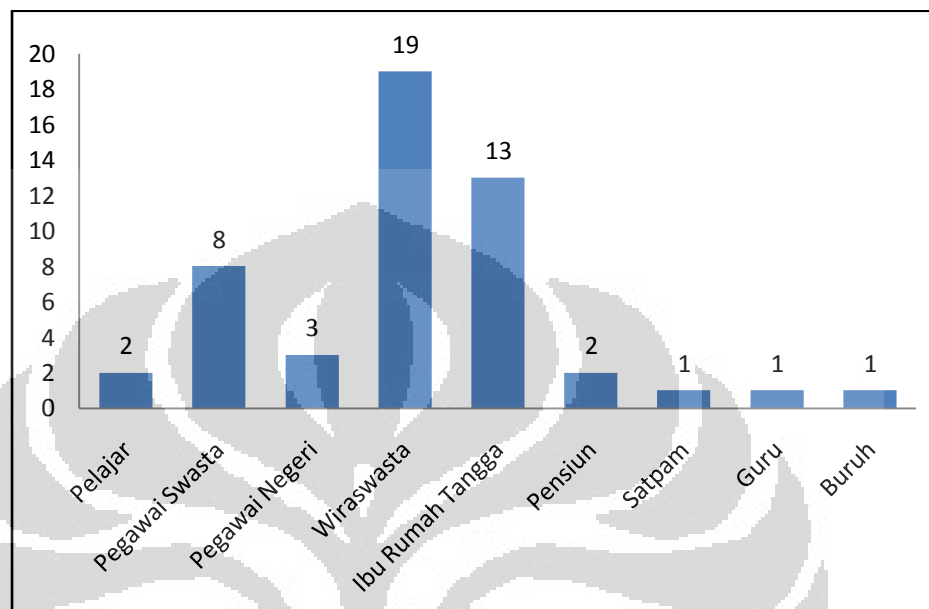


Gambar 5.7 Pekerjaan Responden Pemanfaat
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Untuk responden yang belum pernah mengikuti program PPMK, mayoritas pekerjaan para responden juga ternyata sama dengan mayoritas pekerjaan para responden yang pernah mengikuti program PPMK, yaitu wiraswasta. Sejumlah 19 responden dari 50 responden nonpemanfaat bekerja sebagai wiraswasta. Mayoritas kedua pekerjaan responden nonpemanfaat adalah ibu rumah tangga, yaitu sejumlah 13 responden dari total 50 responden. Selanjutnya, mayoritas ketiga pekerjaan responden nonpemanfaat adalah pegawai swasta, yaitu sejumlah 8 responden; kemudian pegawai negeri sejumlah 3 responden;

pelajar sejumlah 2 orang; pensiunan sejumlah 2 orang; dan satpam, guru, dan buruh yang masing-masing terdiri dari 1 responden. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.8 berikut ini.



Gambar 5.8 Pekerjaan Responden Nonpemanfaat
(n=50)

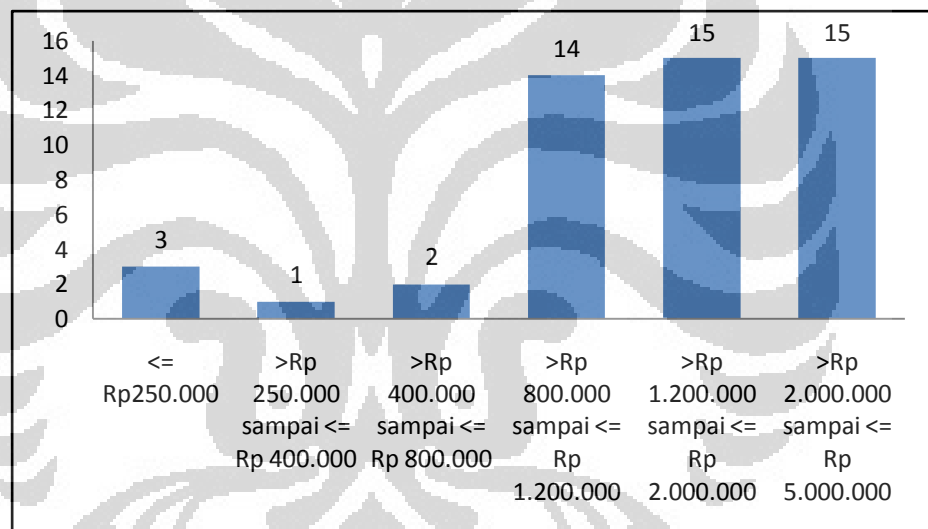
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Baik dari kalangan responden pemanfaat maupun responden nonpemanfaat, mayoritas responden memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta. Hal tersebut dikarenakan komposisi penduduk Kelurahan Bukit Duri yang memang mayoritas adalah pedagang, yaitu 13.606 penduduk, atau sejumlah 61 persen dari total keseluruhan penduduk di Kelurahan Bukit Duri. Dengan banyaknya penduduk Kelurahan Bukit Duri yang bermatapencarian sebagai pedagang, usaha-usaha mikro di kelurahan tersebut pun banyak berkembang sehingga kelurahan Bukit Duri merupakan kelurahan yang cocok untuk dijadikan sasaran dalam Program PPMK.

5.1.5 Pendapatan

Selanjutnya adalah karakteristik pendapatan responden per bulan. Dari Gambar 5.9, dapat dilihat bahwa mayoritas responden pemanfaat memiliki pendapatan di antara rentang pendapatan Rp 1.200.000,-

sampai dengan Rp 2.000.000,- perbulannya dan Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- per bulannya. Responden yang memiliki pendapatan per bulan tersebut masing-masing sejumlah 15 responden. Mayoritas kedua responden pemanfaat, yaitu sejumlah 14 responden, memiliki pendapatan per bulan berkisar di antara Rp 800.000,- sampai dengan Rp 1.200.000,-. Sisanya, sejumlah 3 responden pemanfaat memiliki pendapatan kurang dari Rp 250.000,- per bulannya, 2 responden pemanfaat yang memiliki pendapatan di antara rentang pendapatan Rp 400.000,- sampai dengan Rp 800.000,- per bulannya, dan 1 responden yang memiliki pendapatan di antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 400.000,- per bulannya.

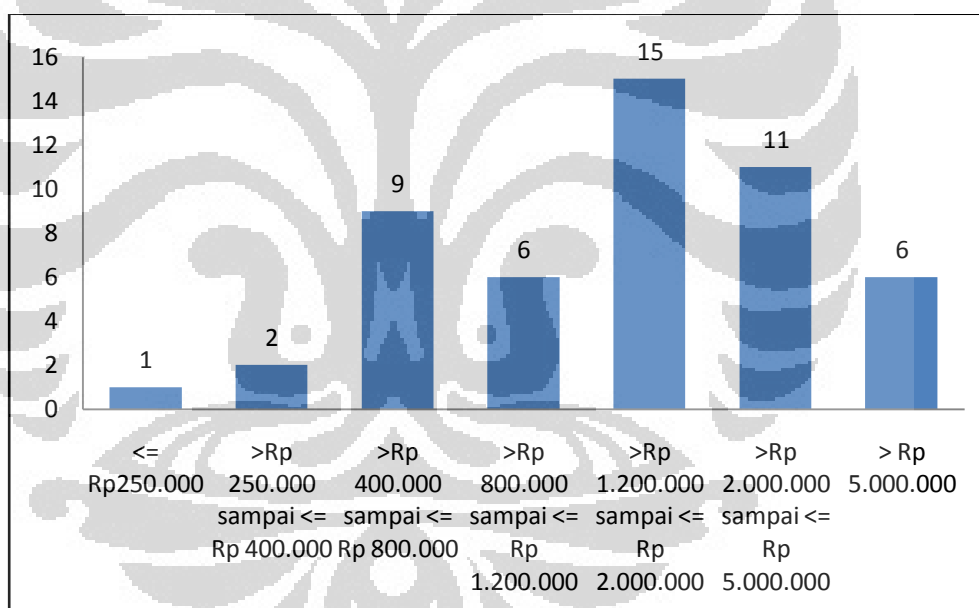


Gambar 5.9 Tingkat Pendapatan per Bulan Responden Pemanfaat (n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Untuk kategori responden nonpemanfaat, layaknya responden pemanfaat, mayoritas responden nonpemanfaat memiliki pendapatan di antara Rp 1.200.000,- sampai dengan Rp 2.000.000,- perbulannya. Sejumlah 15 responden nonpemanfaat memiliki pendapatan per bulan diantara rentang pendapatan tersebut. Selanjutnya, mayoritas kedua pendapatan responden nonpemanfaat berada pada rentang pendapatan antara Rp 2.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000,- per bulannya.

Sejumlah 11 responden dari 50 responden nonpemanfaat memiliki pendapatan di antara rentang pendapatan tersebut. Kemudian, sejumlah 9 responden nonpemanfaat memiliki pendapatan di antara Rp 400.000,- sampai dengan Rp 800.000,- per bulannya. Sisanya, masing-masing sejumlah 6 responden memiliki pendapatan di antara rentang pendapatan per bulan Rp 800.000,- sampai dengan Rp 1.200.000,- dan lebih dari Rp 5.000.000,- per bulannya; 2 responden memiliki pendapatan di antara rentang pendapatan Rp 250.000,- sampai dengan Rp 400.000,- per bulannya; dan 1 responden memiliki pendapatan kurang dari Rp 250.000,- per bulannya. Pengelompokan responden nonpemanfaat berdasarkan tingkat pendapatannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5.10 Tingkat Pendapatan per Bulan Responden Nonpemanfaat (n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

5.2 Analisis Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah dampak program, yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Variabel tersebut terdiri dari 4 dimensi, yaitu pengaruh terhadap kelompok sasaran, pengaruh terhadap kelompok di luar kelompok sasaran, keadaan yang diharapkan di

masa kini, serta pengaruh tidak langsung terhadap kelompok sasaran (Agustino, 2008:191-193). Untuk mengukurnya, masing-masing dimensi tersebut diturunkan ke dalam indikator dan sub-indikator yang kemudian dituangkan ke dalam kuisisioner dan disebarakan kepada responden yang berdomisili di Kelurahan Bukit Duri. Untuk mengukur dimensi pengaruh terhadap kelompok sasaran, keadaan di masa kini, dan pengaruh tidak langsung terhadap kelompok sasaran; indikator dan sub-indikator dari masing-masing dimensi diturunkan ke dalam 30 pernyataan dalam suatu kuisisioner yang disebarakan kepada 50 responden yang pernah mengikuti program PPMK ini (responden pemanfaat). Sedangkan untuk mengukur dimensi pengaruh terhadap kelompok di luar sasaran, indikator dan sub-indikator tersebut dituangkan kedalam 9 pernyataan dalam satu kuisisioner yang disebarakan kepada 50 responden yang belum pernah mengikuti program PPMK (responden nonpemanfaat). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing dimensi.

5.2.1 Dimensi Pengaruh PPMK terhadap Kelompok Sasaran

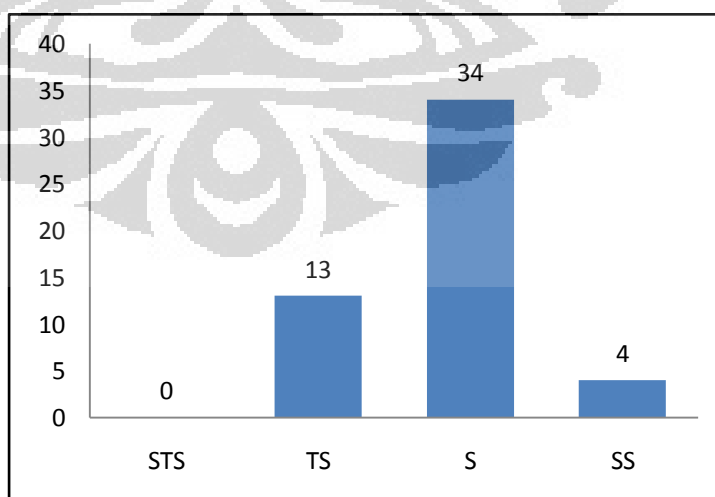
Untuk mengukur dimensi pertama, yaitu dimensi pengaruh program terhadap kelompok sasaran, dimensi ini diturunkan ke dalam satu indikator, yaitu perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dimensi ini hanya diturunkan ke dalam satu indikator karena sesuai dengan batasan penelitian ini, yaitu penelitian ini lebih ditujukan untuk melihat dampak program kepada kesejahteraan masyarakat.

Dari indikator perbaikan kesejahteraan masyarakat tersebut, indikator ini diturunkan kembali ke dalam 9 sub-indikator berdasarkan definisi mengenai hak-hak minimal yang harus dipenuhi guna dapat dikatakan sejahtera berdasarkan Konferensi ILO Tahun 1974, yaitu perbaikan pendapatan, perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, perbaikan mata pencaharian, perbaikan kemampuan untuk

memenuhi kebutuhan untuk berlindung (rumah), perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, perbaikan rasa aman terhadap tindak kejahatan, serta perbaikan kemampuan (hak) untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Pada akhirnya, kesembilan indikator tersebut diturunkan kembali menjadi 9 pernyataan dalam satu kuisioner. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing sub-indikator dan pernyataan.

a. Perbaikan Pendapatan

Pernyataan pertama adalah pernyataan yang menjelaskan mengenai sub-indikator perbaikan pendapatan. Salah satu alat untuk mengukur kesejahteraan dari seseorang adalah dari tingkat pendapatannya. Jika menggunakan standar yang dikeluarkan oleh World Bank, pendapatan minimal seseorang haruslah \$1 dan \$2 per harinya. Namun, jika menggunakan standar pemerintah, yaitu menggunakan UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta, pendapatan minimal yang harus diterima oleh seseorang per bulannya adalah Rp1.290.000,- untuk tahun 2011 dan Rp 1.497.838,- untuk tahun 2012. Jika seseorang mengalami peningkatan pendapatan, maka orang tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan kesejahteraan dan begitupula sebaliknya.



Gambar 5.11 Perbaikan Pendapatan

(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 50 responden pemanfaat, sejumlah 34 responden menyatakan setuju dengan pernyataan “adanya perbaikan pendapatan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan setempat”. Selanjutnya, sejumlah 13 responden menyatakan tidak setuju. Sisanya, sejumlah 3 responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.11.

Mayoritas responden yang ditemukan di lapangan merasakan adanya perbaikan pendapatan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan setempat. Adanya perbaikan pendapatan yang responden rasakan dikarenakan mayoritas responden telah memanfaatkan pinjaman dana bergulir untuk usaha mikro yang diberikan melalui Bina Ekonomi PPMK. Pinjaman dana bergulir tersebut dirasakan masyarakat merupakan pinjaman yang bersifat lunak, tanpa bunga, dan sifat cicilannya yang ringan. Dengan adanya pinjaman dana bergulir tersebut, responden dapat menambah modal dan memutar roda usahanya sehingga pendapatan para responden pun dapat mengalami peningkatan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan dari salah satu responden, yaitu Ibu Nurhasanah, yang memanfaatkan pinjaman dana Bina Ekonominya untuk usaha warung kelontongnya. Ibu Nurhasanah menyatakan bahwa :

“adalah perbaikan pendapatan. Pinjamannya kan lumayan buat nambah-nambah modal usaha, terus juga cicilannya ringan ga pake bunga. Sebulan Cuma nyicil Rp 50.000”. (Hasil wawancara dengan Ibu Nurhasanah, 16 Februari 2012)

Meskipun mayoritas responden pemanfaat yang ditemui merasakan adanya perbaikan pendapatan, masih ada beberapa responden pemanfaat yang tidak setuju dan tidak merasakan adanya perbaikan pendapatan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan tersebut. Responden pemanfaat yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut kebanyakan berasal dari para responden yang memanfaatkan kegiatan Bina Sosial PPMK. Salah satu responden

pemanfaat kegiatan Bina Sosial adalah Ibu Marpuah. Ibu Marpuah merupakan warga RW 11, Kelurahan Bukit Duri yang pernah memanfaatkan pelatihan keterampilan kue yang diselenggarakan oleh Bina Sosial PPMK. Ibu Marpuah mengaku bahwa kegiatan pelatihan keterampilan kue tersebut diikuti untuk mengisi waktu luang saja. Hasil pelatihan yang didapatkan pun tidak dimanfaatkan untuk menambah penghasilannya dan hanya menjadi keterampilan baru baginya. Tidak ada niatan baginya untuk menggunakan keterampilan barunya tersebut agar dapat memperoleh pendapatan tambahan. Oleh karenanya, Ibu Marpuah tidak merasakan adanya perbaikan pendapatan. Hal tersebut dapat ditelusuri dari pernyataannya sebagai berikut.

“Kalo ditanya ada perbaikan pendapatan apa engga sejak saya ngikut pelatihan keterampilan kue itu mah, ya saya jawabnya ya ga ada. Soalnya saya kan ngikut-ngikut pelatihan keterampilan kayak gini cuma buat iseng-iseng aja ngisi waktu luang. Ya lumayanlah, jadi dapet ilmu buat bikin-bikin kue, kayak brownies-brownies gitu, dari yang ga bisa jadi bisa gitu”.(Hasil wawancara dengan Ibu Marpuah, 16 Februari 2012)

Selain Ibu Marpuah, Ibu Boni, warga RT 04, RW 06, Kelurahan Bukit Duri, merupakan salah satu responden yang pernah memanfaatkan pelatihan keterampilan kerajinan bunga berbasiskan plastik yang diselenggarakan oleh PPMK. Senada dengan Ibu Marpuah, Ibu Boni juga tidak merasakan adanya perbaikan pendapatan sejak dilaksanakannya PPMK, khususnya sejak Ibu Boni mengikuti pelatihan keterampilan tersebut. Keterbatasan modal merupakan kendala utama ketika ingin menyalurkan keterampilan baru yang Ibu Boni miliki. Hal tersebut dapat dilihat padapernyataannya sebagai berikut.

“Saya pernah ikut keterampilan bikin bunga dari Bina Sosial PPMK. Waktu itu dibikinnya di kelurahan. Tapi ga semua masyarakat yang diundang, paling Cuma perwakilan dari tiap

RT aja, 5 orang per RT kalau ga salah. Dari perwakilan-perwakilan tiap RT baru disalurin lagi ke ibu-ibu di masing-masing RT. Saya sih udah nyalurin lagi ke ibu-ibu lainnya. Tapi sayang, kepentok di modal sih, jadi ya ibu-ibu yang udah pada bisa ya bisa aja, kurang bisa diusahain lagi”.(Hasil wawancara dengan Ibu Boni, 30 Maret 2012)

Akan tetapi, tidak hanya responden yang pernah memanfaatkan kegiatan Bina Sosial PPMK saja yang tidak merasakan adanya perbaikan pendapatan sejak dilaksanakannya PPMK. Beberapa responden yang pernah memanfaatkan kegiatan Bina Ekonomi PPMK namun tidak juga merasakan adanya perbaikan pendapatan. Salah satu responden tersebut adalah Bapak Effendi. Bapak Effendi merupakan warga kelurahan Bukit Duri yang pernah memanfaatkan pinjaman dana bergulir Bina Ekonomi PPMK untuk membantu usaha jasa reparasi TV yang dimilikinya. Bapak Effendi menyatakan :

“Saya sih ga ngerasa ada perbaikan pendapatan dari pinjaman Bina Ekonomi ini. Soalnya kalo buat saya, duit satu juta mah terlalu sedikit buat dagang”. (Hasil wawancara dengan Bapak Effendi, 24Februari 2012)

Selain Bapak Effendi, Bapak Endang, warga kelurahan Bukit Duri yang pernah memanfaatkan pinjaman dana bergulir PPMK untuk usaha mie ayamnya juga menyatakan tidak setuju dengan pernyataan “adanya perbaikan pendapatan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Responden tersebut merasa anggota Dewan Kelurahan sering kali bertindak tidak adil dalam memilih masyarakat yang akan memanfaatkan pinjaman dana bergulir, termasuk kepada responden. Pada akhirnya, respondenpun tidak terlalu merasakan manfaat dari adanya pinjaman dana bergulir Bina Ekonomi PPMK. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan responden, yaitu, *“Dari pihak kelurahannya suka tebang pilih sih, saya baru minjem sekali, padahal mau minjem lagi, tapi*

malah disetop ga boleh minjem lagi".(Hasil wawancara dengan Bapak Endang, 20 Maret 2012)

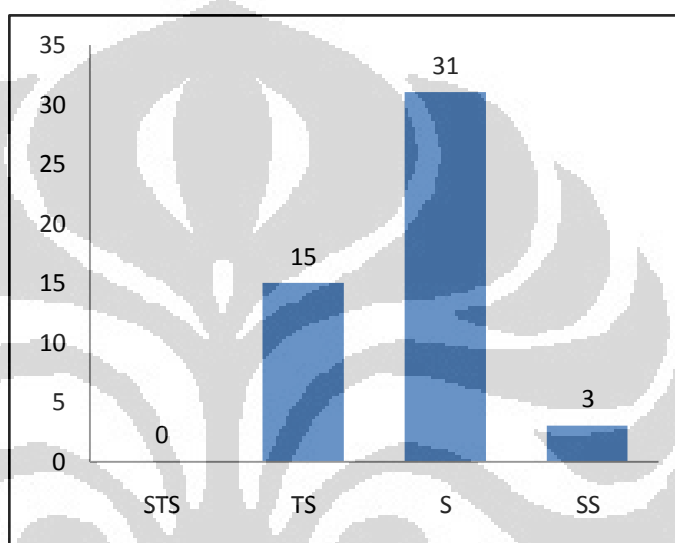
b. Perbaikan Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan

Pernyataan kedua merupakan pernyataan untuk menjelaskan sub-indikator perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan yang paling utama dari setiap manusia, sehingga perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan menjadi salah satu alat ukur untuk melihat kesejahteraan seseorang. Kebutuhan akan pangan dapat dilihat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif, berdasarkan angka kecukupan gizi, seseorang harus mengkonsumsi makanan dengan jumlah minimal 2000 kalori per harinya. Sedangkan secara kualitatif, seseorang harus mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin, atau yang lebih dikenal dengan istilah makanan 4 sehat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 50 responden pemanfaat, sejumlah 31 responden menyatakan setuju dengan pernyataan "adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini". Namun, 15 responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 4 responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.12.

Adanya perbaikan pemenuhan kebutuhan pangan yang dirasakan oleh para responden terjadi seiring dengan adanya perbaikan pendapatan sejak para responden mengikuti program PPMK. Dengan adanya perbaikan pendapatan, para responden dapat membeli kebutuhan pangan yang lebih beragam untuk makan sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ertiyati, salah satu pemanfaat dana Bina Ekonomi yang menggunakan pinjaman dana

tersebut untuk menambah modal usaha warung kelontongnya, responden merasa dengan adanya kemajuan usaha warungnya, responden dapat membeli lebih banyak lauk pauk untuk dikonsumsi oleh anak dan suaminya. Responden menyatakan, *“Lumayan si, Mba, lauknya jadi nambah. Kadang-kadang jadi bisa makan daging. Trus bisa beli tambahan kayak tahu, tempe juga”*. (Hasil wawancara dengan Ibu Ertiyati, 30 Maret 2012).



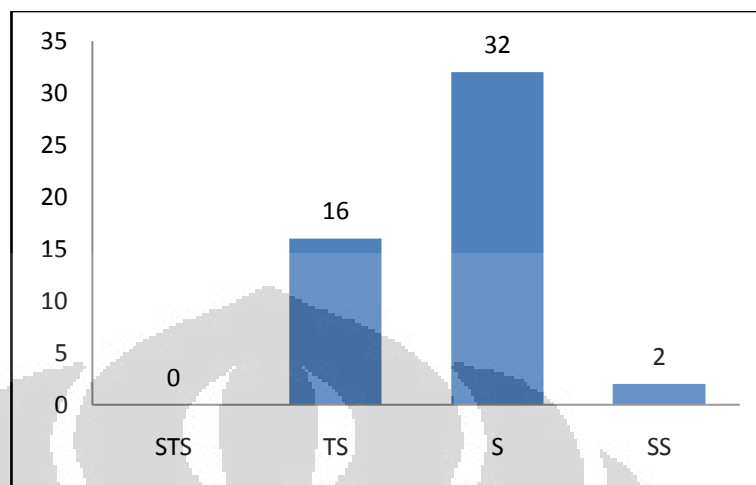
Gambar 5.12 Perbaikan Kemampuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

c. Perbaikan Kemampuan untuk Memenuhi Kebutuhan Kesehatan

Pernyataan ketiga dari kuisioner yang disebarkan kepada responden pemanfaat merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sub-indikator perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 responden, sejumlah 32 responden menyatakan setuju dengan pernyataan *“adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sejak dilakukannya PPMK di kelurahan ini”*. Enam belas responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut,

dan sejumlah 2 responden menyatakan sangat setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.13.



Gambar 5.13 Perbaikan Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Kesehatan
(n=50)

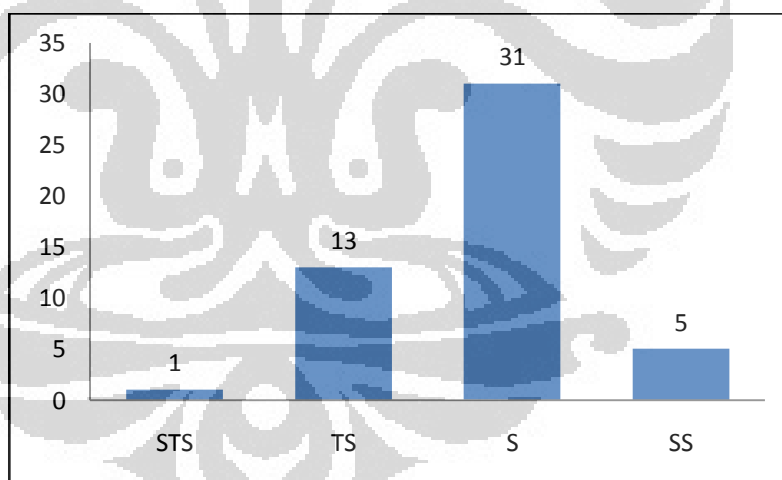
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Kelurahan Bukit Duri merupakan kelurahan yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang cukup memadai. Di kelurahan tersebut, sudah terdapat Puskesmas, Posyandu, beberapa praktek dokter umum, praktek bidan, rumah bersalin, serta pos kesehatan KB. Namun, dari keseluruhan fasilitas kesehatan tersebut, Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang paling dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan adanya Puskesmas yang berdiri di kelurahan tersebut, hanya dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 2.000,- saja, mayoritas responden mengakui dapat menikmati fasilitas pengobatan murah. Dengan adanya pelaksanaan program PPMK, ditambah dengan adanya fasilitas Puskesmas di kelurahan tersebut, responden pun merasa menjadi semakin lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan oleh salah seorang responden bernama Parmin yang pernah memanfaatkan pinjaman dana bergulir PPMK untuk menambah modal usaha percetakannya. Pak Parmin menyatakan, *“Keuntungan yang saya dapet dari hasil*

usaha saya lumayanlah bisa diputer untuk ngebiayain anak saya yang waktu itu sakit buat berobat ke Puskesmas”. (Hasil wawancara dengan Bapak Parmin, 8 Maret 2012)

d. Perbaikan Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan

Pernyataan keempat, yaitu pernyataan “adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan yang menjelaskan sub-indikator perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dari 50 responden yang ditemui, sejumlah 31 responden setuju dengan persetujuan tersebut. Namun, 13 responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 5 responden sangat setuju dan 1 responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.14 di bawah ini.



Gambar 5.14 Perbaikan Kemampuan untuk Memenuhi Kebutuhan Pendidikan
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

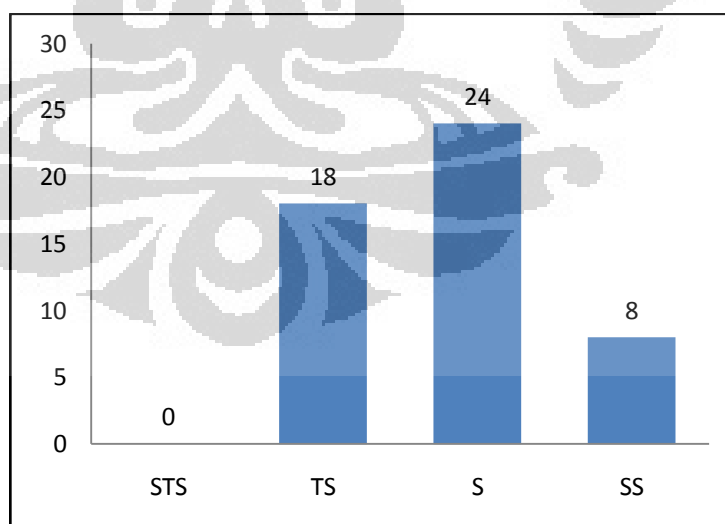
Dengan adanya PPMK yang dilaksanakan di Kelurahan Bukit Duri sejak tahun 2003, khususnya pinjaman dana bergulir dari Bina Ekonomi, responden merasa bahwa usaha para responden menjadi

ikut terbantu dan pendapatan para responden pun ikut mengalami perbaikan. Dari adanya perbaikan pendapatan tersebut, para responden menjadi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Ibu Supriyati, salah satu responden yang pernah memanfaatkan dana pinjaman bergulir untuk menambah modal usaha dagang minumannya menyatakan bahwa :

“Alhamdulillah, dulu, pas anak saya mau masuk SD, saya merasa kebantu, soalnya dari usaha dagang-dagang itu ya pasti adalah yang disisihin buat anak”. (Hasil wawancara dengan Ibu Supriyati, 24 Februari 2012)

e. Perbaikan Mata Pencapaian

Pernyataan kelima merupakan pernyataan yang menjelaskan mengenai sub-indikator perbaikan mata pencapaian. Dari 50 responden yang ditemui, sejumlah 24 responden menyetujui pernyataan “adanya perbaikan mata pencapaian sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Sisanya, sejumlah 18 responden tidak menyetujui pernyataan tersebut dan sejumlah 8 responden menyatakan sangat setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.14 di bawah ini.



Gambar 5.14 Perbaikan Mata Pencapaian
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Perbaikan mata pencaharian yang dirasakan oleh para responden tersebut khususnya adalah para responden yang memanfaatkan pinjaman dana bergulir Bina Ekonomi PPMK. Dengan adanya pinjaman tersebut, para responden mendapatkan modal tambahan untuk usahanyasehingga usaha para responden pun mengalami kemajuan. Salah satu responden yang merasakan adanya kemajuan dalam usahanya adalah Bapak Abdullah.

Pada awalnya Bapak Abdullah memiliki usaha Suplier ATK dan pinjaman dana Bina Ekonomi tersebut digunakan untuk menambah modal usahanya. Dengan adanya dana pinjaman tersebut, usaha Suplier ATK milik Bapak Abdullah mengalami kemajuan dan menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membuka warung kelontong di daerah rumahnya. Selain Bapak Abdullah, Ibu Komariah, responden yang memanfaatkan pinjaman dana Bina Ekonomi untuk usaha kantinnya, juga sependapat dengan adanya perbaikan mata pencaharian sejak dilaksanakannya PPMK. Ibu Komariah menyatakan :

“ada perbaikan mata pencaharian, dari pinjaman itu kan buat nambah-nambah modal usaha, yang tadinya dagangan makanan saya cuma 3 macem bisa jadi 5 macem”. (Hasil wawancara dengan Ibu Komariah Gunarto, 24 Februari 2012)



Gambar 5.15 Usaha Suplier ATK Bapak Abdullah

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2012



Gambar 5.16 Usaha Warung Kelontong Bapak Abdullah

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2012

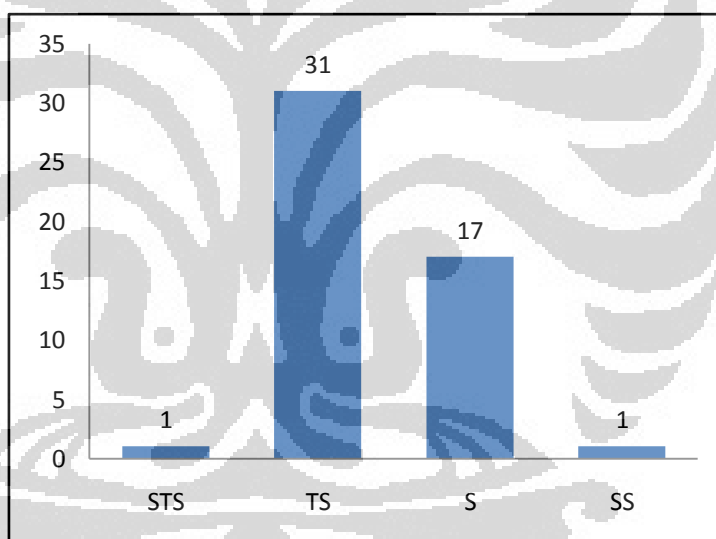
f. Perbaikan Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Berlindung

Pernyataan keenam, yaitu pernyataan “adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan berlindung (rumah) sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”, merupakan pernyataan yang menjelaskan sub-indikator perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan berlindung (rumah). Berdasarkan kuisisioner yang disebarakan kepada 50 responden, mayoritas responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan tersebut, yaitu sejumlah 31 responden. Sisanya, sejumlah 17 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab sangat tidak setuju, dan 1 responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.17.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan 50 responden pemanfaat, mayoritas responden berpendapat perbaikan pendapatan sejak diadakannya PPMK tidak terlalu besar sehingga tambahan pendapatan tersebut tidak dapat digunakan untuk memperbaiki rumah tempat para responden berlindung. Pada umumnya, biaya untuk memperbaiki rumah memang tidaklah

sedikit. Dengan tambahan pendapatan yang tidak terlalu besar, tambahan pendapatan tersebut harus dikelola berdasarkan skala prioritas dari masing-masing responden dan mayoritas responden merasa perbaikan rumah bukanlah prioritas pada saat ini. Para responden merasa masih banyak kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya yang lebih mendesak, seperti pendidikan anak. Hal tersebut didukung oleh pernyataan salah satu responden yaitu Bapak Parmin yang menyatakan bahwa :

“Kalau benerin rumah engga sampe sih, Mba. Abis keuntungannya cuma segitu, bingung gimana mau muternya kalau dipake buat benerin rumah. Paling ya bantu-bantu anak sekolah aja”. (Hasil wawancara dengan Bapak Parmin, 8 Maret 2012)



Gambar 5.17 Perbaikan Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Berlindung (Rumah)
(n=50)

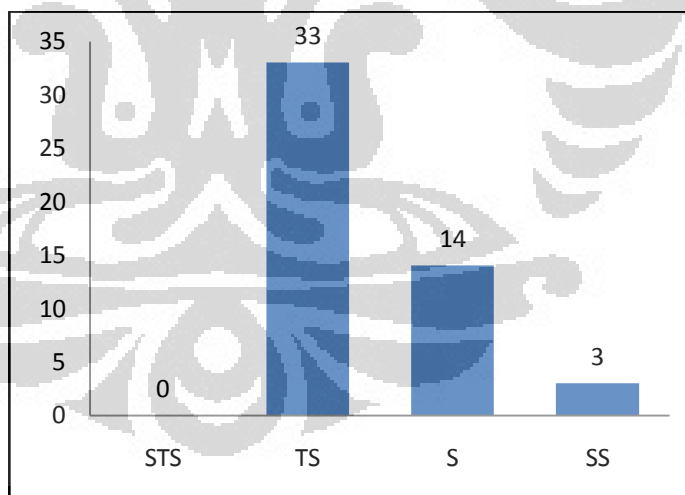
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

g. Perbaikan Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih

Sub-indikator ketujuh adalah sub-indikator mengenai perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih juga merupakan kebutuhan yang tidak kalah pentingnya dengan kebutuhan pokok lainnya. Air bersih

dibutuhkan untuk beberapa aktivitas manusia, seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Pentingnya air yang bersih untuk seluruh aktivitas tersebut dikarenakan air bersih dapat menghindari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh air kotor seperti diare, demam berdarah, disentri, hepatitis A, kolera, cacangan, hingga malaria.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pendapat responden mengenai sub-indikator perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, mayoritas responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan “adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Sejumlah 33 responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 14 responden setuju dan 3 responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.18.



Gambar 5.18 Perbaikan Kemampuan Untuk Memenuhi Kebutuhan Air Bersih
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Banyaknya responden yang tidak setuju dengan pernyataan “adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air

bersih sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” dikarenakan mayoritas responden yang ditemui sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Banyak di antara responden yang telah menggunakan *jet pump* untuk mendapatkan air tanah maupun berlangganan dengan PT PAM Lyonnaise Jaya sehingga banyak responden yang tidak merasakan adanya perubahan dari segi pemenuhan kebutuhan air bersih. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh salah seorang responden, yaitu Ibu Desfaridah, yang menyatakan “*Dari dulu saya sudah pake jet pump, jadi biasa-biasa aja*”. (Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Desfaridah, 30 Maret 2012)

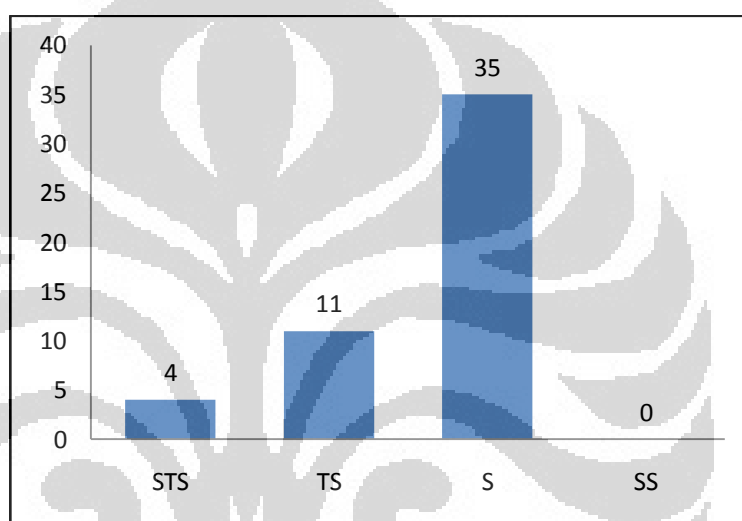
h. Perbaikan Rasa Aman Terhadap Tindak Kejahatan dan Kekerasan

Pernyataan kedelapan, yaitu pernyataan “adanya perbaikan rasa aman terhadap tindakan kejahatan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan untuk menjelaskan sub-indikator kedelapan, yaitu sub-indikator perbaikan rasa aman terhadap tindak kejahatan dan kekerasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, sejumlah 35 responden setuju dengan pernyataan tersebut. Namun, 13 responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 4 responden menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.19.

Adanya perbaikan rasa aman terhadap tindak kejahatan di kelurahan Bukit Duri, menurut mayoritas responden, dikarenakan adanya kegiatan positif yang diberikan oleh PPMK kepada para pengangguran-pengangguran di kelurahan setempat, khususnya untuk para pemuda. Kegiatan-kegiatan positif tersebut, seperti pemberian pelatihan-pelatihan kepada pengangguran dan pemberian bantuan fasilitas olahraga, dapat menyalurkan para pemuda dan pengangguran untuk melakukan hal-hal yang lebih

berguna dan menghindari para pemuda dari kegiatan-kegiatan negatif yang bahkan dapat merugikan masyarakat yang ada di kelurahan tersebut. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh salah satu responden, yaitu Bapak Yahya, yang menyatakan :

“Ya lumayanlah, jadi aman. Pemuda-pemuda yang tadinya kerjanya cuma duduk-duduk ga jelas jadi punya kegiatan main tenis meja di Gedung PKK, jadi ga ada tawuran”. (Hasil wawancara dengan Bapak Yahya, 5 Maret 2012)



Gambar 5.19 Perbaikan Rasa Aman terhadap Tindakan Kejahatan
(n=50)

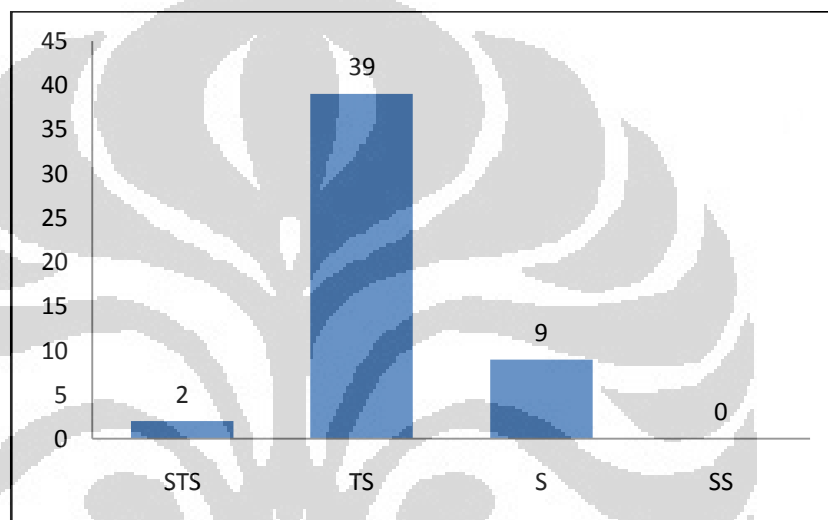
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

i. Perbaikan Kemampuan Untuk Berpartisipasi Dalam Kegiatan Politik

Pernyataan kesembilan adalah pernyataan yang menjelaskan mengenai sub-indikator perbaikan kemampuan (hak) untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Menurut Lewis dan Kallab, pembangunan ekonomi pada pemerintahan demokratis memberikan dampak yang lebih baik jika dibandingkan dengan pemerintahan otoriter (1987:198). Dengan adanya kebebasan berpolitik, hal tersebut dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar kebijakan yang dibuat tetap memperhatikan

kebutuhan dan kepentingan masyarakat kecil yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 50 responden, sejumlah 39 responden menjawab tidak setuju dengan pernyataan “adanya perbaikan kemampuan (hak) untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik”. Sisanya, sejumlah 9 responden setuju dan 2 responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.20.



Gambar 5.20 Perbaikan Kemampuan (hak) Untuk Berpartisipasi Dalam Kegiatan Politik

(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap kegiatan politik yang diselenggarakan di kelurahan Bukit Duri sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan tersebut membuat mayoritas responden memberikan jawaban tidak setuju pada pernyataan “adanya perbaikan kemampuan (hak) untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik”. Kegiatan politik yang lazim dilakukan hanyalah sebatas pemilihan Ketua RT, RW, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah diselenggarakan sejak lama, sebelum PPMK dilaksanakan di kelurahan tersebut. Hal tersebut dipertegas dengan adanya pernyataan dari salah satu responden, yaitu Bapak

Abdullah, yang menyatakan, “*Ga juga ah, sama-sama aja. Paling cuma buat Pilkada aja*”.(Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, 30 Maret 2012)

Selain itu, banyak responden yang juga tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik di kelurahan tersebut sehingga banyak responden yang menyatakan tidak setuju. Salah satunya adalah Bapak Yahya. Responden tersebut mengatakan, “*Ah, pusing, kalau soal-soal politik gitu saya ga tertarik, Dek*”. (Hasil wawancara dengan Bapak Yahya, 5 Maret 2012)

5.2.1.1 Analisis Dimensi Pengaruh PPMK Terhadap Kelompok Sasaran

Dari total 31 pernyataan yang diberikan kepada responden pemanfaat, 9 diantaranya adalah pernyataan yang diberikan untuk mengukur dimensi pengaruh PPMK terhadap kelompok sasaran. Jawaban atas kesembilan pernyataan tersebut kemudian digabungkan menjadi ke dalam satu dimensi dengan menggunakan kategori baru, yaitu kategori positif dan kategori negatif. Skala penilaian katogeri positif dan negatif didapatkan dari hasil penghitungan sebagai berikut.

$$RS = (m-n)/b,$$

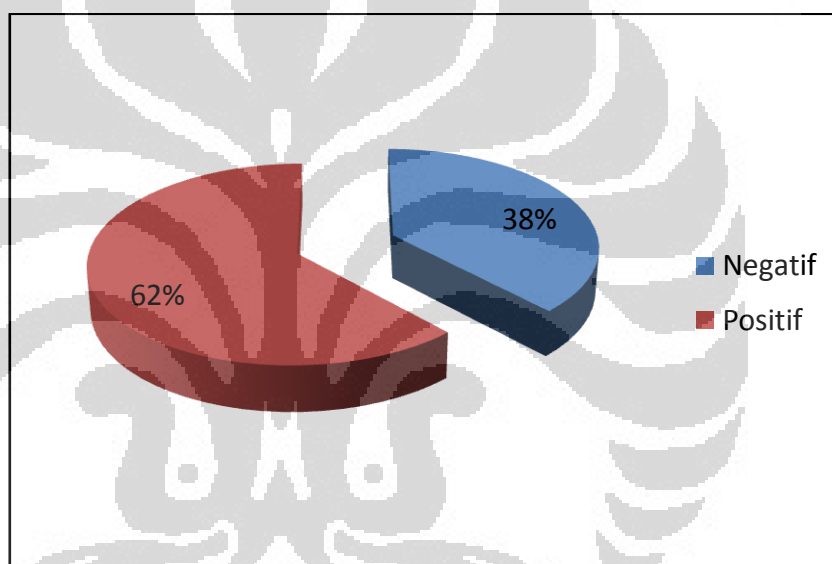
dimana **m** adalah nilai tertinggi yang mungkin; **n** adalah nilai terendah yang mungkin; **b** adalah jumlah kelas. Sehingga **RS** = $(36-9)/2 = 13,5$

Tabel 5.1 Pembagian Kelas Analisis Deskriptif Mean

Kategori	Batasan
Negatif	$9 < x \leq 22$
Positif	$23 < x \leq 36$

Sumber : telah diolah kembali

Berdasarkan Tabel 5.1 di atas, PPMK dapat dikatakan memberikan pengaruh yang positif terhadap kelompok sasaran jika penghitungan pada aplikasi SPSS berada pada rentang nilai 23 hingga 36. Selanjutnya, PPMK dikatakan memberikan pengaruh yang negatif terhadap kelompok sasaran jika penghitungan pada aplikasi SPSS 19 berada pada rentang nilai 9 hingga 22. Pada Gambar 5.21 akan dijelaskan mengenai hasil olahan data untuk dimensi pengaruh PPMK terhadap kelompok sasaran.



Gambar 5.21 Dimensi Pengaruh terhadap Kelompok Sasaran
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Berdasarkan pengolahan data dari 50 responden yang digunakan untuk menganalisis Dampak Program PPMK di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dapat dilihat bahwa sebesar 62% responden, atau sejumlah 31 responden memberikan tanggapan positif terkait dengan pengaruh terhadap kelompok sasaran. Dengan kata lain, sejumlah 31 responden pemanfaat merasakan adanya

pengaruh yang diberikan oleh PPMK terhadap kesejahteraan mereka. Sedangkan sisanya, sejumlah 38% responden, atau sejumlah 19 responden pemanfaat memberikan tanggapan negatif terhadap pengaruh PPMK kepada kelompok sasaran. Dengan kata lain, sejumlah 19 responden tidak merasakan adanya pengaruh PPMK terhadap kesejahteraan mereka.

5.2.2 Dimensi Pengaruh PPMK terhadap Kelompok di Luar Kelompok Sasaran

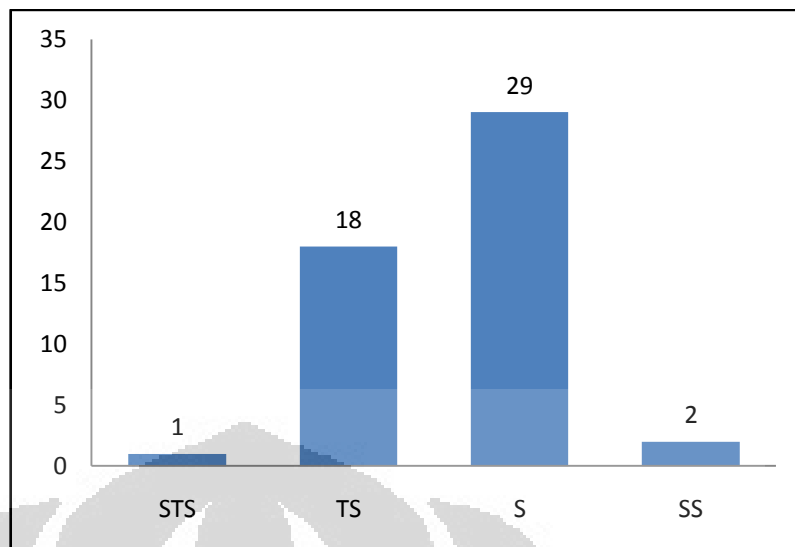
Suatu kebijakan maupun suatu program, pada dasarnya memiliki dampak terhadap kelompok lain selain kelompok sasaran dari suatu program, atau yang lebih dikenal dengan istilah efek eksternalitas. Begitu pula dengan suatu program penanggulangan kemiskinan. Suatu program penanggulangan kemiskinan secara langsung dan tidak langsung melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, aparat pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, guru, penyuluh kesehatan, dan lain sebagainya (Tarigan, 2009). Dampak yang diakibatkan oleh suatu program penanggulangan kemiskinan pun dapat menyebar ke berbagai pihak, tidak hanya kepada masyarakat-masyarakat miskin yang menjadi sasaran. Oleh karenanya, pada dimensi pengaruh PPMK terhadap kelompok di luar kelompok sasaran, berbeda dengan dimensi-dimensi lainnya. Responden dari dimensi ini adalah masyarakat di luar kelompok sasaran yang belum pernah memanfaatkan program PPMK.

Program PPMK merupakan suatu program yang terdiri dari 3 pilar di dalamnya, yaitu Bina Ekonomi, Bina Sosial, dan Bina Fisik Lingkungan. Dari pilar-pilar tersebut, masing-masing dapat memberikan dampak eksternalitas terhadap kelompok lain di luar kelompok sasaran. Oleh karenanya, untuk mengukur dimensi kedua ini, dimensi ini diturunkan ke dalam 3 indikator, yaitu pengaruh dari Bina Ekonomi, Bina Sosial, dan Bina Fisik Lingkungan terhadap kelompok di luar kelompok sasaran.

Pada Bina Ekonomi, program PPMK memberikan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dari program ini. Dari pinjaman dana bergulir tersebut, diharapkan timbul usaha-usaha kecil dan usaha mikro di kalangan masyarakat sehingga masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dapat berdaya dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, bagi masyarakat di luar kelompok sasaran, maka hal tersebut dapat memberikan dampak ikutan bagi mereka, di mana dengan adanya usaha-usaha kecil maupun mikro yang baru bermunculan tersebut, masyarakat di luar kelompok sasaran menjadi lebih mudah dalam mengakses dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Indikator pertama ini diturunkan kembali ke dalam 1 sub-indikator, yaitu kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya pembukaan usaha mikro di lingkungan sekitar.

a. Kemudahan Dalam memenuhi kebutuhan Sehari-hari Dengan Adanya Usaha Mikro di Lingkungan Sekitar

Dari sub-indikator kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya usaha mikro di lingkungan sekitar, kemudian, sub-indikator ini diturunkan menjadi satu pernyataan dalam suatu kuisioner. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 50 responden non-pemanfaat di Kelurahan Bukit Duri, mayoritas para responden menjawab setuju terhadap pernyataan “anda menjadi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena adanya usaha-usaha mikro yang didanai oleh dana PPMK di kelurahan ini”. Akan tetapi, 18 responden non-pemanfaat lainnya memberikan jawaban tidak setuju atas pernyataan tersebut. Sedangkan sisanya, sejumlah 2 responden memberikan jawaban sangat setuju dan 1 responden memberikan jawaban sangat tidak setuju.



Gambar 5.22 Kemudahan dalam Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari Dengan Adanya Usaha Mikro di Lingkungan Sekitar
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Dominasi jawaban setuju oleh mayoritas responden didukung oleh beberapa pernyataan dari para responden nonpemanfaat yang diteliti di lapangan. Salah satu pernyataan tersebut berasal dari Bapak Legiman, warga RT 01 RW 08, kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Dari kegiatan Bina Ekonomi, responden merasa dengan adanya pinjaman dana bergulir dari PPMK, timbul usaha-usaha mikro di lingkungannya dan hal tersebut memudahkan responden dalam membeli kebutuhan-kebutuhannya sehari-hari, seperti membeli nasi udak unuk sarapan, dan kebutuhan-kebutuhan kecil lainnya dari warung kelontong yang muncul karena adanya pinjaman dana PPMK. Bapak Legiman menyatakan :

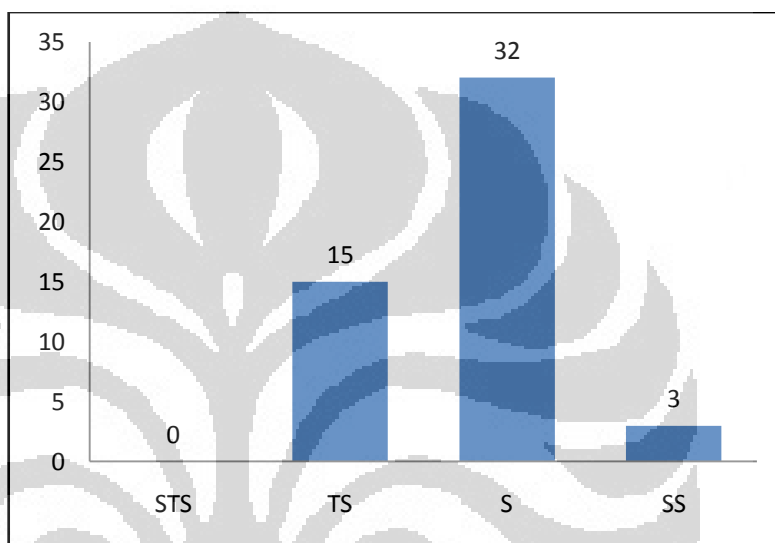
“lumayan, ada yang jualan nasi udak, terus juga ada yang dagang-dagang warung. Waktu itu setau saya yang jualan nasi udak itu pernah minjem PPMK, dapet pinjaman Rp 700.000,- kalau ga salah. Jadinya lumayan lah buat sarapan pagi ga usah nyari jauh-jauh”. (Hasil wawancara dengan Bapak Legiman, 14 Maret 2012)

Indikator kedua dari dimensi pengaruh PPMK terhadap kelompok di luar kelompok sasaran adalah pengaruh dari Bina Sosial terhadap kelompok di luar kelompok sasaran. Bina Sosial PPMK merupakan suatu kegiatan pemberian modal sosial bagi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Modal sosial tersebut dapat berupa pembentukan forum musyawarah dan penguatan kelembagaan, pelatihan keterampilan bagi para pengangguran, pembinaan dan penyuluhan narkoba, serta pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Dengan adanya kegiatan pemberian pelatihan bagi para pengangguran yang menjadi kelompok sasaran, hal tersebut diharapkan dapat memberikan keahlian baru kepada para pengangguran sehingga tingkat pengangguran pun dapat berkurang di lingkungan kelurahan yang bersangkutan. Namun, selain memberikan dampak kepada pengangguran yang menjadi kelompok sasaran, hal tersebut juga dapat memberikan dampak kepada masyarakat lain yang tidak menjadi kelompok sasaran. Pada akhirnya, indikator kedua ini diturunkan ke dalam sub-indikator yang berhubungan dengan dampak eksternalitas dari Bina Sosial, yaitu kemudahan untuk memanfaatkan tenaga terampil di lingkungan sekitar, serta perbaikan rasa aman terhadap tindak kejahatan di lingkungan sekitar.

a. Kemudahan Untuk Memanfaatkan Tenaga Terampil di Lingkungan Sekitar

Pernyataan “anda menjadi lebih mudah dalam memanfaatkan tenaga terampil di lingkungan anda sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan yang menjelaskan mengenai sub-indikator kemudahan untuk memanfaatkan tenaga terampil di lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden nonpemanfaat, didapatkan informasi bahwa ternyata kegiatan pelatihan keterampilan yang diadakan oleh Bina Sosial PPMK dirasa juga memberikan pengaruh terhadap mayoritas responden nonpemanfaat. Sejumlah 32 responden

nonpemanfaat memberikan pernyataan setuju atas pernyataan “anda menjadi lebih mudah dalam memanfaatkan tenaga terampil di lingkungan anda sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Namun, 15 responden nonpemanfaat memberikan pernyataan tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 3 responden nonpemanfaat memberikan pernyataan sangat setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.23 di bawah ini.



Gambar 5.23 Kemudahan Untuk Memanfaatkan Tenaga Terampil di Lingkungan Sekitar
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Salah satu responden yang merasakan adanya kemudahan dalam memanfaatkan tenaga terampil di lingkungan para responden karena adanya pelatihan keterampilan di lingkungannya adalah Ibu Tati Pratiwi. Responden tersebut merasa, dengan adanya pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu di lingkungan tempatnya berkediaman, seperti pelatihan pembuatan makanan pempek, responden menjadi lebih mudah untuk mencari tenaga terampil untuk keperluan tertentu. Hal tersebut diutarakan oleh responden tersebut sebagai berikut. :

“di sini kegiatan keterampilan PPMK lebih banyak buat ke ibu-ibu, kayak bikin manik-manik, jepit rambut buat kerudung,

kerajinan bunga. Trus juga kemaren sempet pada bikin pempek. Ya lumayanlah, kalau ada acara-acara hajatan di rumah ga usah jauh-jauh mau pesen pempek di mana, hehe".(Hasil wawancara dengan Ibu Tati Pratiwi, 27 Maret 2012)

b. Perbaikan Rasa Aman Terhadap Tindak Kejahatan di Lingkungan Sekitar

Sub-indikator kedua dari indikator pengaruh dari Bina Sosial terhadap kelompok di luar kelompok sasaran adalah perbaikan rasa aman terhadap tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Pada dasarnya, pengangguran sangat berpotensi untuk melakukan tindak kejahatan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dengan adanya kegiatan Bina Sosial pemberian pelatihan dan keterampilan kepada para pengangguran, maka para pengangguran diharapkan dapat lebih mudah mencari pekerjaan sehingga tingkat pengangguran dapat menurun dan tingkat kejahatan pun juga dapat menurun. Selain itu, pembinaan dan penyuluhan akan bahaya narkoba kepada para warga, khususnya para pemuda, juga dapat mengurangi bahaya narkoba yang mengancam keamanan suatu kelurahan. Pada akhirnya, sub-indikator tersebut diturunkan ke dalam satu pernyataan, yaitu "anda merasa kelurahan anda menjadi lebih aman dari tindak kejahatan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini".

Berdasarkan hasil temuan lapangan, jawaban mayoritas responden nonpemanfaat adalah setuju dengan pernyataan tersebut. Terdapat 32 responden nonpemanfaat yang memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan "anda merasa kelurahan anda menjadi lebih aman dari tindak kejahatan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini". Akan tetapi, sejumlah 13 responden nonpemanfaat memberikan jawaban tidak setuju. Sisanya, 3 responden memberikan jawaban sangat tidak setuju dan 2 responden memberikan jawaban sangat setuju.

Salah satu responden yang memberikan jawaban setuju adalah Bapak Karno. Bapak Karno merupakan warga kelurahan Bukit Duri yang berdomisili di RT 02, RW 08. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengannya, Bapak Karno mengakui bahwa dengan adanya pelatihan keterampilan kepada para pengangguran, para pengangguran di sekitar tempat kediamannya menjadi mendapatkan keterampilan baru dan para pengangguran pun menjadi lebih mudah dalam mencari pekerjaan. Pada akhirnya, dengan berkurangnya para pengangguran, keamanan di lingkungan sekitar kediaman Bapak Karno pun menjadi lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataannya di bawah ini.

“PPMK kan salah satunya ada pelatihan-pelatihan. Ya, lumayan lah buat bantu-bantu cari kerja, apalagi sekarang kan cari kerja itu susah. Jadi mereka lebih gampang nyari kerjanya, pengangguran berkurang, jadi ga ada lagi deh tuh yang main togel sambil mabuk-mabukan”.(Hasil wawancara dengan Bapak Karno Partiarso, 14 Maret 2012)



Gambar 5.24 Perbaikan Rasa Aman terhadap Tindak Kejahatan di Lingkungan Sekitar
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Indikator ketiga dari dimensi pengaruh PPMK terhadap kelompok di luar kelompok sasaran adalah pengaruh dari Bina Fisik terhadap kelompok di luar kelompok sasaran. Bina Fisik Lingkungan merupakan suatu kegiatan pemberian bantuan perbaikan sarana dan pra sarana fisik yang bersifat mikro di lingkungan setingkat Rukun Warga (RW) yang didahului forum musyawarah warga yang membicarakan mengenai kebutuhan pembangunan bagi warga. Dengan adanya pembentukan forum musyawarah tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih mudah dalam berpartisipasi untuk pembangunan karena pada dasarnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu prasyarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan di Indonesia (Soetrisno, 1995:206). Hal tersebut pun tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran PPMK tetapi juga masyarakat pada umumnya. Selain itu, dalam kegiatan perbaikan tersebut, sarana dan pra sarana fisik yang dimungkinkan untuk mendapatkan dana perbaikan adalah perlengkapan penanggulangan bencana (perahu karet, alat pemadam kebakaran), prasarana perhubungan (jalan setapak, jembatan kecil), sarana sanitasi, sarana kebersihan, fasilitas umum (balai warga, kantor RW), fasilitas pendukung kegiatan Posyandu, fasilitas olahraga, peralatan dan pelatihan kesenian, serta penyediaan fasilitas lingkungan (lubang biopori dan sumur resapan air). Beberapa perbaikan fisik lingkungan tersebut tentu saja tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat di luar kelompok sasaran. Oleh karenanya, indikator ketiga ini diturunkan kembali menjadi beberapa sub-indikator yang berhubungan dengan dampak eksternalitas yang mungkin terjadi dan diakibatkan oleh Bina Fisik Lingkungan, yaitu perbaikan kemampuan (hak) untuk berpartisipasi di lingkungan sekitar, peningkatan komunikasi antarwarga, kemudahan dalam mengakses fasilitas olahraga, kemudahan dalam mengakses fasilitas kesenian, kemudahan dalam melakukan mobilisasi dengan adanya perbaikan sarana perhubungan,

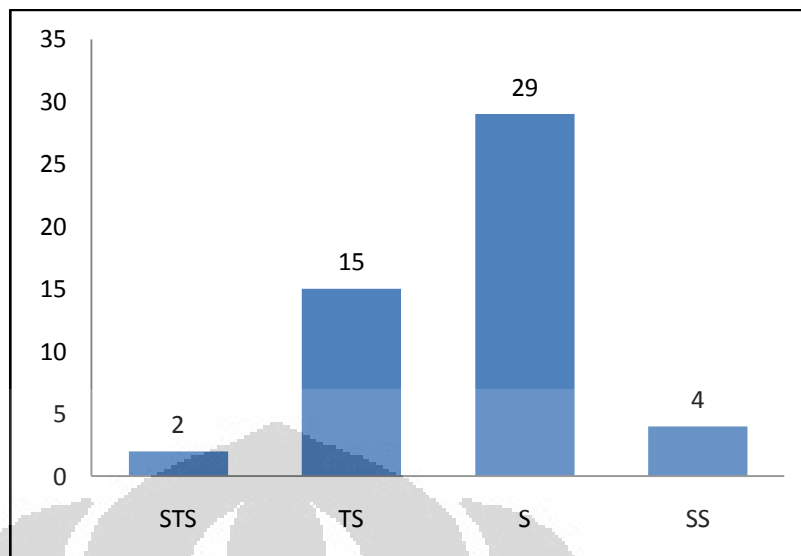
serta adanya peningkatan rasa nyaman terhadap kondisi lingkungan sekitar.

a. Perbaikan Kemampuan (hak) Untuk Berpartisipasi di Lingkungan Sekitar

“Anda menjadi lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan Anda sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan yang menjelaskan mengenai sub-indikator perbaikan kemampuan (hak) untuk berpartisipasi di lingkungan sekitar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden nonpemanfaat, sejumlah 29 responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan tersebut. Namun, sejumlah 15 responden nonpemanfaat memberikan jawaban tidak setuju. Sisanya, sejumlah 4 responden nonpemanfaat memberikan jawaban sangat setuju dan 2 responden nonpemanfaat memberikan jawaban sangat tidak setuju.

Dengan adanya pelaksanaan forum musyawarah masyarakat mengenai pembangunan di lingkungan mereka, para responden nonpemanfaat juga merasakan adanya pengaruh yang dapat dirasakan. Dengan adanya musyawarah tersebut, seluruh kalangan masyarakat, yang menjadi kelompok sasaran maupun bukan kelompok sasaran diberikan kebebasan untuk berbicara mengenai kebutuhan lingkungannya di forum tersebut. Pada akhirnya, mayoritas responden nonpemanfaat pun menjadi lebih mudah dalam mengutarakan kebutuhan pembangunan di lingkungannya. Salah satu responden, yaitu Bapak Karno, menyatakan :

“antar RT sama beberapa kalangan masyarakat suka rapat sama Dekel sini. Biasanya di rolling, jadi pada tau kebutuhan masing-masing RT apa aja. Jadi semuanya juga ngerti ini dana PPMK mestinya dipake kemana”. (Hasil wawancara dengan Bapak Karno Partiarso, 14 Maret 2012)



Gambar 5.25 Perbaikan Kemampuan (hak) Untuk Berpartisipasi di Lingkungan Sekitar
(n=50)

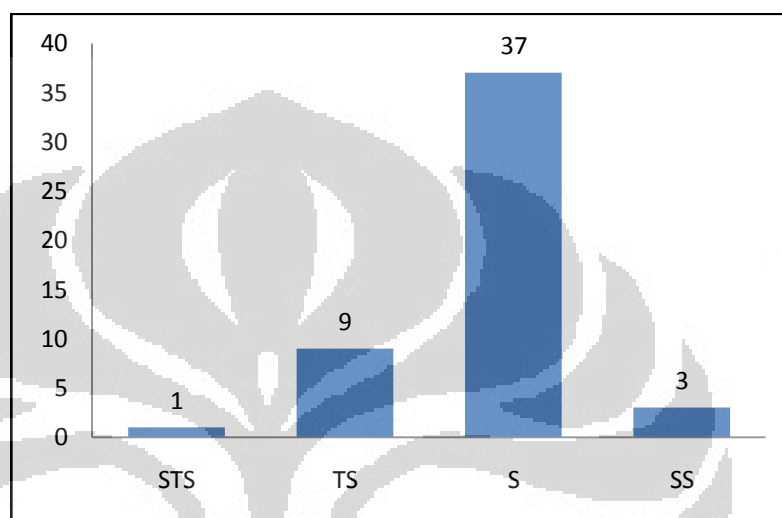
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

b. Peningkatan Komunikasi Antarwarga

Sub-indikator kedua dari indikator pengaruh Bina Fisik terhadap kelompok di luar kelompok sasaran adalah peningkatan komunikasi antarwarga. Sub-indikator tersebut kemudian diturunkan kembali ke dalam satu pernyataan, yaitu “anda merasa adanya peningkatan komunikasi antarwarga sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 50 responden nonpemanfaat, sejumlah 37 responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 9 responden memberikan jawaban tidak setuju, 3 responden memberikan jawaban sangat setuju, dan 1 responden memberikan jawaban sangat tidak setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.26.

Salah satu responden nonpemanfaat yang merasakan adanya peningkatan komunikasi antarwarga sejak dilaksanakannya PPMK adalah Bapak Iwan. Responden tersebut adalah warga RT 01, RW 01, Kelurahan Bukit Duri. Responden menyatakan :

“di sini, biasanya setiap bulan ada rapat antar RT buat buat ngomongin masalah-masalah dari tiap-tiap RT. Nah gara-gara itu kita jadi sering ketemu, ngobrol sesama warga. Kita juga jadi tahu masalah-masalah apa yang lagi dialami dari tiap-tiap RT ”. (Hasil wawancara dengan Bapak Iwan, 8 Maret 2012)



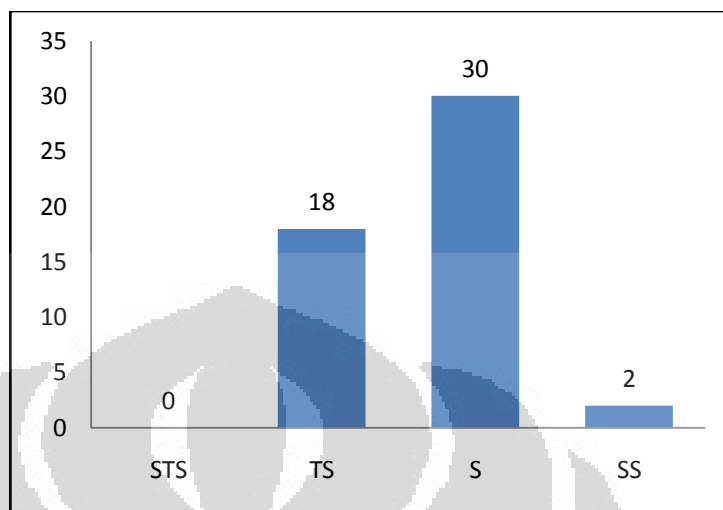
Gambar 5.26 Peningkatan Komunikasi Antarwarga
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

c. Kemudahan Dalam Mengakses Fasilitas Olahraga

Pernyataan “anda menjadi lebih mudah dalam mengakses fasilitas olahraga di kelurahan anda sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan yang menjelaskan sub-indikator ketiga dari indikator pengaruh Bina Fisik terhadap kelompok di luar kelompok sasaran, yaitu kemudahan dalam mengakses fasilitas olahraga. Berdasarkan wawancara terhadap 50 responden nonpemanfaat, sejumlah 30 responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan tersebut. Delapan belas responden nonpemanfaat lainnya memberikan jawaban tidak setuju. Sisanya, sejumlah 2 responden memberikan jawaban sangat setuju terhadap pernyataan “anda menjadi lebih mudah dalam mengakses fasilitas olahraga di kelurahan anda sejak

dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5.27 di bawah ini.



Gambar 5.27 Kemudahan Dalam Mengakses Fasilitas Olahraga (n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, berdasarkan hasil temuan lapangan, mayoritas responden nonpemanfaat berpendapat bahwa mayoritas responden nonpemanfaat menjadi lebih mudah dalam mengakses fasilitas olahraga dengan adanya pengadaan sarana olahraga oleh PPMK. Salah satu responden yang ditemui di lapangan, yaitu Bapak Iwan, menyatakan :

“Ada tuh, tiang futsal, trus juga meja ping pong dari PPMK. Semuanya di taro di Gedung PKK, di dekat Posyandu situ. Kalau mau olahraga jadi tinggal ke sana aja”.(Hasil wawancara dengan Bapak Iwan, 8 Maret 2012)

Akan tetapi, tidak semua responden merasakan manfaat dari adanya pengadaan fasilitas olahraga yang dilakukan dengan menggunakan dana Bina Fisik Lingkungan PPMK tersebut. Beberapa responden yang ditemui di lapangan merasa pengadaan fasilitas olahraga tersebut adalah sia-sia. Salah satunya adalah Bapak Muhadi. Bapak Muhadi menyatakan :

“Emang ada penyediaan-penyediaan fasilitas olahraga dari PPMK, seperti tiang gawang untuk futsal, net bulu tangkis, sama perlengkapan untuk tenis meja. Tapi ya ujung-ujungnya ga kepake juga, soalnya ga ada lapangannya juga disini. Ada tiang gawang tapi ga tau mau dipake dimana. Lapangan bulu tangkis juga di sini ga ada. Meja ping pong juga sama, bingung mau digelar di mana. Ya ujung-ujungnya peralatan olahraganya didiemin aja di gudang”(hasil wawancara dengan Bapak Muhadi, 30 Maret 2012).

d. Kemudahan Dalam Mengakses Fasilitas Kesenian

Sub-indikator keempat dari indikator pengaruh Bina Fisik terhadap kelompok di luar kelompok sasaran adalah kemudahan dalam mengakses fasilitas kesenian. Sub-indikator tersebut kemudian diturunkan menjadi satu pernyataan dalam kuisisioner yang disebarakan kepada 50 responden nonpemanfaat. Sejumlah 26 responden nonpemanfaat yang ditemui di lapangan memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan “anda menjadi lebih mudah dalam mengakses fasilitas kesenian di kelurahan anda sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Tiga belas responden nonpemanfaat lainnya pun memberikan jawaban sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 10 responden memberikan jawaban setuju dan satu responden memberikan jawaban sangat setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.28.

Dominasi jawaban tidak setuju yang diberikan oleh para responden nonpemanfaat, menurut pengamatan peneliti, dikarenakan tidak adanya perbaikan fasilitas kesenian yang diselenggarakan oleh kegiatan Bina Fisik Lingkungan PPMK di kelurahan Bukit Duri. Dengan tidak adanya perbaikan fasilitas kesenian di kelurahan Bukit Duri, para responden nonpemanfaat pun menjadi tidak dapat merasakan pengaruh apa-apa. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari salah satu responden, yaitu Bapak

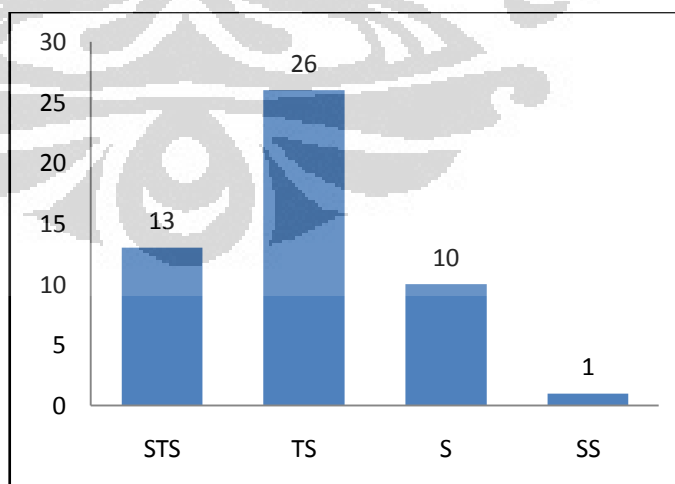
Abdul Rahman, warga RT 10, RW 12, Kelurahan Bukit Duri.

Bapak Abdul Rahman menyatakan :

“disini sih ga ada fasilitas kesenian apa-apa. Paling adanya Sanggar Ciliwung, di daerah bawah situ. Yang mimpin namanya Romo. Itu terkenal loh, ada les-les nari, main musik segala di sana. Tapi setau saya sih orang kelurahan juga ga pernah ngasih bantuan apa-apa ke Romo. Malah, biasanya Romo yang nyari bantuan kesana kemari buat sanggarnya”. (Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rahman, 24 Februari 2012)

Selain Bapak Abdul Rahman, salah satu responden nonpemanfaat lainnya, yaitu Ibu Lina, warga RT 10, RW 02, Kelurahan Bukit Duri juga merasa tidak adanya dana hibah Bina Fisik Lingkungan PPMK yang dialokasikan untuk perbaikan fasilitas kesenian di lingkungan kediaman warga. Hal tersebut diutarakan dalam pernyataannya sebagai berikut.

“Kalo kesenian sih paling dulu adanya marawis, tapi udah ga pernah jalan lagi. Saya juga ga pernah denger tuh ada bantuan dana Bina Fisik PPMK buat mereka.” (Hasil wawancara dengan Ibu Lina, 20 Maret 2012)

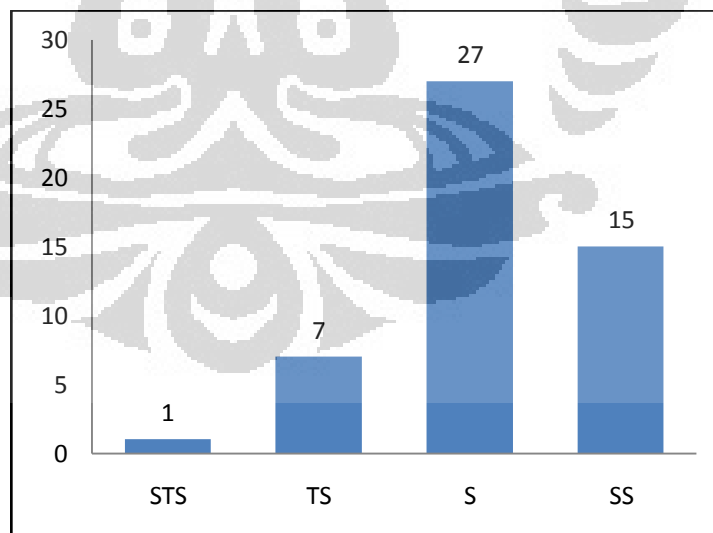


Gambar 5.28 Kemudahan Dalam Mengakses Fasilitas Kesenian
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

e. Kemudahan Dalam Melakukan Mobilisasi dengan Adanya Perbaikan Sarana Perhubungan

Pernyataan “anda menjadi lebih mudah dalam melakukan mobilisasi di kelurahan anda sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan yang menjelaskan sub-indikator kelima dari indikator pengaruh Bina Fisik terhadap kelompok di luar kelompok sasaran, yaitu kemudahan dalam melakukan mobilisasi dengan adanya perbaikan sarana perhubungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden nonpemanfaat, mayoritas responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan tersebut, yaitu sejumlah 27 responden. Lima belas responden lainnya memberikan jawaban sangat setuju terhadap pernyataan “anda menjadi lebih mudah dalam melakukan mobilisasi di kelurahan anda sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Akan tetapi, sejumlah 7 responden memberikan jawaban tidak setuju dan 1 responden memberikan jawaban sangat tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.29 di bawah ini.



Gambar 5.29 Kemudahan Dalam Melakukan Mobilisasi dengan Adanya Perbaikan Sarana Perhubungan (n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Salah satu responden nonpemanfaat, yaitu Bapak Legiman, merasakan dampak yang diakibatkan kegiatan perbaikan sarana perhubungan Bina Fisik Lingkungan PPMK. Bapak Legiman menyatakan :

“lumayan lah, gang-gang jadi bagus, jadi pada diaspalin. Terus juga di sini gang-gang kecil yang gelap-gelap dikasih lampu. Jadi kan lebih aman, ibu-ibu yang biasanya pulang kantor malam ga harap-harap cemas lagi kan kalau mau lewat”.(Hasil wawancara dengan Bapak Legiman, 14 Maret 2012)

Selain Bapak Legiman, Bapak Karno, warga RT 02, RW 08, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan juga memberikan pendapatnya mengenai perbaikan sarana perhubungan yang dilakukan oleh PPMK. Responden tersebut merasa dengan adanya perbaikan sarana perhubungan oleh PPMK, jalan-jalan di lingkungan tempat responden berkediaman menjadi lebih nyaman dan lebih terawat. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataannya sebagai berikut.

“Ya, tadinya yang jalan-jalan di sini pada berlubang, di tambal sulam lagi pake dana Bina Fisik. Kan kita jadinya enak kalau mau jalan. Ga perlu repot-repot ngindarin lubang.”
(Hasil wawancara dengan Bapak Karno, 14 Maret 2012)

Namun, pelaksanaan perbaikan sarana perhubungan di Kelurahan Bukit Duri tidak dirasakan manfaatnya oleh seluruh responden. Salah satu responden yang tidak merasakan manfaat dari adanya perbaikan sarana perhubungan oleh dana Bina Fisik Lingkungan PPMK di Kelurahan Bukit Duri adalah Bapak Muhadi. Bapak Muhadi yang merupakan warga RT 02, RW 06, Kelurahan Bukit Duri merasa perbaikan-perbaikan dengan menggunakan dana Bina Fisik Lingkungan PPMK di RW 06, khususnya perbaikan sarana perhubungan, dilakukan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan para petinggi di lingkungan RW-nya. Menurut pengamatan Bapak Muhadi, hanya jalan-jalan yang berada di lingkungan rumah Ketua

RW dan Ketua RT saja yang diperbaiki sehingga Bapak Muhadi pun tidak merasakan manfaat dari perbaikan sarana perhubungan tersebut. Informasi tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Muhadi di bawah ini.

“Kalau disini mah, jalan-jalan yang diperbaiki biasanya di RT itu-itu aja. Biasanya di RT 03, 04, 05, sama 06. Soalnya Bapak RW-nya tinggal di situ. Di RT situ juga banyak yang dekat sama Pak RW, makanya jalannya dibenerin terus. Tapi ngakunya sih skala prioritas.” (Hasil wawancara dengan Bapak Muhadi, 30 Maret 2012)

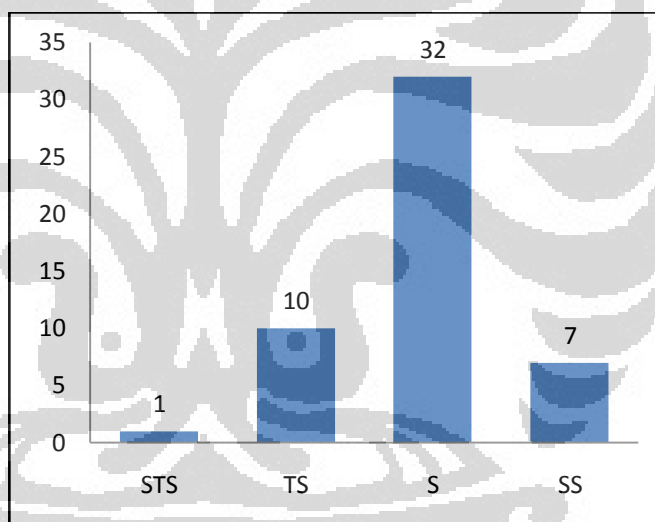
f. Peningkatan Rasa Nyaman terhadap Kondisi Lingkungan Sekitar

Sub-indikator terakhir dari indikator pengaruh Bina Fisik Lingkungan terhadap kelompok di luar kelompok sasaran adalah peningkatan rasa nyaman terhadap kondisi lingkungan sekitar. Sub-indikator tersebut kemudian diturunkan kembali ke dalam pernyataan “anda menjadi lebih nyaman dengan kondisi lingkungan di kelurahan Anda sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 50 responden, sejumlah 32 responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan tersebut. Sepuluh responden lainnya memberikan jawaban tidak setuju, 7 responden lainnya memberikan jawaban sangat setuju, dan sisanya, sejumlah 1 responden memberikan jawaban sangat tidak setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.30.

Dominasi jawaban setuju yang diberikan oleh para responden nonpemanfaat dikarenakan seringnya perbaikan sarana lingkungan dengan menggunakan dana hibah Bina Fisik Lingkungan PPMK di Kelurahan Bukit Duri, seperti pengadaan pot-pot bunga, penghijauan, pembuatan daerah resapan, dan pembuatan lubang biopori. Dengan adanya perbaikan sarana lingkungan tersebut, masyarakat pun merasa menjadi lebih nyaman dengan kondisi lingkungan mereka. Bapak Legiman, salah satu responden yang

ditemui di lapangan, menjelaskan bahwa kegiatan Bina Fisik Lingkungan PPMK di lingkungan RW tempatnya berkediaman rutin memberikan bantuan pengadaan pot-pot bunga, khususnya di daerah pinggiran rel. Responden tersebut juga merasa, dengan adanya penataan pot-pot bunga di daerah pinggiran rel, hal tersebut menambah nilai estetika dari lingkungan tempatnya berkediaman. Hal tersebut diutarakan dalam pernyataan sebagai berikut.

“Iya, di sini pernah di kasih pot-pot bunga sama PPMK. Biasanya di taro di pinggir-pinggir rel di bawah situ. Tapi sayang, sama masyarakat kurang dirawat. Pas awal-awal dikasih aja semangat, disiram-in segala. Tapi lama-lama suka dibiarin aja tuh”. (Hasil wawancara dengan Bapak Legiman, 14 Maret 2012)



Gambar 5.30 Peningkatan Rasa Nyaman terhadap Kondisi Lingkungan Sekitar
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

5.2.2.1 Analisis Dimensi Pengaruh PPMK terhadap Kelompok di Luar Kelompok Sasaran

Berdasarkan jawaban dari para responden nonpemanfaat terhadap 9 pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya, jawaban-jawaban tersebut kembali diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 19 untuk mendapatkan

tanggapan para responden terhadap dimensi pengaruh PPMK terhadap kelompok di luar kelompok sasaran. Jawaban atas kesembilan pernyataan tersebut digabungkan menjadi satu dengan menggunakan kategori baru, yaitu kategori positif dan kategori negatif. Skala penilaian kategori positif dan negatif untuk dimensi pengaruh PPMK terhadap kelompok di luar kelompok sasaran didapatkan dari hasil penghitungan sebagai berikut.

$$RS = (m-n)/b,$$

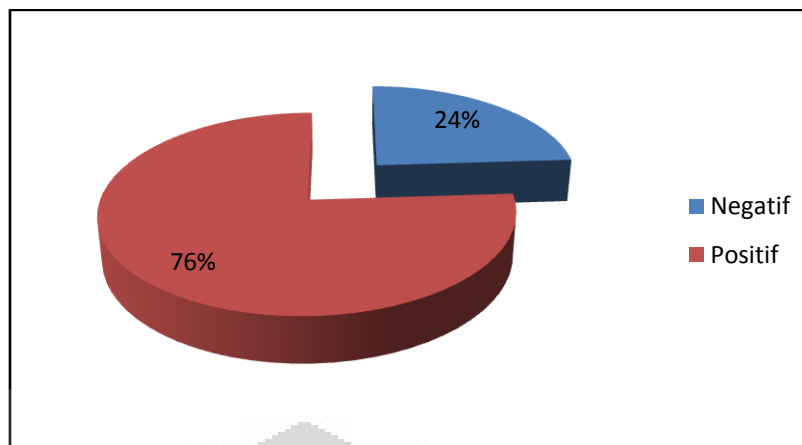
dimana **m** adalah nilai tertinggi yang mungkin; **n** adalah nilai terendah yang mungkin; **b** adalah jumlah kelas. Sehingga **RS** = $(36-9)/2 = 13,5$

Tabel 5.2 Pembagian Kelas Analisis Deskriptif Mean

Kategori	Batasan
Negatif	$9 < x \leq 22$
Positif	$23 < x \leq 36$

Sumber : telah diolah kembali

Berdasarkan Tabel 5.2, dapat dikatakan bahwa PPMK dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kelompok di luar kelompok sasaran jika penghitungan pada aplikasi SPSS berada pada rentang nilai 23 hingga 36. Sebaliknya, PPMK dikatakan memberikan pengaruh yang negatif terhadap kelompok sasaran jika penghitungan pada aplikasi SPSS berada pada rentang nilai 9 hingga 22. Pada Gambar 5.31 akan dijelaskan mengenai hasil olahan data untuk dimensi pengaruh PPMK terhadap kelompok sasaran.



Gambar 5.31 Pengaruh PPMK terhadap Kelompok di Luar Kelompok Sasaran
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Berdasarkan Gambar 5.31 di atas, dapat diketahui bahwa dari total 50 responden nonpemanfaat yang ditemui di lapangan, sejumlah 76%, atau 38 responden nonpemanfaat memberikan tanggapan positif. Artinya, sejumlah 38 responden merasa adanya pengaruh PPMK terhadap para responden nonpemanfaat, yang merupakan kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran PPMK. Sedangkan sisanya, sejumlah 24%, atau 12 responden memberikan tanggapan negatif terhadap pengaruh PPMK terhadap para responden nonpemanfaat.

5.2.3 Dimensi Keadaan yang Diharapkan di Masa Kini

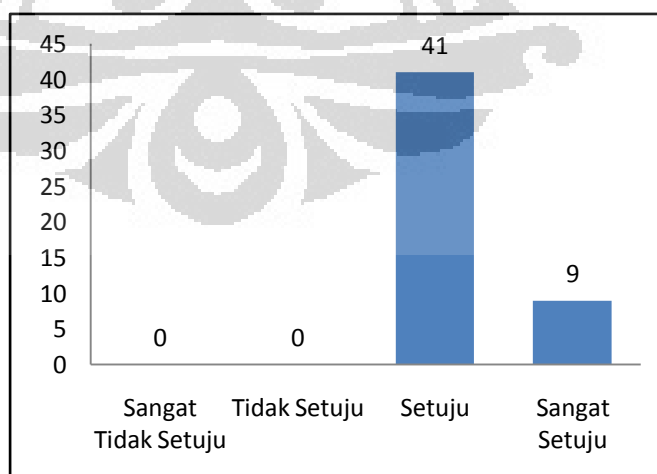
Dimensi ketiga dari variabel dampak program PPMK pada penelitian ini adalah keadaan PPMK di masa kini. Untuk mengukurnya, dimensi ketiga ini diturunkan ke dalam 3 indikator berdasarkan ruang lingkup dari PPMK, yaitu Bina Ekonomi, Bina Sosial, dan Bina Fisik Lingkungan.

Indikator pertama dari dimensi keadaan PPMK di masa kini adalah keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Ekonomi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, Bina Ekonomi merupakan suatu kegiatan penyediaan dana bergulir untuk modal usaha dan modal kerja. Dari adanya kegiatan Bina Ekonomi ini, diharapkan adanya penyediaan pinjaman dana bergulir untuk modal usaha dan modal kerja di kalangan masyarakat kelurahan, khususnya untuk usaha kecil dan mikro. Oleh karenanya, indikator ini diturunkan ke dalam sub-indikator adanya penyediaan dana bergulir untuk modal usaha dan modal kerja. Kemudian, sub-indikator tersebut diturunkan kembali menjadi 1 pernyataan dalam kuisisioner yang disebarakan kepada masyarakat.

a. Adanya Penyediaan Dana Bergulir Untuk Modal Usaha dan Modal Kerja

Pernyataan dari sub-indikator adanya penyediaan dana bergulir untuk modal usaha dan modal kerja adalah “adanya penyediaan dana bergulir untuk modal usaha sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Dari 50 responden pemanfaat, mayoritas responden, atau sejumlah 41 responden pemanfaat merasa setuju dengan pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 9 responden pemanfaat merasa sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.32 di bawah ini.



Gambar 5.32 Adanya Penyediaan Dana Bergulir untuk Modal Usaha dan Modal Kerja

(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Dominasi jawaban setuju yang diberikan oleh mayoritas responden dikarenakan pada fakta bahwa pemberian pinjaman dana bergulir Bina Ekonomi PPMK memang telah dilaksanakan di Kelurahan Bukit Duri sejak tahun 2003. Pemberian pinjaman tersebut diberikan kepada warga yang berdomisili di Kelurahan Bukit Duri yang memiliki usaha berskala kecil maupun mikro. Manfaat dari kegiatan Bina Ekonomi ini juga telah dirasakan oleh para responden. Salah satu responden yang telah memanfaatkan pinjaman dana bergulir Bina Ekonomi dan merasakan manfaatnya adalah Bapak Abdullah. Responden tersebut menyatakan :

“iya di sini memang ada pemberian pinjaman dana bergulir dari Dewan Kelurahan. Saya sudah 3 kali minjem, buat usaha ATK saya. Tapi saya lupa tahun berapa. Pinjaman pertama saya dikasih Rp 2.000.000,-. Terus alhamdulillah saya balikannya lancar, jadi tahun berikutnya pas saya mau minjem lagi saya dikasih kepercayaan dipinjemin Rp 5.000.000,-. Tahun berikutnya lagi saya pinjem lagi saya dikasih Rp 5.000.000,- lagi”. (Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, 30 Maret 2012

Akan tetapi, pada prakteknya, pinjaman dana bergulir Bina Ekonomi banyak mengalami kesulitan dalam pengembaliannya. Banyak masyarakat yang merasa bahwa dana Bina Ekonomi merupakan dana hibah bagi masyarakat kelurahan sehingga masyarakat enggan mengembalikannya. Padahal, dana Bina Ekonomi merupakan dana bergulir, di mana dana tersebut digulirkan secara bergantian kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal tersebut juga diperparah dengan unsur keenganan para Dewan Kelurahan untuk menagih secara paksa para pemanfaat dengan alasan “*tetangga*”. Pada akhirnya, tidak sedikit dana Bina Ekonomi yang masih beredar di masyarakat. Bapak Harsono, sebagai mantan Ketua Dewan Kelurahan Bukit Duri menyatakan :

“yaaa, kayak ga tau masyarakat aja. Pada kenyataannya masih banyak aja dana yang macet. Pada males ngembaliin

sih. Mereka semua pada bilang ini kan dana hibah, ngapain dibalikin lagi. Padahal kan engga. Ini dana bergulir, dikembalikan dulu ke Dewan Kelurahan terus baru diputer lagi ke masyarakat, maksimal seorang dapet jatah untuk minjem sampe 5 kali. Tapi pada bandel sih Dek. Ya gini deh jadinya. Lagian ya saya juga ga enak nagihannya terus, namanya juga hidup satu kelurahan, pasti kenal-kenal lah. Kalo saya tagihin terus nanti saya dibilang cerewet. Jadi yaudah saya diemin aja, tunggu dia sadar sendiri aja”(hasil wawancara dengan Bapak Harsono, 22 November 2011).

Selain Bapak Harsono, Bapak Abdullah, salah satu responden yang diwawancarai di lapangan, juga turut memperkuat penjelasan di atas dengan menyatakan :

“saya sih balikannya lancar. Tapi yang minjem kan bukan saya aja. Yang lain juga pada minjem tapi banyak yang ga dibalik-balikin. Akhirnya dananya pada macet. Kan kasian orang yang udah minjem trus balikannya lancar kayak saya, jadinya kedepannya pas mau minjem agak dipersulit juga, malah gara-gara itu sekarang pinjaman dana bergulirnya dibikin di Koperasi”.

Lemahnya posisi Dewan Kelurahan dalam menarik kembali dana Bina Ekonomi dari masyarakat membuat pengelolaan pinjaman dana bergulir Bina Ekonomi dialihkan dari Dewan Kelurahan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan sejak tahun 2007. Namun, sejak berdirinya Koperasi Jasa Keuangan, Bapak Abdullah sebagai salah satu pemanfaat Bina Ekonomi mengeluh dengan sistem Koperasi Jasa Keuangan yang lebih rumit dan mengenakan bunga yang cukup memberatkan. Responden tersebut menyatakan :

“sejak berubah jadi koperasi saya jadi pindah ke bank. Soalnya menurut saya minjem koperasi malah lebih berat daripada di bank. Padahal katanya sih sifat peminjamannya syariah, tapi kenyataannya engga tuh. Saya kan pedagang, pas saya hitung-hitung ruginya malah lebih banyak kalau pinjem di Koperasi daripada di Bank. Udah prosesnya lama, belum potongan administrasinya, trus ada bunga nya lagi. Beda

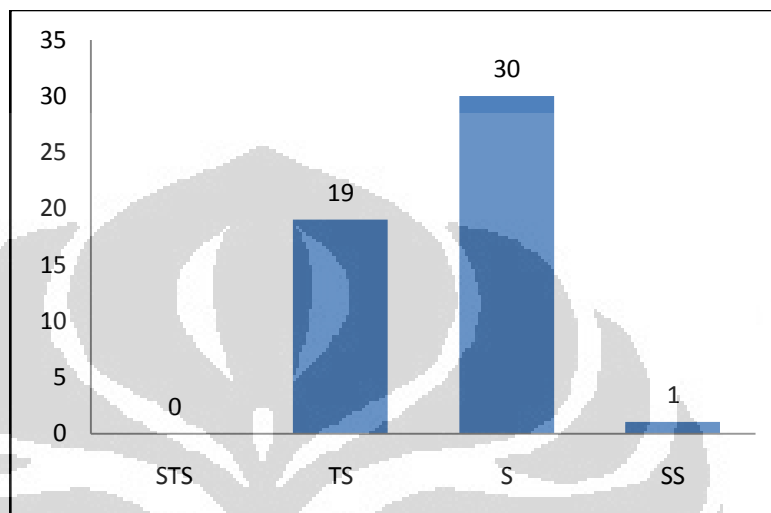
banget sama yang dulu. Mending sama Dewan Kelurahan kemana-mana lah”.(Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, 30 Maret 2012)

Indikator kedua dari dimensi keadaan PPMK di masa kini adalah keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Sosial. Dari adanya kegiatan Bina Sosial ini, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, diharapkan adanya beberapa kegiatan-kegiatan pembinaan di kalangan masyarakat, antara lain kegiatan penguatan kelembagaan dan forum masyarakat, pemberian pelatihan-pelatihan keterampilan bagi warga yang belum memperoleh pekerjaan atau warga yang menginginkan peningkatan ketrampilan, pembinaan dan penyuluhan narkoba di tingkat kelurahan, serta pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana. Oleh karenanya, indikator ini diturunkan kembali ke dalam 4 sub-indikator, yaitu adanya pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan forum musyawarah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, adanya pelatihan keterampilan kepada para pengangguran/pencari kerja, adanya pembinaan dan penyuluhan narkoba pada tingkat kelurahan, dan adanya pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah.

a. Adanya Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Forum Musyawarah dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

Sub-indikator pertama adalah adanya pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan forum musyawarah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sub-indikator tersebut diturunkan kembali ke dalam dua pernyataan untuk menghindari adanya *double-barelled* question. Pernyataan pertama adalah “adanya pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

(PPMK) di kelurahan ini”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 50 responden pemanfaat, sejumlah 30 responden setuju dengan pernyataan tersebut. Akan tetapi, sejumlah 19 responden tidak setuju dan sisanya, sejumlah 1 responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut.



Gambar 5. 33 Adanya Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bina Sosial PPMK antara lain adalah kegiatan pelatihan-pelatihan untuk organisasi-organisasi pemuda di kelurahan setempat. Organisasi pemuda tersebut antara lain adalah Karang Taruna, ORBIT (Organisasi Bukit Duri), dan IKRB (Ikatan Remaja Bukit Duri). Salah satu responden pemanfaat, yaitu Bapak Yusuf, memberikan penjelasan mengenai kegiatan penguatan kelembagaan yang diselenggarakan oleh PPMK sebagai berikut.

“Setau saya sih pernah, waktu itu ada pelatihan-pelatihan dari PPMK buat Orbit (Organisasi Bukit Duri) sama buat IKRB (Ikatan Remaja Bukit Duri). Trus juga ada pelatihan-pelatihan buat Karang Taruna, Ibu-Ibu PKK juga ada”. (Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, 24 Februari 2012)

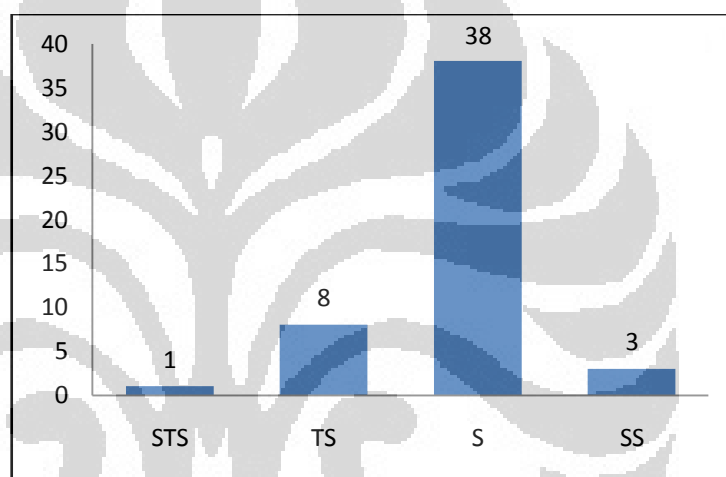
Selain pelatihan untuk para pemuda, pelatihan kelembagaan di Kelurahan Bukit Duri juga diberikan kepada sumber daya manusia yang memiliki pekerjaan di kelurahan setempat yang bertujuan untuk menunjang pekerjaan mereka. Bapak Harsono, sebagai mantan Ketua Dewan Kelurahan Bukit Duri menjelaskan :

“Biasanya pelatihan kelembagaan masyarakat itu untuk mengembangkan masyarakat-masyarakat yang udah kerja, seperti untuk Lurah, PNS-PNS, pengurus RT/RW, dan anggota-anggota Dekel. Di sini mereka diberikan keterampilan tambahan yang bisa menunjang pekerjaan mereka” (hasil wawancara dengan Bapak Harsono, 22 November 2011)..

Pernyataan kedua dari sub-indikator adanya pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan dan forum musyawarah dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah pernyataan “adanya pelaksanaan forum musyawarah sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Berdasarkan hasil wawancara kepada 50 responden pemanfaat, didapatkan fakta bahwa mayoritas responden pemanfaat, yaitu sejumlah 38 responden yang ditemui di lapangan memberikan jawaban setuju dengan pernyataan tersebut. Artinya, sejumlah 38 responden pemanfaat yang ditemui menyetujui adanya pelaksanaan forum musyawarah di lingkungannya sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan tersebut. Akan tetapi, sejumlah 8 responden pemanfaat tidak menyetujui adanya pelaksanaan forum musyawarah sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan Bukit Duri. Sisanya, sejumlah 3 orang memberikan jawaban sangat setuju dan 1 orang memberikan jawaban sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya, pengelompokan jawaban para responden terhadap pernyataan adanya pelaksanaan forum musyawarah sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini dapat dilihat pada Gambar 5.34.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kelimpuluh responden pemanfaat, didapatkan informasi bahwa pelaksanaan forum

musyawarah yang dilakukan di lingkungan para responden yang lazim ditemukan adalah forum-forum musyawarah untuk membicarakan pemilihan pengurus Dewan Kelurahan serta sosialisasi kegiatan Bina Ekonomi. Informasi tersebut didapatkan dari salah seorang responden pemanfaat, yaitu Ibu Desfaridah. Ibu Desfaridah menyatakan, “*Forum-forum musyawarah sih ada, biasanya buat milih-milih anggota Dekel, sama sosialisasi kalau pinjaman dari Dekel mau turun*”. (Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Desfaridah, 30 Maret 2012)



Gambar 5.34 Adanya Pelaksanaan Forum Musyawarah (n=50)

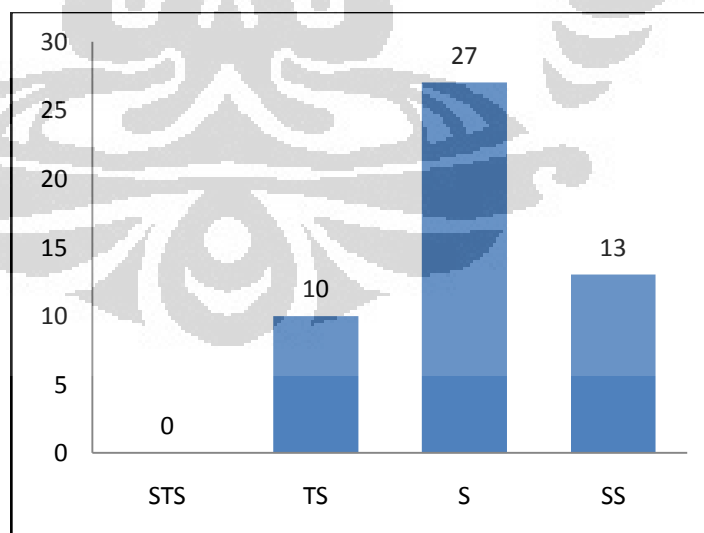
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Akan tetapi, selain ketigapuluhdelapan responden yang menyetujui adanya pelaksanaan forum musyawarah sejak dilaksanakannya PPMK di Kelurahan Bukit Duri, masih ada 8 responden yang tidak menyetujui adanya pelaksanaan forum musyawarah di kelurahan tersebut. Salah satu responden tersebut adalah Bapak Endang. Bapak Endang merasa tidak pernah ada forum musyawarah yang diselenggarakan oleh PPMK di lingkungan kediamannya. Bapak Endang juga menambahkan bahwa anggota Dekel jarang memberikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kinerja anggota Dekel pun dianggap kurang transparan. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan Bapak

Endang yang mengatakan, “Yah, Dekel di sini sih suka maen umpet-umpetan. Mana kita tahu ada forum musyawarah atau engga di sini, orang kita ga pernah dikasih tau”. (Hasil wawancara dengan Bapak Endang, 20 Maret 2012)

b. Adanya Pelatihan Keterampilan kepada Pengangguran dan Pencari Kerja

Sub-indikator kedua dari indikator keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Sosial adalah adanya pelatihan keterampilan kepada para pengangguran atau pencari kerja. Sub-indikator tersebut, kemudian diturunkan kembali ke dalam satu pernyataan dalam kuisioner yang disebarakan kepada 50 responden pemanfaat. Dari kelimpuluh responden pemanfaat tersebut, sejumlah 27 responden memberikan jawaban setuju dengan pernyataan “adanya pelatihan keterampilan kepada para pengangguran sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Sisanya, sejumlah 13 responden memberikan jawaban sangat setuju dan 10 responden memberikan jawaban tidak setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5.35.



Gambar 5.35 Adanya Pelatihan Keterampilan kepada Para Pengangguran atau Pencari Kerja

(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Kegiatan pemberian pelatihan kepada masyarakat pengangguran merupakan salah satu kegiatan utama dari Bina Sosial PPMK. Dengan adanya pemberian pelatihan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat memiliki keahlian yang dapat diandalkan sehingga masyarakat pengangguran pun dapat menggunakan keahlian barunya untuk mendapatkan pekerjaan.

Secara keseluruhan, pelatihan tata boga merupakan salah satu pelatihan ketrampilan yang digemari oleh banyak warga, selain pelatihan satpam dan juga kursus menjahit. Pada tahun 2009, kegiatan pelatihan keterampilan Bina Sosial yang paling banyak diadakan adalah pelatihan merakit komputer dan kursus stir mobil (Tim Mirah Saketih, 2010). Di kelurahan Bukit Duri sendiri, bentuk kegiatan pelatihan keterampilan yang lazim dilakukan adalah kursus stir mobil dan pemberian SIM. Namun kegiatan pelatihan keterampilan lainnya, seperti pelatihan kerajinan pembuatan bunga yang berbahan dasar plastik, pelatihan pembuatan kue, pelatihan bengkel, dan kursus komputer juga pernah dilaksanakan di Kelurahan Bukit Duri. Berikut adalah hasil salah satu kerajinan bunga yang berbahan dasar plastik dari salah satu responden, yaitu Ibu Boni.

Selain Ibu Boni, informasi mengenai terlaksananya kegiatan pemberian pelatihan kepada para pengangguran dari kegiatan Bina Sosial PPMK juga didapatkan dari Bapak Abdullah. Bapak Abdullah menyatakan,

“kalau untuk pelatihan-pelatihan di sini alhamdulillah jalan sih, Mba. Ada pelatihan setir mobil, terus yang buat ibu-ibu, apa tuh namanya, mmmm, hantaran! Pelatihan buat kerajinan hantaran-hantaran kalau mau seserahan gitu, Mba. Terus pelatihan yang bener-benerin listrik gitu, tapi ga sampe servis-servis barang elektronik juga sih, Mba, soalnya ga sanggup. Paling ya bener-benerin listrik kecil-kecilan aja. Trus juga pelatihan-pelatihan buat ngebengkel, kursus komputer juga pernah”. (Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, 30 Maret 2012)



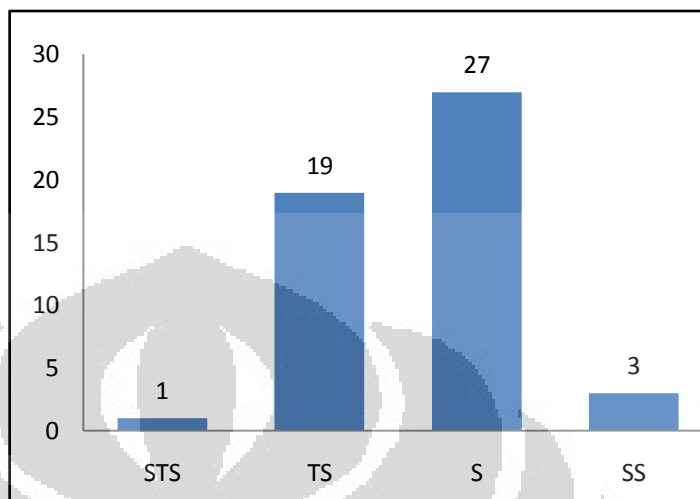
Gambar 5.36 Hasil Pelatihan Kerajinan Pembuatan Bunga Berbahan Dasar Plastik yang Diadakan oleh Kegiatan Bina Sosial PPMK Kelurahan Bukit Duri

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2012

c. Adanya Pembinaan dan Penyuluhan Narkoba pada Tingkat Kelurahan

Adanya pembinaan dan penyuluhan narkoba pada tingkat kelurahan merupakan sub-indikator ketiga dari indikator keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Sosial. Sama seperti sub-indikator sebelumnya, sub-indikator ketiga ini kembali diturunkan ke dalam satu pernyataan, yaitu “adanya penyuluhan narkoba sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Berdasarkan jawaban yang didapatkan dari 50 responden pemanfaat, sejumlah 27 responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan tersebut. Akan tetapi, sejumlah 19 responden memberikan jawaban tidak setuju dengan pernyataan “adanya penyuluhan narkoba sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Sedangkan sisanya, sejumlah 3 responden memberikan jawaban sangat setuju dan 1

responden memberikan jawaban sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.37.



Gambar 5.37 Adanya Pembinaan dan Penyuluhan Narkoba
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

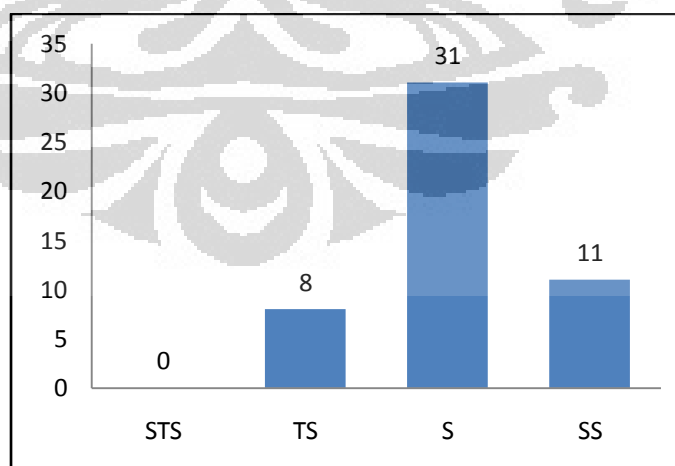
Kegiatan pemberian penyuluhan terhadap bahaya narkoba juga merupakan salah satu bentuk kegiatan Bina Sosial PPMK. Kegiatan penyuluhan tersebut juga telah terlaksana di Kelurahan Bukit Duri, di mana kegiatan tersebut telah dilaksanakan satu kali selama program PPMK berlangsung di Kelurahan Bukit Duri. Pelaksanaannya pun tidak terbuka untuk seluruh warga. Karena adanya keterbatasan dana, kegiatan ini hanya diberikan kepada perwakilan-perwakilan dari kepengurusan RT dan RW serta beberapa perwakilan dari beberapa pemuda. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari salah satu responden, yaitu Bapak Endang, yang menyatakan bahwa, "*Penyuluhan Narkoba dari PPMK waktu itu iya pernah ada, di Puncak kalau ga salah. Tapi waktu itu yang diundang sih cuma anak-anak muda aja*" (hasil wawancara dengan Bapak Endang, 20 Maret 2012).

Selain Bapak Endang, Ibu Desfarida, salah satu responden yang juga ditemui di lapangan juga mengutarakan hal yang sama.

Ibu Desfarida menyatakan, “*Pernah ada sekali di Puncak. Tapi setau saya acaranya terbatas, paling Ketua-Ketua RT sama RW aja, sama perwakilan-perwakilan anak-anak muda*”(hasil wawancara dengan Ibu Hj. Desfaridah, 30 Maret 2012).

d. Adanya Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Terkena Musibah

Pernyataan “adanya pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan yang menjelaskan mengenai sub-indikator adanya pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 50 responden pemanfaat, sejumlah 31 responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan “adanya pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Sebelas responden pemanfaat lainnya memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 8 responden pemanfaat memberikan jawaban tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.38.



Gambar 5.38 Adanya Pemberian Bantuan kepada Masyarakat yang Terkena Musibah atau Bencana
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Kelurahan Bukit Duri merupakan kelurahan yang dilalui oleh Sungai Ciliwung. Di setiap musim penghujan, debit air Sungai Ciliwung selalu meluap akibat kiriman air dari wilayah Bogor. Hal tersebut diperparah lagi dengan padatnya rumah-rumah penduduk di pinggir sungai yang terletak di RW 10, 11, dan 12. Sebagai wilayah yang berbatasan dengan sungai Ciliwung, tidak mengherankan jika setiap tahunnya Kelurahan Bukit Duri mengalami bencana banjir.

Kegiatan pemberian bantuan kepada warga yang terkena bencana merupakan salah satu bentuk kegiatan Bina Sosial PPMK. Pemberian bantuan kepada warga Kelurahan Bukit Duri yang terkena musibah banjir dilaksanakan pada tahun 2002, 2007, dan 2011. Pada tahun 2002 dan 2007, terjadi banjir besar-besaran yang melanda Ibu Kota Jakarta. Kelurahan Bukit Duri adalah salah satu kelurahan yang terkena dampak banjir yang parah. Kedalaman Sungai Ciliwung mencapai 7 meter dan ketinggian air di daerah pemukiman penduduk bahkan mencapai 270 cm (Siap-siap Nanti Air Datang, 2012, www.vivanews.com). Oleh karenanya, pada tahun 2002 dan 2007, seluruh dana kegiatan PPMK dialokasikan oleh Dewan Kelurahan untuk membantu para korban banjir, khususnya para warga di bantaran sungai, yaitu warga di RW 10, 11, dan 12. Salah satu responden, yaitu Ibu Desfarida, juga menjelaskan mengenai pernyataan tersebut.

“Kalau di sini sih bukan daerah banjir, jadi ga dapet bantuan. Paling yang dapet bantuan di daerah pinggir kali, di RW 10, 11, 12, apalagi pas banjir 5 tahunan itu”. (Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Desfaridah, 30 Maret 2012)

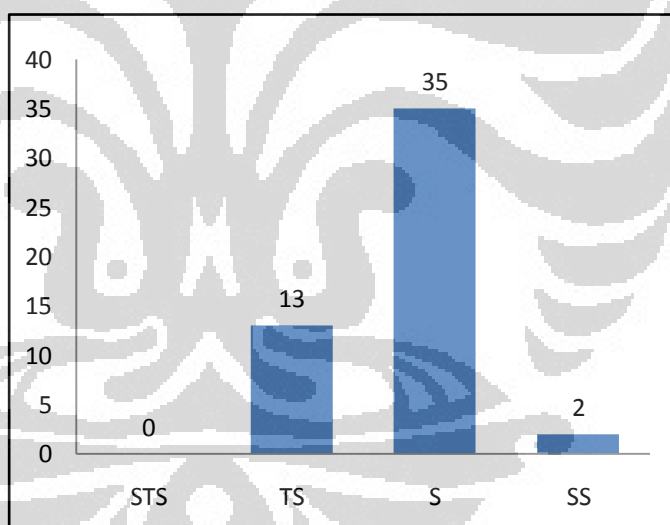
Tidak hanya banjir, pemberian bantuan dari dana Bina Sosial PPMK Bukit Duri juga diberikan kepada warga kelurahan setempat yang terkena bencana lainnya, seperti kebakaran. Bapak Wawan Effendi, salah satu responden yang ditemui di lapangan menjelaskan hal tersebut.

“Dana Bina Sosial di sini juga pernah dipake buat bantu-bantu korban kebakaran. Pas tahun 2010 tuh, kan ada kebakaran di RT 5. Kebakarannya lumayan besar. Nah, dana Bina Sosial nya saya denger-denger dialihin juga ke situ”. (Hasil wawancara dengan Bapak Wawan Effendi, 24 Februari 2012)

Indikator terakhir dari dimensi keadaan PPMK di masa kini adalah keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Fisik Lingkungan. Bina Fisik Lingkungan merupakan suatu pendekatan yang memberikan bantuan berupa dana hibah yang dialokasikan untuk kegiatan fisik lingkungan yang diusulkan masyarakat kelurahan. Dengan adanya kegiatan Bina Fisik Lingkungan ini, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, diharapkan adanya penyediaan ataupun perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti prasarana perlengkapan penanggulangan bencana (perahu karet, alat pemadam kebakaran), prasarana perhubungan (jalan setapak, jembatan kecil), sarana sanitasi (MCK umum, sumber air bersih, saluran pembuangan air limbah dan sejenisnya), sarana kebersihan (tempat pembuangan sampah sementara, tong sampah, gerobak sampah, pengelolaan sampah berbasis komunitas), fasilitas pendukung kegiatan Posyandu, fasilitas olahraga, peralatan dan pelatihan kesenian, serta fasilitas lingkungan (lubang biopori dan sumur resapan air). Pada akhirnya, indikator keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Fisik Lingkungan diturunkan ke dalam 7 sub-indikator, yaitu adanya perbaikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, adanya perbaikan sarana perhubungan, adanya perbaikan fasilitas sanitasi, adanya perbaikan sarana kebersihan, adanya perbaikan sarana pendukung posyandu, adanya perbaikan fasilitas olah raga, serta adanya perbaikan peralatan kebudayaan dan kesenian.

a. Adanya Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Sub-indikator pertama dari indikator keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Fisik Lingkungan adalah adanya perbaikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Perbaikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang diselenggarakan oleh Bina Fisik PPMK merupakan suatu bentuk upaya pemerintah DKI Jakarta untuk mengantisipasi serta menanggulangi kondisi wilayah DKI Jakarta yang rawan akan bencana banjir, termasuk Kelurahan Bukit Duri. Sub-indikator tersebut, kemudian diturunkan kembali menjadi satu pernyataan dalam satu kuisisioner yang disebarakan kepada 50 responden. Pada Gambar 5.39 akan dijelaskan mengenai jawaban para responden pemanfaat mengenai pernyataan tersebut.



Gambar 5.39 Adanya Perbaikan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

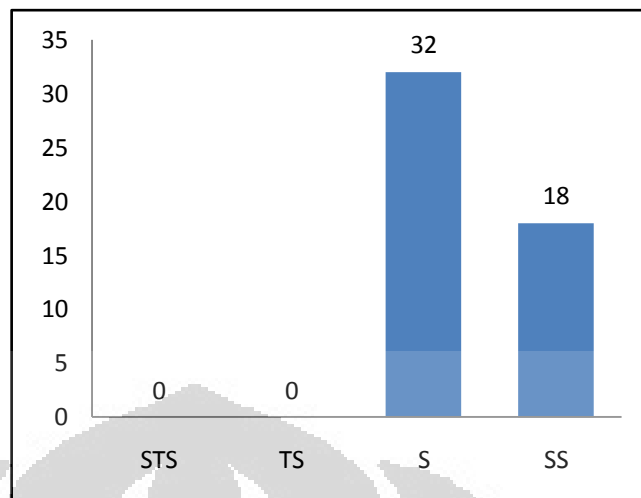
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 50 responden pemanfaat, mayoritas responden pemanfaat memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan “adanya perbaikan sarana prasarana penanggulangan bencana di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”, yaitu sejumlah 35

responden. Selanjutnya, sejumlah 2 responden pemanfaat memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 13 responden memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan tersebut.

b. Adanya Perbaikan Sarana Perhubungan

Sub-indikator kedua dari indikator keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Fisik Lingkungan adalah adanya perbaikan sarana perhubungan. Jalan merupakan salah satu sarana perhubungan yang vital bagi kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan mobilitas yang ada dalam diri setiap manusia sehingga jalan, yang merupakan sarana penghubung antara dua bangunan, dua daerah, hingga dua kota, menjadi suatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Semakin berkualitas suatu jalan, maka hal tersebut akan semakin memberikan kemudahan bagi penggunaannya untuk mencapai tujuannya, memberikan kenyamanan, keamanan, serta memperpendek waktu tempuh dari pengguna. Oleh karenanya, perbaikan sarana perhubungan dijadikan sebagai salah satu kegiatan Bina Fisik Lingkungan PPMK oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sub-indikator adanya perbaikan sarana perhubungan, diturunkan kembali menjadi satu pernyataan dalam satu kuisisioner yang disebarakan kepada 50 responden pemanfaat. Berdasarkan jawaban-jawaban para responden pemanfaat di lapangan, didapatkan mayoritas jawaban responden adalah setuju dengan pernyataan “adanya perbaikan sarana perhubungan di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini?”. Jumlah responden pemanfaat yang menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut adalah 32 responden. Sisanya, sejumlah 18 responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.40



Gambar 5.40 Adanya Perbaikan Sarana Perhubungan
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Selanjutnya, pada Tabel 5.3 akan dijelaskan mengenai alokasi anggaran Bina Fisik Lingkungan PPMK di Kelurahan Bukit Duri untuk perbaikan jalan setiap tahunnya.

Tabel 5.3 Alokasi Dana Hibah Bina Fisik Lingkungan PPMK Kelurahan Bukit Duri untuk Perbaikan Jalan

Tahun	Besar Anggaran	Keterangan
2008	Rp 44.400.000,-	Perbaikan jalan setapak
2009	Rp 18.000.000,-	Perbaikan jalan setapak dan pagar pengaman
2010	Rp 65.000.000,-	Perbaikan jalan setapak
2011	Rp 98.000.000,-	Pengerukan lumpur dan perbaikan jalan setapak

Sumber : diolah dari rekapitulasi anggaran kegiatan Bina Fisik Lingkungan PPMK Bukit Duri tahun 2008, 2009, 2010, 2011

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kelurahan Bukit Duri merupakan kelurahan yang rawan akan bencana banjir. Dengan bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya, jalan-jalan di kelurahan tersebut juga ikut terendam banjir. Akibatnya, aspal-aspal jalan turut mengalami kerusakan. Oleh karenanya, setiap tahunnya dana hibah Bina Fisik Lingkungan PPMK memang dialokasikan untuk melakukan perbaikan jalan-jalan di kelurahan tersebut.

Pada dasarnya, kebutuhan akan perbaikan jalan di kelurahan Bukit Duri tidak lah sedikit. Akan tetapi, kecilnya anggaran dana hibah Bina Fisik Lingkungan PPMK yang diberikan oleh Pemerintah DKI membuat perbaikan jalan di kelurahan Bukit Duri harus dilakukan berdasarkan skala prioritas. Jika memang jalanan di suatu daerah sudah mengalami kerusakan yang parah, barulah dana hibah Bina Fisik Lingkungan dialokasikan untuk memperbaiki jalanan di daerah tersebut. Informasi tersebut didapatkan dari salah satu responden, yaitu Bapak Wawan Effendi, yang berkediaman di RW 12. Responden tersebut memberikan pernyataan sebagai berikut.

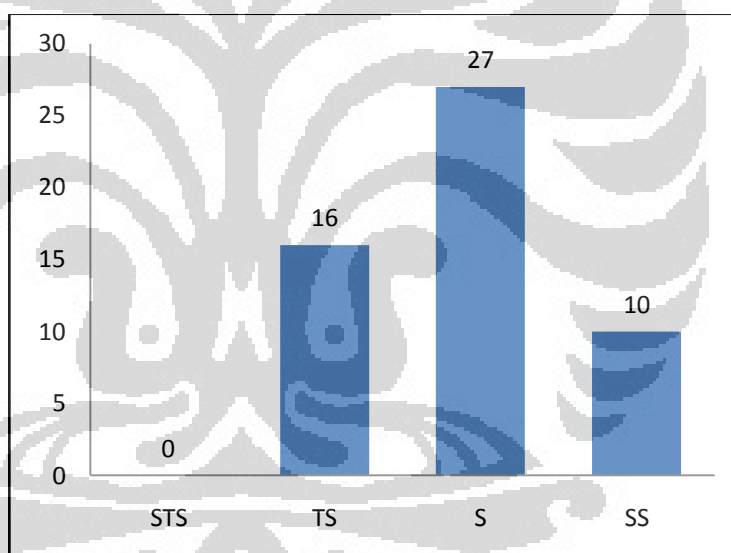
“Ga semua jalanan yang dibenerin. Biasanya berdasarkan prioritas aja. Kalau tahun ini, yang lagi butuh RT 1, soalnya banyak jalanan yang belum di aspal, jadi dana PPMK yang buat benerin jalan di kasih ke situ semua”. (Hasil wawancara dengan Bapak Wawan Effendi, 24 Februari 2012)

Sarana perhubungan lainnya yang pernah mendapatkan alokasi dana Bina Fisik Lingkungan PPMK adalah palang nama jalan. Pengadaan palang nama jalan di Kelurahan Bukit Duri tersebut pernah dilakukan di RW 8 pada tahun 2005.

c. Adanya Perbaikan Fasilitas Sanitasi

Sub-indikator ketiga dari indikator keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Fisik Lingkungan adalah adanya perbaikan fasilitas sanitasi. Sub-indikator tersebut diturunkan kembali

menjadi satu pernyataan, yaitu “adanya perbaikan fasilitas sanitasi di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden pemanfaat, sejumlah 27 responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan “adanya perbaikan fasilitas sanitasi di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Selanjutnya, sejumlah 7 responden memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 16 responden memberikan jawaban tidak setuju dengan pernyataan “adanya perbaikan fasilitas sanitasi di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.41.



Gambar 5.41 Adanya Perbaikan Fasilitas Sanitasi
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Kegiatan perbaikan fasilitas sanitasi di Kelurahan Bukit Duri memang telah menjadi sasaran dalam kegiatan Bina Fisik Lingkungan PPMK, khususnya di RW 10, 11, dan 12. Sebagai RW yang padat penduduk dan berada di bantaran Sungai Ciliwung, jarang ditemukan rumah-rumah penduduk yang memiliki fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) sendiri. Mayoritas warga di daerah

tersebut melakukan aktivitas mandi dan mencuci langsung ke sungai yang berada di dekat rumah warga atau menggunakan MCK yang sudah berdiri di daerah tersebut sejak lama. Kebutuhan perbaikan MCK bagi pemukiman padat penduduk tersebut pun mendapatkan perhatian dari pihak Dewan Kelurahan pada tahun 2009 di mana pada tahun tersebut, Dewan Kelurahan menggunakan dana hibah Bina Fisik Lingkungan PPMK sebesar Rp 4.000.000 untuk melakukan renovasi MCK.

Salah satu responden, yaitu Ibu Nur Hasanah, adalah responden yang berkediaman di RW 11 yang padat penduduk dan berada di bantaran Sungai Ciliwung. Responden tersebut mengatakan :

“pernah ada perbaikan MCK. Tapi saya jarang pake MCK di sini, soalnya agak jauh, di RT 5 sama RT 9. Kalau mau mandi, nyuci, biasanya langsung aja ke kali. Kan rumah saya dekat sama kali, tinggal turun dikit langsung deh kali” (hasil wawancara dengan Ibu Nur Hasanah, 16 Februari 2012).



Gambar 5.42 Sarana Pompa Air yang Diadakan oleh Dana Bina Fisik Lingkungan PPMK

Sumber : dokumentasi peneliti, 2012

Selain perbaikan MCK umum, fasilitas sanitasi yang diadakan oleh dana hibah Bina Fisik Lingkungan PPMK di kelurahan Bukit Duri adalah pompa air. Salah satu responden, yaitu Ibu Desfaridah, yang merupakan warga RW 6 Kelurahan Bukit Duri mengatakan :

“kalau MCK umum di sini engga ada sih ya. Paling di RW yang di dekat kali, RW 10, 11, 12. Kalau untuk perbaikan fasilitas sanitasi adanya pompa air, di RT 11, baru aja di buat tahun ini” (hasil wawancara dengan Ibu Hj. Desfaridah, 30 Maret 2012).

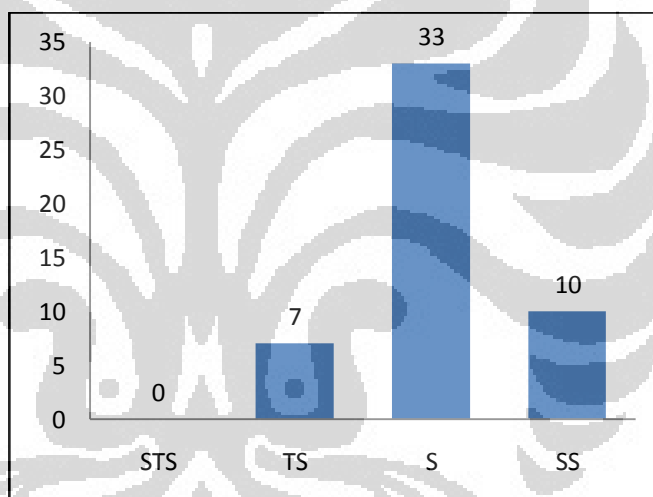
d. Adanya Perbaikan Sarana Kebersihan

Pernyataan “adanya perbaikan sarana kebersihan di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan yang menjelaskan sub-indikator keempat, yaitu sub-indikator adanya perbaikan sarana kebersihan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 50 responden, sejumlah 33 responden memberikan jawaban setuju dengan pernyataan tersebut. Sepuluh responden pemanfaat lainnya memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan “adanya perbaikan sarana kebersihan di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Sedangkan sisanya, sejumlah 7 responden memberikan jawaban tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.43.

Bentuk perbaikan sarana kebersihan yang dilakukan di Kelurahan Bukit Duri dengan menggunakan alokasi dana Bina Fisik Lingkungan PPMK antara lain adalah kegiatan membersihkan saluran-saluran air di lingkungan setempat. Kegiatan pembersihan saluran air tersebut memang sering kali dilakukan di kelurahan tersebut, khususnya di saat musim penghujan dalam rangka mengantisipasi macetnya saluran air yang dapat mengakibatkan banjir. Salah satu responden yang ditemui di lapangan, yaitu Ibu Yus, warga RT 04, RW 09, Kelurahan Bukit Duri

menjelaskan, “Biasanya bersihin selokan, itu udah rutin minimal setahun sekali, biar ga banjir” (hasil wawancara dengan Ibu Yus, 16 Februari 2012).

Selain membersihkan saluran air, bentuk perbaikan sarana kebersihan yang dapat ditemukan di Kelurahan Bukit Duri adalah pengadaan tempat sampah dan gerobak sampah di lingkungan setempat. Bapak Effendi, salah satu responden yang ditemui di lapangan, menyatakan, “Ada, waktu itu pernah dikasih gerobak sampah satu sama PPMK. Terus juga pernah dibikin tempat sampah, tuh di ujung gang situ” (hasil wawancara dengan Bapak Effendi, 24 Februari 2012).



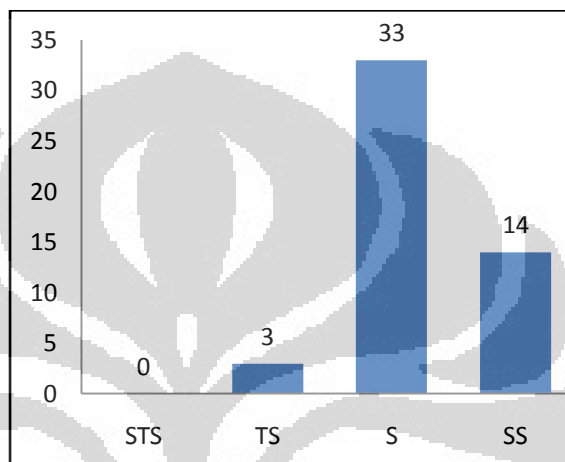
Gambar 5.43 Adanya Perbaikan Sarana Kebersihan
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

e. Adanya Perbaikan Sarana Pendukung Posyandu

Pernyataan “adanya perbaikan sarana pendukung posyandu di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan yang menjelaskan sub-indikator kelima, yaitu adanya perbaikan sarana pendukung posyandu. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 50 responden, mayoritas responden memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan tersebut, yaitu

sejumlah 33 responden. Empat belas responden pemanfaat lainnya memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan “adanya perbaikan sarana pendukung posyandu di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Sisanya, sejumlah 3 responden memberikan jawaban tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.44.



Gambar 5.44 Adanya Perbaikan Sarana Pendukung Posyandu
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Setiap tahunnya, dana hibah PPMK memang dialokasikan untuk membantu 21 Posyandu yang berdiri di kelurahan Bukit Duri. Besar dana hibah untuk masing-masing Posyandu adalah Rp 1.000.000,- per tahunnya. Salah satu responden, yaitu Ibu Komariah, yang juga merupakan salah satu pengurus Posyandu di RW 6 mengutarakan :

“Kalo dari PPMK iya, ada bantuan. Setiap tahun masing-masing Posyandu di kasih Rp. 1.000.000,-. Dari situ biasanya kita belanjain buat inventaris Posyandu, kayak gantungan timbangan, meja tulis, kursi, alat makan.... kalo PPMK kan ngasih nya per tahun. Tapi kalau dari kelurahan biasanya ngasih per bulan. Sebulan kita dikasih Rp 200.000,- tapi dipotong pajak Rp 15.000,-. Itu pun untuk 3 Posyandu.” (Hasil wawancara dengan Ibu Komariah Gunarto, 30 Maret 2012)

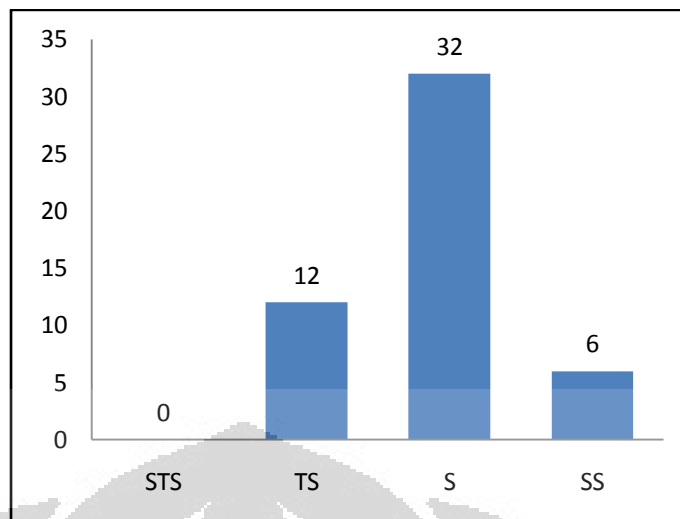
Pada dasarnya, bantuan untuk Posyandu merupakan salah satu bentuk kegiatan dari Bina Fisik Lingkungan. Anggaran yang digunakan seharusnya juga menggunakan dana hibah Bina Fisik Lingkungan. Akan tetapi, berbeda dengan apa yang seharusnya, bantuan untuk Posyandu di Kelurahan Bukit Duri justru diberikan dengan menggunakan dana hibah Bina Sosial. Hal tersebut diutarakan oleh salah satu anggota LMK, yaitu Ibu Titin sebagai berikut.

“Dari kegiatan dana Bina Sosial itu kita memberikan bantuan kepada Posyandu, PAUD, Lansia, pelatihan keterampilan kepada Ibu-Ibu PKK, dan Pemberian SIM. Kalau untuk Posyandu, PAUD, Lansia, kita memberikan dana bantuan kepada mereka berupa dana. Untuk Posyandu dan PAUD itu biasanya masing-masing dikasih Rp 1.000.000” (hasil wawancara dengan Ibu Titin Bambang, 24 Februari 2011).

f. Adanya Perbaikan Fasilitas Olahraga

Sub-indikator keenam dari indikator keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Fisik Lingkungan adalah adanya perbaikan fasilitas olahraga. Dari sub-indikator perbaikan fasilitas olahraga, kemudian, sub-indikator tersebut diturunkan ke dalam satu pernyataan, yaitu “adanya perbaikan fasilitas olahraga di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”.

Berdasarkan jawaban dari 50 kuisioner tersebut, didapatkan informasi bahwa mayoritas responden pemanfaat menyetujui adanya perbaikan sarana olahraga sejak dilaksanakannya PPMK di Kelurahan Bukit Duri. Jumlah responden yang memberikan jawaban setuju adalah 32 responden dari total keseluruhan sejumlah 50 responden. Akan tetapi, sejumlah 12 responden memberikan jawaban tidak setuju dengan pernyataan “adanya perbaikan fasilitas olahraga di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Sisanya, sejumlah 6 responden memberikan jawaban sangat setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.45 di bawah ini.



Gambar 5.45 Adanya Perbaikan Fasilitas Olahraga
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para responden, pengadaan sarana olahraga dengan menggunakan dana hibah Bina Fisik PPMK di Kelurahan Bukit Duri antara lain adalah peralatan futsal, peralatan tenis meja, dan peralatan bulu tangkis. Salah satu responden yang ditemui untuk mendapatkan informasi mengenai pengadaan sarana olahraga dengan menggunakan dana hibah Bina Fisik Lingkungan PPMK adalah Bapak Endang yang berkediaman di RW 8. Responden tersebut mengutarakan :

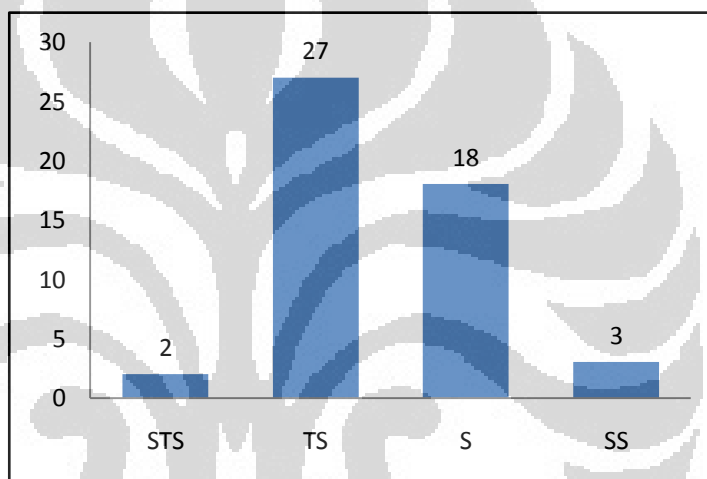
“Kalau pengadaan sarana olahraga kita pernah dikasih tiang gawang, meja ping pong, sama net buat bulu tangkis. Tapi itu semua di taro di gedung PKK. Kalau mau make ya kita harus ke gedung PKK dulu, soalnya di sini ga ada lapangannya. Terus juga ada latihan bulu tangkis setiap sore di Balai Rakyat sini”(hasil wawancara dengan Bapak Endang, 20 Maret 2012).

Selain Bapak Endang, Bapak Abdullah, warga RW 6 juga berpendapat mengenai pengadaan sarana olahraga dari dana hibah Bina Fisik Lingkungan PPMK. Bapak Endang mengatakan, *“Dari*

PPMK ada tuh, meja ping pong, tapi ditaronya di RT 14”(hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, 30 Maret 2012).

g. Adanya Perbaikan Fasilitas Kesenian

Sub-indikator terakhir dari indikator keadaan yang diharapkan dari kegiatan Bina Fisik Lingkungan adalah adanya perbaikan fasilitas kesenian. Kemudian, sub-indikator tersebut diturunkan kembali ke dalam satu pernyataan, yaitu “adanya perbaikan fasilitas kesenian di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”.



Gambar 5.46 Adanya Perbaikan Sarana Kesenian

(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 50 responden pemanfaat, mayoritas responden tidak meyetujui adanya perbaikan sarana kesenian yang diselenggarakan oleh PPMK di kelurahan tersebut. Sejumlah dua puluh tujuh responden memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan “adanya perbaikan fasilitas kesenian di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Delapan responden pemanfaat lainnya memberikan jawaban setuju atas pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 3 responden memberikan jawaban sangat setuju dan 2

responden lainnya memberikan jawaban sangat tidak setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.46.

5.2.3.1 Analisis Dimensi Keadaan di Masa Kini

Untuk mengukur dimensi keadaan di masa kini, dimensi ini diturunkan ke dalam 13 pernyataan dari total 31 pernyataan yang disebarkan kepada 50 responden pemanfaat. Jawaban atas ketiga belas pernyataan tersebut kemudian digabungkan menjadi satu dengan menggunakan kategori baru, yaitu kategori positif dan kategori negatif. Pengkategorian positif dan negatif pada dimensi keadaan di masa kini berada pada rentang nilai sebagai berikut.

$$RS = (m-n)/b,$$

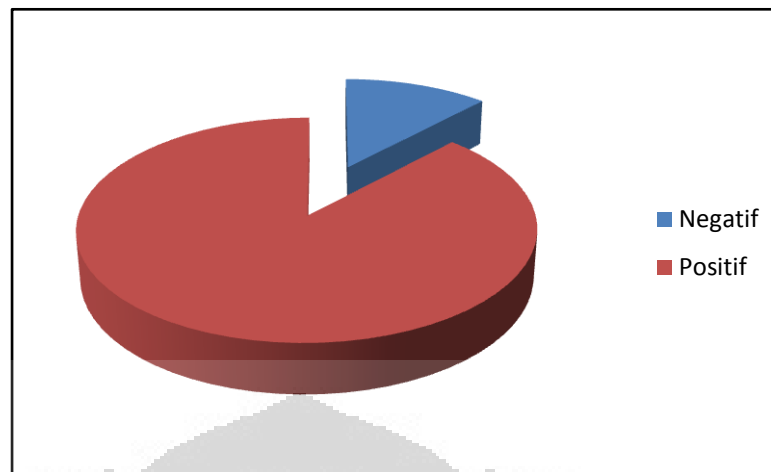
dimana **m** adalah nilai tertinggi yang mungkin; **n** adalah nilai terendah yang mungkin; **b** adalah jumlah kelas. Sehingga **RS** = $(52-13)/2 = 19,5$

Tabel 5.4 Pembagian Kelas Analisis Deskriptif Mean

Kategori	Batasan
Negatif	$13 < x \leq 33$
Positif	$34 < x \leq 52$

Sumber : telah diolah kembali

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas, responden pemanfaat memnerikan pennilaian positif terhadap keadaan PPMK di masa kini jika hasil penghitungan pada aplikasi SPSS berada pada rentang nilai 34 hingga 52. Akan tetapi, jika hasil penghitungan pada aplikasi SPSS berada pada rentang nilai 13 hingga 33, hal tersebut memiliki arti bahwa responden nonpemanfaat memberikan penilaian negatif terhadap keadaan PPMK di masa kini. Gambar 5.47 akan menjelaskan mengenai hasil olahan data untuk dimensi keadaan PPMK di masa kini.



Gambar 5.47 Dimensi Keadaan PPMK di Masa Kini
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Dapat dilihat pada Gambar 5.47 di atas bahwa berdasarkan data yang didapatkan dari 50 responden pemanfaat, 88% diantaranya, atau sejumlah 44 responden memberikan penilaian positif terhadap keadaan PPMK di masa kini. Dengan kata lain, mayoritas responden memberikan penilaian bahwa PPMK di masa kini telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan sisanya, sejumlah 12% dari 50 responden, atau sejumlah 6 responden memberikan penilaian negatif terhadap keadaan PPMK di masa kini. Hal tersebut berarti bahwa 6 responden pemanfaat memberikan penilaian bahwa keadaan PPMK di masa kini tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

5.2.4 Dimensi Pengaruh Tidak Langsung PPMK terhadap Kelompok

Sasaran

Dimensi terakhir dari variabel dampak PPMK adalah pengaruh tidak langsung PPMK terhadap kelompok sasaran. Pengaruh tidak langsung suatu kebijakan pada dasarnya dapat dilihat dari dampak simbolis kebijakan, seperti perubahan sikap atau perilaku masyarakat

(Tarigan, 2009). Oleh sebab itu, dalam mengukur dimensi terakhir, dimensi ini diturunkan ke dalam 2 indikator, yaitu pengaruh terhadap perilaku masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan dan pengaruh terhadap pemahaman masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Program PPMK memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dari program tersebut. Namun, suatu kebijakan atau suatu program pasti memiliki suatu dampak yang tidak disadari, yang salah satunya adalah perilaku masyarakat. Dari Program PPMK ini, dapat dilihat bahwa berdasarkan dari 3 kegiatan program PPMK, yaitu Bina Ekonomi, Bina Sosial, dan Bina Fisik Lingkungan, masing-masing dari kegiatan tersebut memberikan dampak tidak langsung terhadap perilaku masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Oleh karenanya, dari indikator pengaruh terhadap perilaku masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan, indikator tersebut diturunkan ke dalam 5 sub-indikator berdasarkan perilaku-perilaku yang dapat muncul akibat kegiatan Bina Ekonomi, Bina Sosial, dan Bina Fisik Lingkungan. Kelima sub-indikator tersebut adalah terbentuknya kemandirian masyarakat dalam kegiatan ekonominya, terbentuknya kemandirian masyarakat untuk memperbaiki lingkungannya, terbentuknya kepedulian dengan sesama warga di kalangan masyarakat, terbentuknya kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat, serta terbentuknya perilaku gotong royong di kalangan masyarakat.

a. Terbentuknya Kemandirian Masyarakat Dalam Melakukan Kegiatan Ekonomi

Pernyataan pertama, yaitu “anda menjadi lebih mandiri dalam melakukan kegiatan ekonomi sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan yang menjelaskan mengenai sub-indikator terbentuknya kemandirian masyarakat dalam

kegiatan ekonominya. Terbentuknya kemandirian masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi merupakan salah satu implikasi tidak langsung dari kegiatan Bina Ekonomi, di mana dengan adanya pemberian bantuan modal usaha dan modal kerja kepada masyarakat, masyarakat pun menjadi lebih mandiri dan dapat berdiri sendiri dalam melakukan kegiatan ekonominya dan tidak bergantung kepada orang lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 50 responden, sejumlah 28 responden pemanfaat memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan “anda menjadi lebih mandiri dalam melakukan kegiatan ekonomi sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Akan tetapi, 11 responden pemanfaat lainnya memberikan jawaban tidak setuju terhadap pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 9 responden memberikan jawaban sangat setuju dan 2 responden lainnya memberikan jawaban sangat tidak setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.48.

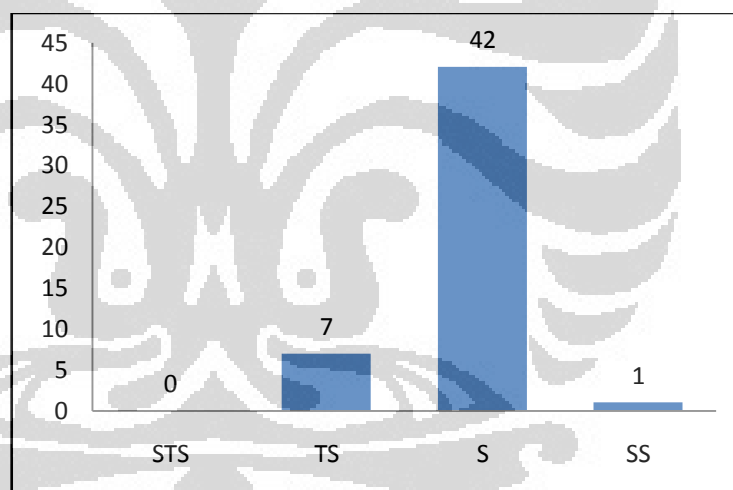


Gambar 5.48 Terbentuknya Kemandirian Masyarakat Dalam Kegiatan Ekonomi
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

b. Terbentuknya Kemandirian Masyarakat Dalam Memperbaiki Kondisi Lingkungan Sekitar

Pernyataan “anda menjadi lebih mandiri dalam memperbaiki kondisi lingkungan sekitar anda sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan yang menjelaskan mengenai sub-indikator kedua, yaitu terbentuknya kemandirian masyarakat untuk memperbaiki lingkungannya. Dengan adanya kegiatan Bina Fisik Lingkungan, di mana dalam kegiatan tersebut masyarakat dituntut untuk memiliki inisiatif tersendiri dalam memperbaiki kondisi lingkungan sekitarnya, secara tidak sadar, hal tersebut dapat memberikan dampak kepadamasyarakat di mana masyarakat pun menjadi lebih mandiri dalam memperbaiki kondisi lingkungan sekitarnya.



Gambar 5.49 Terbentuknya Kemandirian Masyarakat Untuk Memperbaiki Lingkungannya
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Berdasarkan hasil wawancara dengan 50 responden pemanfaat, 42 diantaranya memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan tersebut. Akan tetapi, sejumlah 7 responden pemanfaat memberikan jawaban tidak setuju dengan pernyataan “anda menjadi lebih mandiri dalam memperbaiki kondisi lingkungan

sekitar anda sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Sisanya, sejumlah 1 responden pemanfaat memberikan jawaban sangat setuju. Untuk lebih jelasnya, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.49

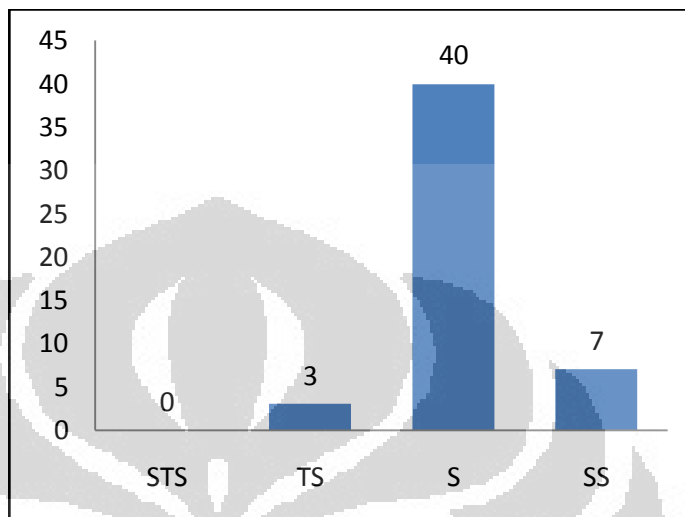
c. Terbentuknya Kepedulian dengan Sesama Warga di Kalangan Masyarakat

Dari sub-indikator ketiga, yaitu sub-indikator terbentuknya kepedulian dengan sesama warga di kalangan masyarakat, sub-indikator tersebut juga diturunkan ke dalam satu pernyataan, yaitu “anda menjadi lebih peduli terhadap sesama warga sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Berdasarkan hasil wawancara dengan 50 responden pemanfaat tentang pernyataan tersebut, didapatkan informasi bahwa mayoritas responden pemanfaat yang ditemui merasakan timbulnya kepedulian dari para responden pemanfaat sejak dilaksanakannya PPMK di lingkungan para responden. Sejumlah 40 responden pemanfaat memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan “anda menjadi lebih peduli terhadap sesama warga sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Tujuh responden lainnya memberikan jawaban sangat setuju terhadap pernyataan tersebut. Sisanya, sejumlah 3 responden memberikan jawaban tidak setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.50.

Dominasi jawaban setuju yang diberikan oleh mayoritas responden tersebut didukung oleh salah satu pernyataan responden, yaitu Ibu Desfaridah. Ibu Desfarida melihat, sejak adanya PPMK di Kelurahan Bukit Duri, timbul kepedulian di lingkungan kediaman responden. Responden tersebut mengatakan :

“kalau kepedulian sih iya, jadi ada. Dulu di RW sini cuma ada PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sama Posyandu. Baru-baru ini aja ada Posyandu Lansia (Lanjut Usia). Pas mau bikin Posyandu Lansia di sini, kebetulan kan anak saya bidan. Anak saya disuruh ngecek tensi Lansia di sini buat ngedata

awal lansia-lansia yang ada di sini. Cuma, karena sekarang anak saya sibuk, saya ga tau lagi deh tuh gimana kelanjutannya” (hasil wawancara dengan Ibu Hj. Desfaridah, 30 Maret 2012).



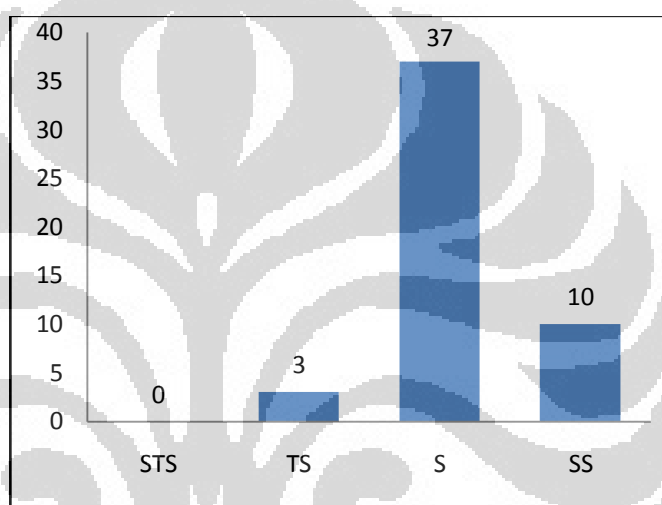
Gambar 5.50 Terbentuknya Kepedulian dengan Sesama Warga di Kalangan Masyarakat
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

d. Terbentuknya Kesetiakawanan Sosial di Kalangan Masyarakat

Sub-indikator keempat dari indikator pengaruh terhadap perilaku masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan adalah terbentuknya kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat. Kesetiakawanan sosial itu sendiri merupakan suatu nilai, sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi pengertian, kesadaran, tanggung jawab, kesetaraan dan partisipasi sosial untuk mengatasi dan menanggulangi berbagai masalah sosial sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan dan kerelaan berkorban tanpa pamrih (Kementerian Sosial, 2008). Dari sub-indikator tersebut, kemudian diturunkan ke dalam satu pernyataan, yaitu “anda memiliki kesetiakawanan sosial terhadap sesama warga sejak

dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Mayoritas jawaban dari para responden pemanfaat di lapangan adalah setuju. Sejumlah 37 responden pemanfaat memberikan jawaban setuju pada pernyataan “anda memiliki kesetiakawanan sosial terhadap sesama warga sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Sepuluh responden lainnya memberikan jawaban sangat setuju. Akan tetapi, 3 responden sisanya memberikan jawaban tidak setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.51.



Gambar 5.51 Terbentuknya Kesetiakawanan Sosial di Kalangan Masyarakat
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Salah satu responden, yaitu Ibu Jaronah, adalah salah satu responden pemanfaat yang merasakan timbulnya kesetiakawanan sosial di RW tempat Ibu Jaronah berkediaman sejak diadakannya PPMK di kelurahan Bukit Duri. Responden tersebut merasa mendapatkan perhatian lebih dari sesama warga di RW tempat responden tinggal dan menjadi merasa terbantu dengan adanya perhatian lebih dari salah seorang warga di lingkungannya. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Ibu Jaronah sebagai berikut.

“Iya, alhamdulillah, gara-gara PPMK saya jadi kenal orang-orang baik di sini. Saya sering banget dibantu sama Bude (Ibu Titin, salah satu mantan anggota Dewan Kelurahan periode 2006 – 2011). Kalo lagi ada pinjaman-pinjaman dari Dekel, saya di kasih tau Bude. Lumayan lah jadi ada tambahan modal sama buat bantu-bantu bayar kontrakan. Terus kalau di RW sini kurang apa, butuh apa, juga suka dibantu sama Bude di Dekel biar dana nya bisa turun.” (Hasil wawancara dengan Ibu Jaronah, 30 Maret 2012)

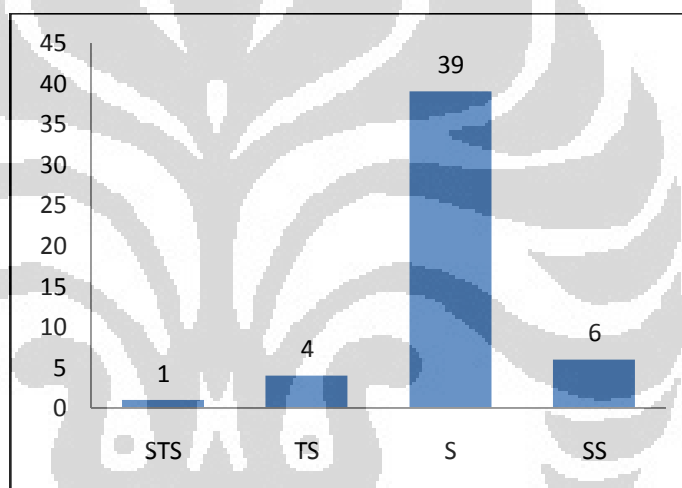
e. Terbentuknya Perilaku Gotong Royong di Kalangan Masyarakat

Sub-indikator terakhir dari indikator pengaruh terhadap perilaku masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan adalah terbentuknya perilaku gotong royong di kalangan masyarakat. Sub-indikator tersebut diturunkan ke dalam satu pernyataan yang kemudian disusun ke dalam satu kuisisioner.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan terhadap 50 responden pemanfaat dengan menggunakan alat bantu kuisisioner, didapatkan informasi bahwa mayoritas jawaban para responden adalah setuju terhadap pernyataan “anda melakukan kegiatan di lingkungan masyarakat secara gotong royong sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Jumlah responden pemanfaat yang memberikan jawaban setuju pada pernyataan tersebut adalah 39 responden. Sisanya, sejumlah 6 responden memberikan jawaban sangat setuju, 4 responden memberikan jawaban tidak setuju, dan 1 responden memberikan jawaban sangat tidak setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.52.

Kegiatan Bina Fisik Lingkungan, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, merupakan suatu kegiatan pemberian dana hibah bagi masyarakat untuk melakukan pengadaan maupun perbaikan sarana dan prasarana di lingkungannya. Dalam mekanismenya, kegiatan Bina Fisik Lingkungan diawali dengan adanya musyawarah antara masyarakat di setiap-setiap RW untuk

membicarakan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungannya. Berdasarkan keputusan dalam musyawarah tersebut, masyarakat di tingkat RW akan mengajukan permohonan kepada Dewan Kelurahan hingga akhirnya dana hibah dicairkan dan diberikan kepada masyarakat di masing-masing RW. Ketika dana sudah cair, pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan RW tersebut diharapkan dapat dilakukan secara asas gotong royong. Dari kegiatan perbaikan sarana dan pra sarana fisik lingkungan tersebut, budaya gotong royong di kalangan masyarakat, secara tidak disadari, dapat muncul dengan sendirinya.



Gambar 5.52 Terbentuknya Perilaku Gotong Royong di Kalangan Masyarakat
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Pada pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bukit Duri, salah satu responden, yaitu Bapak Wawan Effendi, memberikan penjelasan mengenai timbulnya perilaku gotong royong pada masyarakat tempat responden berkediaman karena adanya program PPMK. Pada kegiatan perbaikan aspal jalan di RT 1, RW 12, masyarakat di daerah tersebut secara bersama-sama dan bergotong royong melakukan perbaikan aspal jalan. Berikut adalah pernyataan Bapak Wawan Effendi mengenai hal tersebut.

“Kalau gotong royong sih sering. Tahun lalu, masyarakat satu sama lain saling bantu ngambilin air, ngaduk semen, nyari kuin (puing-puing bekas tembok bangunan orang) buat kerja bakti sosial bikin jalan setapak di RT 1.”(Hasil wawancara dengan Bapak Wawan Effendi, 24 Februari 2012)

Selain adanya perubahan perilaku, suatu kebijakan maupun suatu program secara tidak disadari dapat memberikan munculnya pemahaman bagi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Program PPMK, yang merupakan program pembangunan yang menggunakan strategi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara *bottom-up*, secara tidak sadar dapat memberikan pemahaman masyarakat mengenai pembangunan itu sendiri. Kegiatan Bina Ekonomi PPMK yang merupakan kegiatan yang memberikan pinjaman dana bergulir kepada masyarakat dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, secara tidak sadar dapat membentuk pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kredit mikro dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Sedangkan kegiatan Bina Sosial dan Bina Fisik Lingkungan, yang merupakan kegiatan pemberian dana hibah kepada masyarakat dalam rangka membangun secara *bottom-up* dalam hal fisik dan sosial kelurahan, secara tidak sadar dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai pentingnya pembangunan yang berasal dari bawah. Oleh karenanya, indikator kedua ini diturunkan kembali ke dalam 3 sub-indikator, yaitu terbentuknya pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya akses terhadap kredit mikro dalam upaya memperbaiki nasib, terbentuknya pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, serta terbentuknya pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

a. Terbentuknya Pemahaman pada Masyarakat Mengenai Pentingnya Akses terhadap Kredit Mikro Dalam Upaya Memperbaiki Nasib

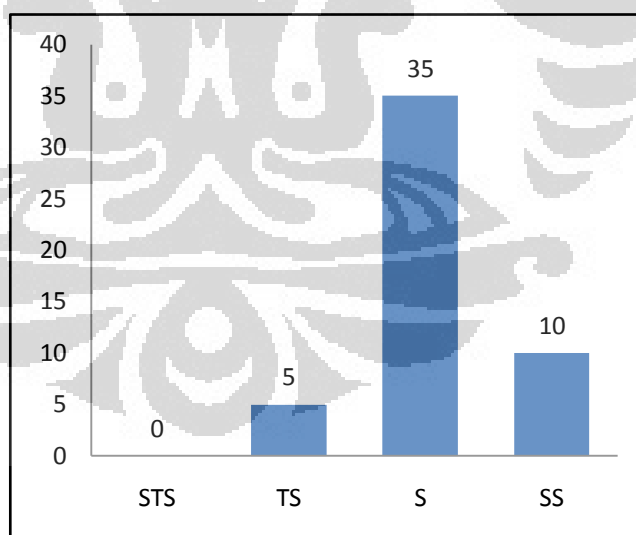
Pernyataan “anda memahami pentingnya akses terhadap kredit mikro dalam upaya memperbaiki nasib sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan yang menjelaskan mengenai sub-indikator terbentuknya pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya akses terhadap kredit mikro dalam upaya memperbaiki nasib. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 50 responden pemanfaat mengenai pernyataan tersebut, mayoritas responden memberikan jawaban setuju. Tiga puluh lima responden pemanfaat memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan “anda memahami pentingnya akses terhadap kredit mikro dalam upaya memperbaiki nasib sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Sisanya, 10 responden memberikan jawaban sangat setuju dan 5 responden lainnya memberikan jawaban tidak setuju. Untuk lebih jelasnya mengenai tanggapan responden pemanfaat tentang pernyataan “anda memahami pentingnya akses terhadap kredit mikro dalam upaya memperbaiki nasib sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini: dapat dilihat pada Gambar 5.53.

PPMK merupakan suatu program pembangunan dengan menggunakan strategi pemberdayaan. Sabirin (2001) menjelaskan bahwa untuk memberdayakan masyarakat, khususnya bagi golongan ekonomi lemah atau sektor usaha kecil, salah satunya dapat dilakukan dengan menyediakan sumber pembiayaan usaha yang terjangkau. Salah satu strategi pembiayaan bagi golongan tersebut adalah usaha kredit mikro.

Studi di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa akses terhadap kredit mikro bagi kaum miskin sangat potensial untuk membantu mengurangi kemiskinan. Program kredit mikro di Uganda, menunjukkan bahwa setelah dua tahun para pengguna jasa

keuangan tersebut lebih mampu meningkatkan aset dan tabungan para pengguna jasa dibandingkan dengan masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam program kredit mikro. Sementara itu, di Pakistan, sebuah studi tentang program kredit mikro menemukan bahwa program berhasil menurunkan kemiskinan sampai 18 persen di desa-desa yang ikut ambil bagian dalam program. Sedangkan di desa-desa yang tidak ikut program kredit mikro tersebut kemiskinan hanya turun sebesar 13 persen (Tim Mirah Saketih, 2010).

Melihat keberhasilan kredit mikro dalam memberantas kemiskinan di beberapa negara, maka penggunaan usaha kredit mikro dirasakan penting untuk masyarakat-masyarakat yang bergolongan ekonomi lemah. Oleh karenanya, pada program PPMK ini, melalui kegiatan Bina Ekonomi, pemerintah menggunakan kredit mikro dalam rangka memberdayakan masyarakat yang memiliki ekonomi lemah maupun masyarakat-masyarakat yang memiliki usaha kecil dan usaha mikro.



Gambar 5.53 Terbentuknya Pemahaman pada Masyarakat Mengenai Pentingnya Akses terhadap Kredit Mikro dalam Upaya Memperbaiki Nasib
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Dengan adanya kegiatan pemberian kredit mikro pada program PPMK, mayoritas responden merasakan munculnya pemahaman para responden mengenai pentingnya akses terhadap kredit mikro dalam kegiatan perekonomian mereka. Salah satu responden yang merasakan hal tersebut adalah Bapak Abdullah. Bapak Abdullah merasa bahwa kredit mikro memiliki peranan penting dalam usaha mikronya dan menjadi rutin menggunakan kredit mikro sejak diadakannya PPMK. Responden tersebut menyatakan :

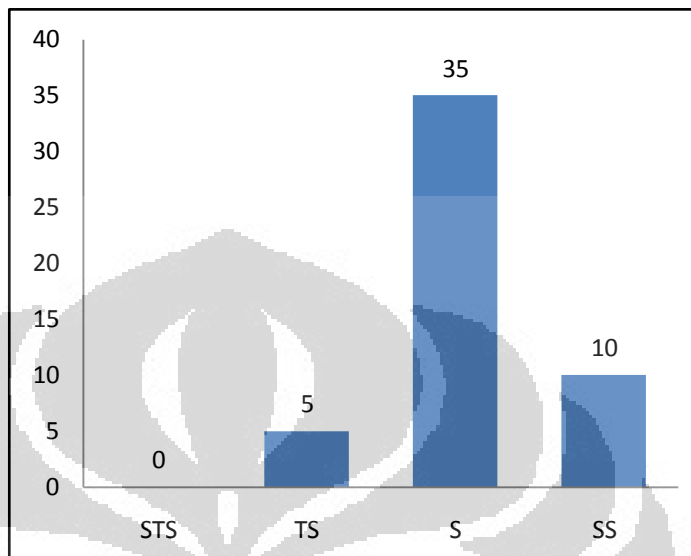
“kredit mikro ya penting lah Mba buat usaha-usaha kecil kayak saya gini. Dulu, pas PPMK, saya pernah minjem 2 juta buat beli barang, buat nyetok di rumah. Tp sejak PPMK dipindah ke Koperasi, saya jadi pindah ke Bank. Soalnya kalau di koperasi terlalu besar pembagian keuntungannya”(hasil wawancara dengan Bapak Abdullah, 30 Maret 2012).

Selain Bapak Abdullah, salah satu responden yang ditemui di lapangan, yaitu Bapak Effendi, juga merasakan pentingnya akses terhadap kredit mikro bagi dirinya. Akan tetapi, responden tersebut menyayangkan kecilnya dana pinjaman yang diberikan PPMK. Bapak Effendi merasa, dengan nominal pinjaman yang diberikan, pinjaman tersebut belum terlalu membantu usaha mikronya. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataannya, yaitu *“Ya perlu, tapi dananya jangan kecil-kecil amat, minimal Rp 5.000.000,- lah. Kalau cuma dikasih Rp 1.000.000,- mah kedikitan buat dagang”*(hasil wawancara dengan Bapak Effendi, 24 Februari 2012).

b. Terbentuknya Pemahaman Pada Masyarakat Mengenai Pentingnya Keterlibatan (partisipasi) Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan

Pada Gambar 5.54 berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban mayoritas responden terhadap pernyataan “anda

memahami pentingnya peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”.



Gambar 5.54 Terbentuknya Pemahaman pada Masyarakat Mengenai Pentingnya Keterlibatan (Partisipasi) dalam Proses Perencanaan Pembangunan

(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Pernyataan “anda memahami pentingnya peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. merupakan pernyataan yang menjelaskan mengenai sub-indikator terbentuknya pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan penelitian terhadap 50 responden pemanfaat mengenai pernyataan tersebut, 35 responden pemanfaat memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan “anda memahami pentingnya peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini”. Sepuluh responden lainnya memberikan jawaban sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sisanya, 5 responden pemanfaat memberikan jawaban tidak setuju.

c. Terbentuknya Pemahaman pada Masyarakat Mengenai Pentingnya Keterlibatan Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Pernyataan terakhir, yaitu pernyataan “anda memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini” merupakan pernyataan yang menjelaskan sub-indikator terbentuknya pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik merupakan suatu hal yang penting karena dapat memberikan implikasi bagi kualitas pemerintahan. Partisipasi dalam kehidupan publik dapat menentukan siapa yang akan mewakili kepentingan umum melalui pejabat terpilih. Partisipasi juga dapat membentuk kualitas pada pengambilan keputusan dalam pemerintahan karena adanya informasi dari masyarakat mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat kepada pejabat terpilih yang pada akhirnya dapat membantu pembangunan (Pelissero, 2003-68).

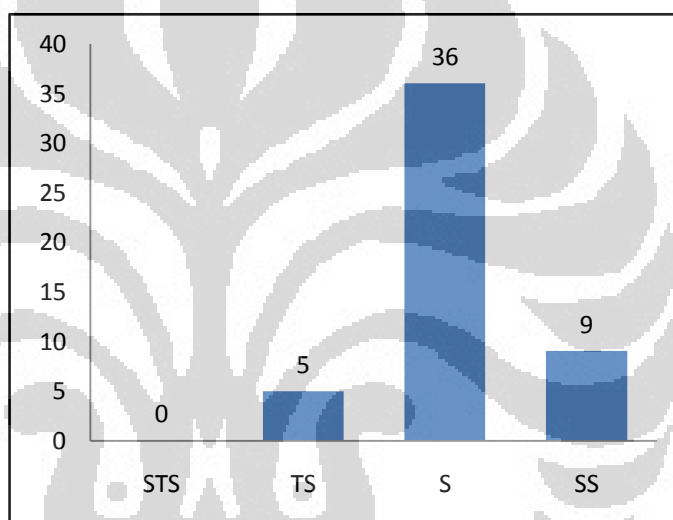
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 50 responden pemanfaat, 36 responden diantaranya memberikan jawaban setuju terhadap pernyataan tersebut. Sembilan responden lainnya memberikan jawaban sangat setuju. Sisanya, sejumlah 5 responden memberikan jawaban tidak setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.55.

Kegiatan Bina Sosial dan Bina Fisik Lingkungan PPMK selalu didahului oleh kegiatan forum musyawarah masyarakat untuk memutuskan jenis pembangunan apa yang sedang dibutuhkan di lingkungan RW mereka. Dengan adanya kegiatan forum musyawarah tersebut, diharapkan masyarakat menjadi mengerti pentingnya proses pembangunan yang bersifat *bottom-up*.

Salah satu responden, yaitu Bapak Effendi, warga RT 10, RW 08 merasakan bahwa peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan merupakan suatu hal yang penting.

Dengan adanya peran masyarakat, Bapak Effendi merasa hal tersebut dapat mendukung transparansi dalam pembangunan sehingga anggaran yang ada pun dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan Bapak Effendi di bawah ini.

“Peran masyarakat itu penting, Mba. Pembangunan kan untuk masyarakat, anggarannya ya harus dinikmati masyarakat juga. Jadi masyarakat juga harus ikutan supaya semuanya transparan dan jelas.” (Hasil wawancara dengan Bapak Effendi, 24 Februari 2012)



Gambar 5.55 Terbentuknya Pemahaman pada Masyarakat Mengenai Pentingnya Keterlibatan Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

5.2.4.1 Analisis Dimensi Pengaruh Tidak Langsung PPMK terhadap Kelompok Sasaran

Dari jawaban atas kedelapan pernyataan yang disebarakan kepada 50 responden pemanfaat untuk mengukur dimensi pengaruh tidak langsung PPMK terhadap kelompok sasaran, jawaban-jawaban atas pernyataan tersebut kemudian diolah kembali dengan menggunakan aplikasi SPSS 19. Kedelapan

jawaban tersebut digabungkan menjadi satu dengan menggunakan kategori baru, yaitu kategori positif dan negatif. Rentang nilai untuk katagori positif dan negatif pada dimensi pengaruh tidak langsung PPMK terhadap kelompok sasaran didapatkan atas hasil penghitungan sebagai berikut.

$$RS = (m-n)/b,$$

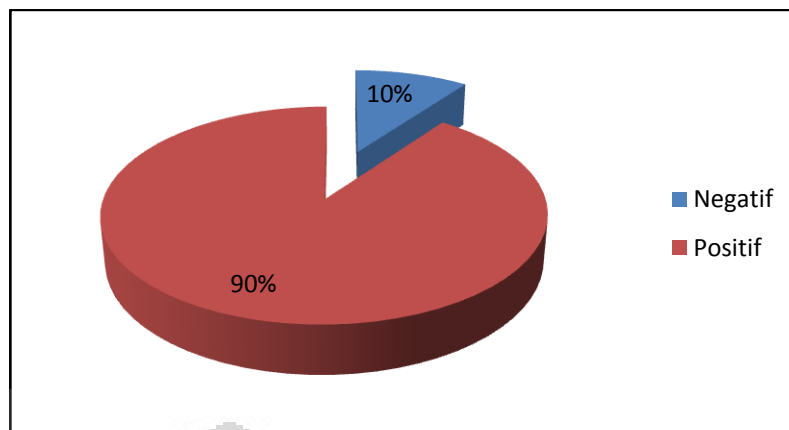
dimana **m** adalah nilai tertinggi yang mungkin; **n** adalah nilai terendah yang mungkin; **b** adalah jumlah kelas. Sehingga **RS** = $(32-8)/2 = 12$

Tabel 5.5 Pembagian Kelas Analisis Deskriptif Mean

Kategori	Batasan
Negatif	$8 < x \leq 19$
Positif	$20 < x \leq 32$

Sumber : telah diolah kembali

Berdasarkan Tabel 5.4 di atas, maka PPMK dikatakan memberikan pengaruh tidak langsung yang positif terhadap kelompok sasaran jika hasil penghitungan pada aplikasi SPSS berada pada rentang nilai 20 hingga 32. Akan tetapi, jika hasil penghitungan pada aplikasi SPSS berada pada rentang 8 hingga 19, dapat dikatakan bahwa PPMK memberikan pengaruh tidak langsung yang negatif terhadap kelompok sasaran, PPMK dikatakan memberikan pengaruh yang negatif terhadap kelompok sasaran jika penghitungan pada aplikasi SPSS berada pada rentang nilai 9 hingga 22. Pada Gambar 5.56 akan dijelaskan mengenai hasil olahan data untuk dimensi pengaruh tidak langsung PPMK terhadap kelompok sasaran.



Gambar 5.56 Pengaruh Tidak Langsung PPMK terhadap Kelompok Sasaran
(n=50)

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (April, 2012)

Berdasarkan Gambar 5.56, dapat diketahui hasil penilaian responden pemanfaat mengenai pengaruh tidak langsung PPMK. Dari 50 responden pemanfaat, 90% para responden, atau sejumlah 45 responden memberikan penilaian positif terhadap pengaruh tidak langsung PPMK terhadap responden, yang dengan kata lain, para responden merasakan adanya pengaruh tidak langsung dari PPMK bagi perilaku dan pemahaman responden. Sedangkan sisanya, sejumlah 10% dari 50 responden, atau sejumlah 5 responden memberikan tanggapan negatif terhadap pengaruh tidak langsung PPMK terhadap responden, atau dengan kata lain, tidak ada pengaruh bagi responden.

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, maka dari penelitian yang berjudul “Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan” dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memberikan tanggapan positif atas dampak Program PPMK terhadap kesejahteraan responden di Kelurahan tersebut. Hal tersebut didapatkan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 100 responden, di mana 50 responden diantaranya pernah memanfaatkan program, dan 50 responden lainnya belum pernah memanfaatkan program tersebut.

6.2 Saran

Berangkat dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Program PPMK di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam rangka memperbaiki pelaksanaan Program PPMK di kelurahan tersebut. Beberapa saran tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan agar dapat meninjau kembali kebijakan program Bina Sosial. Program Bina Sosial PPMK diharapkan tidak hanya didesain untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi para pengangguran saja tetapi juga diharapkan dapat sekaligus menyalurkan keterampilan-keterampilan tersebut ke dunia kerja. Dengan adanya penyaluran langsung hasil pelatihan keterampilan dari Bina Sosial PPMK, diharapkan hal tersebut dapat memberikan dampak yang lebih berarti terhadap kesejahteraan masyarakat pemaafaat.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diharapkan untuk meninjau kembali kebijakan anggaran dana PPMK bagi tiap-tiap kelurahan sehingga jumlah anggaran bagi tiap-tiap kelurahan dapat diberikan

berdasarkan tingkat kemiskinan suatu kelurahan agar dapat meningkatkan kinerja program di masing-masing kelurahan.

3. Bagi Dinas Koperasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola Koperasi Jasa Keuangan, diharapkan agar meninjau kembali kebijakan bunga serta biaya administrasi dari suatu pinjaman agar tidak terlalu memberatkan masyarakat calon pemanfaat program.
4. Bagi pihak Dewan Kelurahan, diharapkan agar lebih tegas lagi dalam menagih dana bergulir yang masih beredar di tangan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, James E.. 1984. *Public Policy Making : 3rd Edition*. Boston : Houghton Mifflin Company.
- Black, Ken. 2010. *Business Statistics for Contemporary Decision Making*. Jefferson City : John Wiley & Sons, Inc.
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development : Putting The Last First*. England : Longmans Scientific and Technical Publishers.
- Conyers, Diana. 1982. *An Introduction To Social Planning In The Third World*. New York : Jhon Wiley & Sons.
- Dwidjowijoto, Nugroho Riant. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang : Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Pearson Prentice Hall.
- Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik Sebagai Tinjauan Filosofis*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Friedman, John. (1992). *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Cambridge : Blackwell Publisher.
- Hovland, Ingie. 2007. *Membuat Perbedaan : Pemantauan Dan Evaluasi Penelitian Kebijakan*. London : Overseas Development Institute.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cidesindo.
- Lester, James P. dan Josphe Stewart. 2000. *Public Policy : An Evolutionary Approach*. Wadsworth Publishing Company.
- Lewis, John P. Dan Valeriana Kallab. 1987. *Mengkaji Ulang Strategi-Strategi Pembangunan*. Jakarta : UI Press.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy : Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : CV. Putra Media Nusantara.

- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Parson, Wayne. 2001. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Pelissero, John P. 2003. *Cities, Politics, and Policy*. Washington D.C. : CQ Press.
- Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranaka. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Soetrisno, Lukman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Steer, Andrew D. 2006. *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia : Ikhtisar*. Jakarta : World Bank.
- Sugiyono. 1994. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edy. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Tim Mirah Sakethi. 2010. *Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta : PT Mirah Sakethi.
- Umar, Hussein. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Abdul Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Dokumen Peraturan

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Kepala badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Provinsi DKI Jakarta

Sumber Internet

- Alexey, Emilius Caesar. 2009. *Dana PPMK Dikucuekan September*. [http://megapolitan.kompas.com/read/2009/08/19/20333335/Dana.PPMK.Dikucurkan.September \(18 September 2011\)](http://megapolitan.kompas.com/read/2009/08/19/20333335/Dana.PPMK.Dikucurkan.September%20(18%20September%202011))
- Daniel, Wahyu. 2011. *Penduduk Miskin RI 'Ngumpul' di Pulau Jawa*. <http://finance.detik.com/read/2011/07/02/123225/1673049/4/penduduk-miskin-ri-ngumpul-di-pulau-jawa> (12 September 2011)
- GAPRI (Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia. 2003. *Advokasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Buku Panduan)*. www.gapri.org (3 Oktober 2011)
- Harahap, Lia. 2011. Foke Sepakat UMP Jakarta Tahun 2012 Rp 1,5 Juta <http://news.detik.com/read/2011/11/28/194123/1777623/10/foke-sepakat-ump-jakarta-tahun-2012-rp-15-juta> (4 Mei 2012)
- Iskarianty. 2010. *Kepadatan Penduduk Sebagai Akar dari Permasalahan Kota Jakarta*. <http://sosbud.kompasiana.com/2010/12/05/kepadatan-penduduk-sebagai-akar-dari-permasalahan-kota-jakarta/> (15 September 2011)
- Monalisa, 2012, Siap-Siap Nanti Air Datang, <http://www.antaranews.com/berita/293148/siap-siap-nanti-air-datang> (4 Mei 2012)
- Nugroho, Andi Sapto. 2011. *Atasi Kemiskinan dan Pengangguran di Jakarta*. http://www.jurnas.com/news/32422/Atasi_Kemiskinan_dan_Pengangguran_di_Jakarta/8/Ibu_Kota/Balai_Kota (15 September 2011)
- Pardosi, Ishak H. 2011. *BPS : 295 Ribu Penduduk Miskin di Jakarta*. <http://monitorindonesia.com/?p=48388> (15 September 2011)
- Purna, Ibnu, Hamidi dan Prima. 2009. *Upaya Pengurangan Kemiskinan*. http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4044&Itemid=29 (15 September 2011)

- Redaksi. *Tujuan PPMK.*
<http://www.beritajakarta.com/Dinas/PPMK/apappmk/tujuan.html> (3 Oktober 2011)
- Redaksi. 2009. *Korban Banjir Gratis Berobat di 17 RS.*
http://arsip.gatra.com/2009-02-09/versi_cetak.php?id=122938 (3 Oktober 2011)
- Tarigan, Antonius. 2009. *Mencermati Dampak Kebijakan Publik dalam Program Penanggulangan Kemiskinan.* <http://www.bappenas.go.id/node/48/2250/mencermati-dampak-kebijakan-publik-dalam-program-penanggulangan-kemiskinan-oleh--antonius-tarigan-/> (19 April 2012)
- Triyudha, Aria. 2011. *Kemiskinan Perkotaan Lebih Kompleks.* http://www.jurnas.com/news/37480/Kemiskinan_Perkotaan_Lebih_Kompleks/13/Sosial_Budaya (15 September 2011)
- Wardiana, Ridwan. 2011. *Pemberdayaan Sebagai Strategi Dalam Pengentasan Kemiskinan.*
<http://www.deptan.go.id/bpsdm/bppketindan/index.php/umum/243-pemberdayaan-sebagai-strategi-dalam-pengentasan-kemiskinan-bagian-2?format=pdf> (14 Oktober 2011)
- Wardiana, Ridwan. 2011. *Memahami Pemberdayaan.* <http://www.deptan.go.id/bpsdm/bppketindan/index.php/umum/216-memahami-pemberdayaan-empowerment?format=pdf> (14 Oktober 2011)
- World Bank. 2010. *Partisipasi Langsung : Memberdayakan Masyarakat Indonesia melalui Pengembangan Infrastruktur dan Layanan.*
http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Indonesia_Direct_Participation_4-11-10.pdf (14 September 2011)

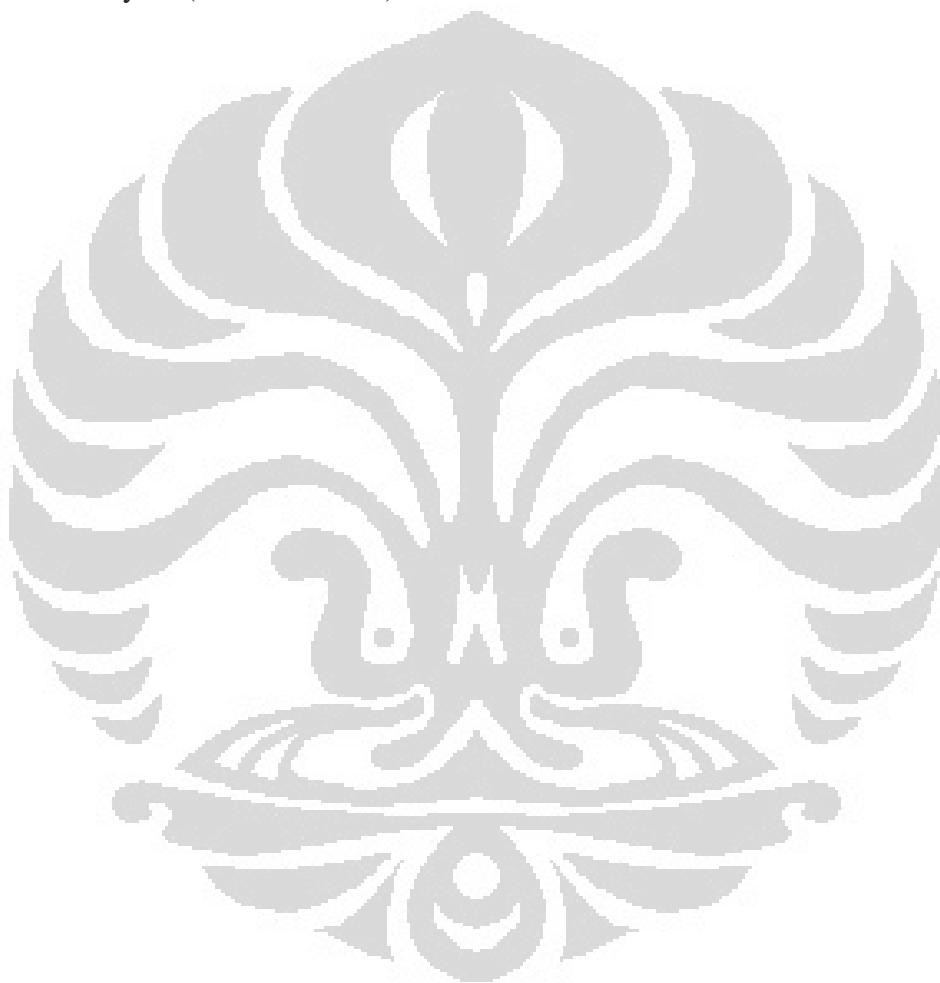
Wawancara Mendalam

Bapak Harsono (22 November 2011)

Field Notes

Nur Hasanah (16 Februari 2012)
 Marpuah (16 Februari 2012)
 M. Yusuf (24 Februari 2012)
 Abdul Rahman (24 Februari 2012)
 Effendi (24 Februari 2012)
 Supriyati (24 Februari 2012)
 Yahya (5 Maret 2012)
 Parmin (8 Maret 2012)
 Iwan (8 Maret 2012)

Karno Partiarso (14 Maret 2012)
Legiman (14 Maret 2012)
Lina (20 Maret 2012)
Endang (20 Maret 2012)
Tati Pratiwi (27 Maret 2012)
Abdullah (30 Maret 2012)
Komariah Gunarto (30 Maret 2012)
Jaronah (30 Maret 2012)
Desfaridah (30 Maret 2012)
Ertiyati (30 Maret 2012)
Boni Emiryani (30 Maret 2012)





No Kuesioner		
No Responden		

KUESIONER

Peneliti adalah mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip UI yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi tentang *Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan*. Peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saudara/saudari dapat menjawab kuesioner ini dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi apapun yang saudara/saudari berikan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan dijaga kerahasiaannya.

Bagian I

Isilah jawaban anda dengan mengisi jawaban pada titik-titik yang telah disediakan, serta berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda.

1. Nama :
2. Alamat :
3. Usia : tahun
4. Jenis kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
5. Pendidikan Formal Terakhir :
 - a. SD atau sederajat
 - b. SMP atau sederajat
 - c. SMA atau sederajat
 - d. Diploma
 - e. S1
 - f. S2
 - g. S3
 - h. Lainnya (.....)
6. Pekerjaan :
 - a. Pelajar/mahasiswa
 - b. Pegawai Swasta
 - c. Pegawai Negeri
 - d. Wiraswasta
 - e. Lainnya (.....)
7. Pendapatan per bulan

- a. \leq Rp. 250.000,00
- b. $>$ Rp. 250.000,00 sampai \leq Rp. 400.000,00
- c. $>$ Rp. 400.000,00 sampai \leq Rp. 800.000,00
- d. $>$ Rp. 800.000,00 sampai \leq Rp. 1.200.000,00
- e. $>$ Rp. 1.200.000,00 sampai \leq Rp. 2.000.000,00
- f. $>$ Rp. 2.000.000,00 sampai \leq Rp. 5.000.000,00
- g. $>$ Rp. 5.000.000,000

Bagian II

Isilah jawaban anda dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda

1. Apakah Anda mengetahui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)?*
 - a. Tidak
 - b. Ya

Jika jawaban Anda B, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika tidak, berhenti sampai di sini.

2. Apakah Anda pernah mengikuti Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)?*
 - a. Tidak
 - b. Ya

Jika jawaban Anda B, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika tidak, berhenti sampai di sini.

3. Apakah Anda memiliki salah satu kriteria di bawah ini?*
1. Memiliki usaha mikro;
 2. Kurang begitu memiliki keterampilan, terutama sebelum dijalankannya PPMK di kelurahan ini;
 3. Pernah mengalami musibah bencana;
 4. Terdaftar sebagai anggota dari suatu lembaga masyarakat di kelurahan ini.

Jika Anda memiliki salah satu kriteria di atas, silahkan lanjutkan ke bagian berikutnya.. Jika tidak, berhenti sampai di sini.

Bagian III

Isilah jawaban anda dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda.

Dimensi	No	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pengaruh Terhadap Kelompok Sasaran	1	Adanya perbaikan pendapatan sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	2	Adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	3	Adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	4	Adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	5	Adanya perbaikan mata pencaharian sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	6	Adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan berlindung (rumah) sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	7	Adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	8	Adanya perbaikan rasa aman terhadap tindak kejahatan sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	9	Adanya perbaikan kemampuan (hak) untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat				

Lampiran 1 (lanjutan)

		Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
Dimensi	No	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
Keadaan yang Diharapkan di Masa Kini	10	Adanya penyediaan dana bergulir untuk modal usaha sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	11	Adanya pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	12	Adanya pelaksanaan forum musyawarah sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	13	Adanya pelatihan keterampilan kepada para pengangguran sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	14	Adanya penyuluhan Narkoba di tingkat kelurahan sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	15	Adanya pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	16	Adanya perbaikan sarana prasarana penanggulangan bencana di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	17	Adanya perbaikan sarana perhubungan di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				

Lampiran 1 (lanjutan)

	18	Adanya perbaikan fasilitas sanitasi di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
Dimensi	No	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat Setuju
Keadaan yang Diharapkan di Masa Kini (lanjutan)	19	Adanya perbaikan sarana kebersihan di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	20	Adanya perbaikan sarana pendukung posyandu di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	21	Adanya perbaikan fasilitas olahraga di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	22	Adanya perbaikan fasilitas kesenian di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
Pengaruh tidak langsung terhadap kelompok sasaran	23	Anda menjadi lebih mandiri dalam melakukan kegiatan ekonomi sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	24	Anda menjadi lebih mandiri dalam memperbaiki kondisi lingkungan sekitar anda sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	25	Anda menjadi lebih peduli terhadap sesama warga di kelurahan ini sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	26	Anda memiliki kesetiakawanan sosial terhadap sesama warga di kelurahan ini sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				

Lampiran 1 (lanjutan)

	27	Anda melakukan kegiatan di lingkungan masyarakat secara gotong royong sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
Dimensi	No	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pengaruh tidak langsung terhadap kelompok sasaran (lanjutan)	28	Anda memahami pentingnya akses terhadap kredit mikro dalam upaya memperbaiki nasib sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	29	Anda memahami pentingnya masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	30	Anda memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				



No Kuesioner		
No Responden		

KUESIONER

Peneliti adalah mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fisip UI yang sedang melakukan penelitian untuk skripsi tentang *Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan*. Peneliti menggunakan instrumen berupa kuesioner dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saudara/saudari dapat menjawab kuesioner ini dengan sejujurnya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi apapun yang saudara/saudari berikan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan dijaga kerahasiaannya.

Bagian I

Isilah jawaban anda dengan mengisi jawaban pada titik-titik yang telah disediakan, serta berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda.

8. Nama :
9. Alamat :
10. Usia : tahun
11. Jenis kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
12. Pendidikan Formal Terakhir :
 - i. SD atau sederajat
 - j. SMP atau sederajat
 - k. SMA atau sederajat
 - l. Diploma
 - m. S1
 - n. S2
 - o. S3
 - p. Lainnya (.....)
13. Pekerjaan :
 - a. Pelajar/mahasiswa
 - b. Pegawai Swasta
 - c. Pegawai Negeri

- d. Wiraswasta
- e. Lainnya (.....)

14. Pendapatan per bulan

- h. \leq Rp. 250.000,00
- i. $>$ Rp. 250.000,00 sampai \leq Rp. 400.000,00
- j. $>$ Rp. 400.000,00 sampai \leq Rp. 800.000,00
- k. $>$ Rp. 800.000,00 sampai \leq Rp. 1.200.000,00
- l. $>$ Rp. 1.200.000,000 sampai \leq Rp. 2.000.000,00
- m. $>$ Rp. 2.000.000,000 sampai \leq Rp. 5.000.000,00
- n. $>$ Rp. 5.000.000,000

Bagian II

Isilah jawaban anda dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda

4. Apakah anda mengetahui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)?*
- a. Tidak
 - b. Ya

Jika jawaban anda B, lanjut ke bagian berikutnya. Jika tidak, berhenti sampai di sini.

5. Apakah Anda pernah mengikuti Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)?*
- a. Tidak
 - b. Ya

Jika jawaban Anda A, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika tidak, berhenti sampai di sini.

6. Apakah Anda memiliki salah satu kriteria di bawah ini?*

- 5. Tidak memiliki usaha mikro;
- 6. Sudah memiliki pekerjaan
- 7. Belum pernah mengalami musibah bencana;
- 8. Tidak terdaftar sebagai anggota dari suatu lembaga masyarakat di kelurahan ini.

Jika Anda memiliki salah satu kriteria di atas, silahkan lanjutkan ke bagian berikutnya.. Jika tidak, berhenti sampai di sini.

Bagian III

Isilah jawaban anda dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu kolom jawaban yang sesuai dengan pilihan Anda.

Dimensi	No	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pengaruh terhadap kelompok di luar sasaran kebijakan	1	Anda menjadi lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena adanya usaha-usaha mikro yang didanai oleh dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	2	Anda menjadi lebih mudah memanfaatkan tenaga terampil di lingkungan Anda sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	3	Anda menjadi lebih mudah dalam mengakses fasilitas olahraga di kelurahan Anda sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	4	Anda menjadi lebih mudah dalam mengakses fasilitas kesenian di kelurahan Anda sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	5	Anda menjadi lebih mudah dalam melakukan mobilisasi di kelurahan Anda sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	6	Anda menjadi lebih nyaman dengan kondisi lingkungan di kelurahan Anda sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				

Lampiran 2 (lanjutan)

Dimensi	No	Pernyataan	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat Setuju
Pengaruh terhadap kelompok di luar sasaran kebijakan (lanjutan)	7	Anda merasa adanya peningkatan komunikasi dengan sesama warga sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	8	Anda menjadi lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan Anda sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				
	9	Anda merasa kelurahan Anda menjadi lebih aman dari tindak kejahatan sejak dilaksanakannya Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di kelurahan ini				

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	29	58,0	58,0	58,0
	Perempuan	21	42,0	42,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31-40	7	14,0	14,0	14,0
	41-50	19	38,0	38,0	52,0
	51-60	12	24,0	24,0	76,0
	61-70	12	24,0	24,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD atau sederajat	10	20,0	20,0	20,0
	SMP atau sederajat	10	20,0	20,0	40,0
	SMA atau sederajat	18	36,0	36,0	76,0
	Diploma	5	10,0	10,0	86,0
	S1	6	12,0	12,0	98,0
	D1	1	2,0	2,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pegawai Swasta	4	8,0	8,0	8,0
	Wiraswasta	32	64,0	64,0	72,0
	Ibu Rumah Tangga	9	18,0	18,0	90,0
	Buruh	1	2,0	2,0	92,0
	Tukang Ojek	1	2,0	2,0	94,0
	Pensiun	3	6,0	6,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Pendapatan per bulan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <= Rp250.000	3	6,0	6,0	6,0
>Rp 250.000 sampai <= Rp 400.000	1	2,0	2,0	8,0
>Rp 400.000 sampai <= Rp 800.000	2	4,0	4,0	12,0
>Rp 800.000 sampai <= Rp 1.200.000	14	28,0	28,0	40,0
>Rp 1.200.000 sampai <= Rp 2.000.000	15	30,0	30,0	70,0
>Rp 2.000.000 sampai <= Rp 5.000.000	15	30,0	30,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan pendapatan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	14	28,0	28,0	28,0
Setuju	33	66,0	66,0	94,0
Sangat Setuju	3	6,0	6,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	16	32,0	32,0	32,0
Setuju	30	60,0	60,0	92,0
Sangat Setuju	4	8,0	8,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	17	34,0	34,0	34,0
	Setuju	31	62,0	62,0	96,0
	Sangat Setuju	2	4,0	4,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2,0	2,0	2,0
	Tidak Setuju	14	28,0	28,0	30,0
	Setuju	30	60,0	60,0	90,0
	Sangat Setuju	5	10,0	10,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan mata pencaharian sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	18	36,0	36,0	36,0
	Setuju	25	50,0	50,0	86,0
	Sangat Setuju	7	14,0	14,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan berlingdung (rumah) sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2,0	2,0	2,0
	Tidak Setuju	32	64,0	64,0	66,0
	Setuju	16	32,0	32,0	98,0
	Sangat Setuju	1	2,0	2,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	33	66,0	66,0	66,0
	Setuju	14	28,0	28,0	94,0
	Sangat Setuju	3	6,0	6,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan rasa aman terhadap tindak kejahatan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	13	26,0	26,0	26,0
	Setuju	37	74,0	74,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan kemampuan (hak) untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,0	4,0	4,0
	Tidak Setuju	39	78,0	78,0	82,0
	Setuju	9	18,0	18,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya penyediaan dana bergulir untuk modal usaha sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	41	82,0	82,0	82,0
	Sangat Setuju	9	18,0	18,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya kegiatan penguatan kelembagaan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	19	38,0	38,0	38,0
Setuju	30	60,0	60,0	98,0
Sangat Setuju	1	2,0	2,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya pelaksanaan forum musyawarah sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	2,0	2,0	2,0
Tidak Setuju	8	16,0	16,0	18,0
Setuju	38	76,0	76,0	94,0
Sangat Setuju	3	6,0	6,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya pelatihan keterampilan kepada pengangguran sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	10	20,0	20,0	20,0
Setuju	27	54,0	54,0	74,0
Sangat Setuju	13	26,0	26,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya penyuluhan narkoba di tingkat RW sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	1	2,0	2,0	2,0
Tidak Setuju	19	38,0	38,0	40,0
Setuju	27	54,0	54,0	94,0
Sangat Setuju	3	6,0	6,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	8	16,0	16,0	16,0
Setuju	31	62,0	62,0	78,0
Sangat Setuju	11	22,0	22,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan sarana prasarana penanggulangan bencana di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	13	26,0	26,0	26,0
Setuju	35	70,0	70,0	96,0
Sangat Setuju	2	4,0	4,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan sarana perhubungan di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Setuju	32	64,0	64,0	64,0
Sangat Setuju	18	36,0	36,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan fasilitas sanitasi di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	16	32,0	32,0	32,0
Setuju	27	54,0	54,0	86,0
Sangat Setuju	7	14,0	14,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan sarana kebersihan di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	7	14,0	14,0	14,0
Setuju	33	66,0	66,0	80,0
Sangat Setuju	10	20,0	20,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan sarana pendukung posyandu di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	3	6,0	6,0	6,0
Setuju	33	66,0	66,0	72,0
Sangat Setuju	14	28,0	28,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan fasilitas olahraga di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	12	24,0	24,0	24,0
Setuju	32	64,0	64,0	88,0
Sangat Setuju	6	12,0	12,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya perbaikan fasilitas kesenian di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju	2	4,0	4,0	4,0
Tidak Setuju	27	54,0	54,0	58,0
Setuju	18	36,0	36,0	94,0
Sangat Setuju	3	6,0	6,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya kemandirian dalam melakukan kegiatan ekonomi sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,0	4,0	4,0
	Tidak Setuju	11	22,0	22,0	26,0
	Setuju	28	56,0	56,0	82,0
	Sangat Setuju	9	18,0	18,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya kemandirian dalam memperbaiki kondisi lingkungan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	7	14,0	14,0	14,0
	Setuju	42	84,0	84,0	98,0
	Sangat Setuju	1	2,0	2,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya kepedulian terhadap sesama warga di Kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	6,0	6,0	6,0
	Setuju	40	80,0	80,0	86,0
	Sangat Setuju	7	14,0	14,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya kesetiakawanan sosial terhadap sesama warga di Kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	3	6,0	6,0	6,0
	Setuju	37	74,0	74,0	80,0
	Sangat Setuju	10	20,0	20,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya pelaksanaan kegiatan di Kelurahan setempat secara bergotong royong sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2,0	2,0	2,0
	Tidak Setuju	4	8,0	8,0	10,0
	Setuju	39	78,0	78,0	88,0
	Sangat Setuju	6	12,0	12,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya pemahaman mengenai pentingnya akses terhadap kredit mikro sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	10,0	10,0	10,0
	Setuju	35	70,0	70,0	80,0
	Sangat Setuju	10	20,0	20,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sejak dilaksanakannya PPMK di Kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	10,0	10,0	10,0
	Setuju	35	70,0	70,0	80,0
	Sangat Setuju	10	20,0	20,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan sejak dilaksanakannya PPMK di Kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	5	10,0	10,0	10,0
	Setuju	36	72,0	72,0	82,0
	Sangat Setuju	9	18,0	18,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Dimensi 1 Recode

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Negatif	19	38,0	38,0	38,0
	Positif	31	62,0	62,0	100,0
Total		50	100,0	100,0	

Dimensi 2 Recode

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Negatif	6	12,0	12,0	12,0
	Positif	44	88,0	88,0	100,0
Total		50	100,0	100,0	

Dimensi 3 Recode

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Negatif	5	10,0	10,0	10,0
	Positif	45	90,0	90,0	100,0
Total		50	100,0	100,0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	29	58,0	58,0	58,0
	Perempuan	21	42,0	42,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-30	5	10,0	10,0	10,0
	31-40	14	28,0	28,0	38,0
	41-50	16	32,0	32,0	70,0
	51-60	9	18,0	18,0	88,0
	61-70	4	8,0	8,0	96,0
	72,00	2	4,0	4,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Tingkat Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD atau sederajat	3	6,0	6,0	6,0
	SMP atau sederajat	7	14,0	14,0	20,0
	SMA atau sederajat	37	74,0	74,0	94,0
	Diploma	3	6,0	6,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Pelajar	2	4,0	4,0	4,0
Pegawai Swasta	8	16,0	16,0	20,0
Pegawai Negeri	3	6,0	6,0	26,0
Wiraswasta	19	38,0	38,0	64,0
Ibu Rumah Tangga	13	26,0	26,0	90,0
Pensiun	2	4,0	4,0	94,0
Satpam	1	2,0	2,0	96,0
Guru	1	2,0	2,0	98,0
Buruh	1	2,0	2,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Pendapatan per bulan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <= Rp250.000	1	2,0	2,0	2,0
>Rp 250.000 sampai <= Rp 400.000	2	4,0	4,0	6,0
>Rp 400.000 sampai <= Rp 800.000	9	18,0	18,0	24,0
>Rp 800.000 sampai <= Rp 1.200.000	6	12,0	12,0	36,0
>Rp 1.200.000 sampai <= Rp 2.000.000	15	30,0	30,0	66,0
>Rp 2.000.000 sampai <= Rp 5.000.000	11	22,0	22,0	88,0
>Rp 5.000.000	6	12,0	12,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya kemudahan dalam memanfaatkan tenaga terampil di lingkungan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	15	30,0	30,0	30,0
Setuju	32	64,0	64,0	94,0
Sangat Setuju	3	6,0	6,0	100,0
Total	50	100,0	100,0	

Adanya kemudahan dalam mengakses fasilitas olahraga di lingkungan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Setuju	18	36,0	36,0	36,0
	Setuju	30	60,0	60,0	96,0
	Sangat Setuju	2	4,0	4,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya kemudahan dalam mengakses fasilitas kesenian di lingkungan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	13	26,0	26,0	26,0
	Tidak Setuju	26	52,0	52,0	78,0
	Setuju	10	20,0	20,0	98,0
	Sangat Setuju	1	2,0	2,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya kemudahan dalam melakukan mobilisasi di lingkungan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat tidak setuju	1	2,0	2,0	2,0
	Tidak setuju	7	14,0	14,0	16,0
	Setuju	27	54,0	54,0	70,0
	Sangat Setuju	15	30,0	30,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya kenyamanan dengan kondisi lingkungan di kelurahan setempat (taman) sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2,0	2,0	2,0
	Tidak Setuju	10	20,0	20,0	22,0
	Setuju	32	64,0	64,0	86,0
	Sangat Setuju	7	14,0	14,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya peningkatan komunikasi antarwarga sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	1	2,0	2,0	2,0
	Tidak Setuju	9	18,0	18,0	20,0
	Setuju	37	74,0	74,0	94,0
	Sangat Setuju	3	6,0	6,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya kemudahan dalam berpartisipasi untuk pembangunan di kelurahan setempat sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	2	4,0	4,0	4,0
	Tidak Setuju	15	30,0	30,0	34,0
	Setuju	29	58,0	58,0	92,0
	Sangat Setuju	4	8,0	8,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Adanya peningkatan keamanan dari tindak kejahatan sejak dilaksanakannya PPMK di kelurahan ini

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	3	6,0	6,0	6,0
	Tidak Setuju	13	26,0	26,0	32,0
	Setuju	32	64,0	64,0	96,0
	Sangat Setuju	2	4,0	4,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

Dimensi 2 Recode

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Negatif	12	24,0	24,0	24,0
	Positif	38	76,0	76,0	100,0
	Total	50	100,0	100,0	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hariyana
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 23 November 1990
Alamat : Jalan Tebet Timur Dalam 3C Nomor 7
Jakarta12820
Nomor telepon/Hp : 085693388393
Email : hariyana.husnaidi@yahoo.co.id
Nama Orang Tua - Ayah : Husnaidi
- Ibu : Faizah Siregar
Riwayat Pendidikan Formal:
SD : SD Negeri Tebet Timur 19 Pagi
SMP : SMP Negeri 115 Jakarta
SMA : SMA Negeri 68 Jakarta

